UNIVERSITAS PERTAHANAN

IMPLEMENTASI PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) DALAM MENDUKUNG PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN DI WILAYAH KODIM 0621/KAB BOGOR PERIODE 2014-2018

FACHRUDDIN USULUDDIN
NIM. 120180101002

Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan

FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI STRATEGI PERANG SEMESTA

BOGOR, 2019

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : Fachruddin Usuluddin

NIM : 120180101002

Program Studi : Strategi Perang Semesta (SPS)

Fakultas : Strategi Pertahanan

Judul Tesis :

Implementasi Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dalam mendukung Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor periode 2014-2018

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Pembimbing I Dr.Hipdizah,S.Adm.,M.Si Mayor Jenderal TNI		
2	Pembimbing II Dr.Harangan Sitorus,S.I.P.,M.Sc.,M.Si (Han) Brigadir Jenderal TNI (Purn)		
3	Penguji I Dr.Ir.Syaiful Anwar,M.Bus.,M.A Mayor Jenderal TNI (Mar/Purn)		
4	Penguji II Dr.Muhammad Faisal,S.E.,M.M Laksamana Pertama TNI		
5	Penguji III Dr,Sri Sundari,S.E.,M.M Kolonel Chb (K) Nrp 19100100560595		

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu perguruan tinggi; dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraph, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Refrensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Bogor, Oktober 2019

Fachruddin Usuluddin

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Pertahanan Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	:	Fachruddin Usuluddin
NIM	:	120180101002
Program Studi	:	Strategi Perang Semesta
Fakultas	:	Strategi Pertahanan
Jenis Karya	:	Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya berjudul :

"Implementasi Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Dalam Mendukung Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di Wilayah Kodim 0621/Kab Bogor periode 2014-2018"

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta/karya intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, Okober 2019

Fachruddin Usuluddin

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama	:	Fachruddin Usuluddin
NIM	:	120130101002
Program Studi	:	Strategi Pertahanan Semesta
Fakultas	:	Strategi Pertahanan
Judul Tesis	:	Implementasi Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dalam mendukung Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor periode 2014-2018

No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Pembimbing I Dr.Hipdizah,S.Adm.,M.Si Mayor Jenderal TNI		3/10 19
2.	Pembimbing II Dr.Harangan Sitorus,S.I.P.,M.Sc.,M.Si(Han) Brigadir Jenderal TNI (Purn)		3/10 19
3.	Penguji I Dr.Ir.Syaiful Anwar,M.Bus.,M.A Mayor Jenderal TNI (Mar/Purn)		3/10 19
4.	Penguji II Dr.Muhammad Faisal,S.E.,M.M Laksamana Pertama TNI		3/10 19
5.	Penguji III Dr,Sri Sundari,S.E.,M.M Kolonel Chb (K) Nrp 19100100560595		30/9 . 19

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulisan tesis dengan judul :

"**Implementasi program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dalam mendukung pemberdayaan Wilayah Pertahanan di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor periode 2014-2018",** dapat diselesaikan.

Penyusunan tesis ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Pertahanan Universitas Pertahanan.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Mayor Jenderal TNI Dr.Hipdizah,S.Adm.,M.Si selaku pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
2. Brigadir Jenderal TNI Dr.Harangan Sitorus,S.I.P.,M.Sc.,M.Si(Han) selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
3. Staf Teritorial Mabes TNI, Staf Teritorial Mabes TNI AD, Danrem 061/SK, Dandim 0621/Kab Bogor serta jajarannya, Bupati Kab Bogor serta jajarannya yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan untuk penelitian ini.
4. Kolonel Chb (K) Dr.Sri Sundari,S.E.,M.M yang sudah bekenan meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan membantu peneliti dalam aplikasi metode penelitian.

5. Henny Farida Listiani, isteri tercinta yang selalu menyemangati serta anak-anak tercinta Clarissa Fitria Salsabilla dan fayza Arifa Ramadhanti yang senantiasa mendorong dan memberi semangat kepada saya untuk dapat menyelesaikan tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan-kebaikan berbagai pihak atas bantuannya.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pertahanan dan bermanfaat bagi pihak terkait dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan TMMD.

Bogor, Oktober 2019

Fachruddin Usuluddin

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Fachruddin Usuluddin

NIM : 120130101002

Program Studi : Strategi Perang Semesta

Fakultas : Strategi Pertahanan

Judul Tesis :

IMPLEMENTASI PROGRAM
TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD)
DALAM MENDUKUNG PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN
DI WILAYAH KODIM 0621/KAB BOGOR
PERIODE 20014-2018

Pembimbing I

Dr.Hipdizah,S.Adm.,M.Si
Mayor Jenderal TNI
Tanggal.....

Pembimbing II

Dr.Harangan Sitorus,S.I.P.,M.Sc.,M.Si(Han)
Brigadir Jenderal TNI (Purn)
Tanggal.....

Mengetahui
Dekan
Fakultas Strategi Pertahanan

Murlim Mariadi,S.IP.,M.M.,M.Tr (Han)
Mayor Jenderal TNI
Tanggal.....

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) DALAM MENDUKUNG PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN DI WILAYAH KODIM 0621/KAB BOGOR PERIODE 2014-2018

*Fachruddin Usuluddin

Penelitian ini menganalisis tentang pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor periode 2014-2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana implementasi program TMMD yang dilaksanakan oleh Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat. Penelitian dilakukan melalui metode kualitatif dengan observasi, wawancara, dokumentasi, tekhnik trianggulasi.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan model Implementasi Komunikasi, Sumber daya, Disposisi atau Sikap pelaksanan, Struktur Birokrasi (George Edward III). Masing-masing elemen tersebut di analisis kondisi aktualnya, untuk selanjutnya kondisi aktual dari setiap elemen tersebut di kombinasikan untuk menghasilkan kesimpulan keseluruhan implementasi program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program TMMD khususnya tentang partisispasi masyarakat kurang optimal karena tidak adanya regulasi (Perda) yang mendukung program TMMD, namun demikian hasil implementasi program TMMD khususnya tentang partisipasi masyarakat dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor dengan tujuan dan sasaran yang tepat dan struktur organisasi TMMD yang terpadu dengan unsur-unsur Pemda maka hasil yang di harapkan untuk meningkatkan semangat bela Negara, cinta tanah air dan wawasan kebangsaan serta meningkatkan semangat gotong royong guna mewujudkan Ruang Alat Kondisi (RAK) juang yang tangguh serta kemanunggalan TNI dan Rakyat akan tercapai

Kata kunci : Pemberdayaan wilayah pertahanan, Implementasi Program dan TMMD

ABSTRACT

The Indonesian National Army Unite with the people Building Village Implementation Program in supporting the empowerment of defense territories in the District Military District Command 0621 / Bogor Regency for the period 2014-2018

Fachruddin Usuluddin

This study analyzes the implementation of the The Indonesian National Army Unite with the people Building Village program in support of the empowerment of defense areas in the District Military District Command 0621 / Bogor Regency period 2014-2018. The purpose of this study is to see the extent of the implementation of the TMMD program carried out by District Military Command 0621 / Bogor District specifically on community participation. The study was conducted through qualitative methods with observation, interviews, documentation, triangulation techniques.

The data obtained were then analyzed with the model of Communication Implementation, Resources, Disposition or Attitudes, Bureaucratic Structure (George Edward III). Each of these elements is analyzed the actual conditions, then the actual conditions of each element are combined to produce an overall conclusion of the implementation of the program.

The results showed that the implementation of the TMMD program specifically about community participation was less than optimal because there were no provisions (Perda) that support the TMMD program, however the results of the implementation of the TMMD program specifically about community assistance in supporting community empowerment in the jurisdiction in the District Military Command 0621 / Bogor Regency area with the appropriate goals and objectives and organizational structure of TMMD integrated with no-no-Regional Government, the expected results are to increase the country's spirit of self-defense, love of the motherland and nationality insight as well as enhance the spirit of mutual cooperation in order to develop a Fighting Work Space (RAK) that tough and unified military and the people will be achieved

Keywords: Empowerment of Defense Areas, Implementation Programs and TMMD

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS iii
PERNYATAAN ORISIONALITAS iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH v
KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR TABEL xiii
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 8
1.4 Manfaat Penelitian 8
1.4.1 Manfaat teoritis 8
1.4.2 Manfaat praktis 9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori 11
2.1.1 Implementasi 11
2.1.2 Pengertian Program 19
2.1.3 Pembangunan 21
2.1.4 Pemberdayaan Masyarakat 25
2.1.5 Partisipasi Masyarakat 29
2.1.6 Pemberdayaan Wilayah Pertahanan 33
2.1.7 Pengertian TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 36
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan 39
2.3 Kerangka Berpikir 47

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metode dan Desain Penelitian 48
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 54
3.3 Subyek dan Obyek Penelitian 56
3.3.1 Subyek Penelitian 56
3.3.2 Obyek Penelitian 58
3.4 Tekhnik Pengumpulan Data 58
3.4.1 Wawancara 60
3.4.2 Observasi 62
3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data 63
3.6 Teknik Analisis Data 66
3.6.1 Reduksi Data 68
3.6.2 Penyajian Data 71
3.6.3 Verifikasi Data 71
3.6.4 Interpretasi Data 72
3.6.5 Pengambilan Kesimpulan 72
BAB 4 PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran umum obyek penelitian 73
4.1.1 Wilayah Kodim 0621/Kab Bogor 73
4.1.2 Satuan Kodim 0621/Kab Bogor 78
4.1.3 Program TMMD 81
4.1.4 Desa Rabak Kecamatan Rumpin 91
4.1.5 Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya 94
4.1.6 Desa Banyuasih Kecamatan Cigudeg 97
4.2 Hasil Penelitian 102
4.2.1 Implementasi Program TMMD di Wilayah Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat 102
4.2.2 Hasil implementasi program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kabupaten Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat 117
4.3 Pembahasan 127

4.3.1 Implementasi Program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat 127
4.3.2 Hasil implementasi program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kabupaten Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat 141
BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1 Kesimpulan 148
5.2 Rekomendasi 151
DAFTAR PUSTAKA.....153
LAMPIRAN 1 HASIL OBSERVASI.....161
LAMPIRAN 2 TRANSKRIP WAWANCARA 173
LAMPIRAN 3 SURAT TUGAS PENELITIAN.....217
RIWAYAT HIDUP PENELITI 221

DAFTAR GAMBAR

Judul **Halaman**

Gambar 1.1 Grafik pelibatan masyarakat dalam TMMD 2014-2018……..7

Gambar 2.1 Level Partisipasi menurut Arnstein…….....34

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir……..……49

Gambar 3.1 Komponen Analisi Data model Interaktif……..…68

Gambar 3.2 Trianggulasi tekhnik pengumpulan data……..71

Gambar 3.3 Trianggulasi sumber pengumpulan data…….71

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Bogor……...73

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kodim…….79

Gambar 4.3 Struktur Organisasi TMMD……..…..84

Gambar 4.4 Grafik penduduk desa Banyuasih berdasarkan usia……98

Gambar 4.5 Grafik Penduduk desa Banyuasih berdasarkan mata pencarian…….99

DAFTAR TABEL

Judul Halaman

Tabel 1.1 Data Pelaksanaan TMMD…….5

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu…….44

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian……...56

Tabel 3.2 Data Informan……..57

Tabel 4.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Bogor…….74

Tabel 4.2 Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan dan jenis lapangan usaha di Kabupaten Bogor,2017……..75

Tabel 4.3 Rangkuman tentang Implementasi Program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat……108

Tabel 4.4 Rangkuman tentang hasil implementasi program TMMD……117

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kekuatan yang menghasilkan daya tangkal bangsa serta kemampuan mengatasi dan menanggulangi setiap ancaman. (Kementerian Pertahanan RI, Strategi Pertahanan Negara, 2015 : hal 119). Daya tangkal bangsa serta kemampuan mengatasi dan menanggulangi ancaman tersebut disiapkan secara dini oleh Pemerintah dibantu TNI melalui pemberdayaan wilayah pertahanan. Hal ini berarti penyiapan wilayah dan warga negara dalam mendukung pertahanan negara merupakan tugas Pemerintah yang dilakukan dengan pemberdayaan wilayah pertahanan.

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pada Pasal 7 ayat (2), tugas pokok TNI dilakukan dengan Operasi militer untuk perang (OMP) dan Operasi militer selain perang (OMSP). Salah satu bentuk tugas dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan Sistem Pertahanan Semesta. Selain itu dalam OMSP dikatakan bahwa TNI bertugas membantu tugas pemerintahan di daerah.

Konsep sistem pertahanan semesta ini mengharuskan adanya pelibatan rakyat dalam mendukung dan memperbesar kekuatan komponen utama (TNI). Konsep ini mengharuskan adanya suatu hubungan yang harmonis tanpa batas antara TNI, Rakyat dan Pemerintah. Untuk mendapatkan hubungan yang harmonis tanpa batas antara TNI, rakyat dan pemerintah maka kemanunggalan TNI,Rakyat dan bersama rakyat TNI kuat harus terus di bina dan diwujudkan dengan suatu program kegiatan yang melibatkan TNI, Rakyat dan Pemerintah.

Pada awalnya TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) disebut ABRI Masuk Desa (AMD), dengan tujuan agar prajurit ABRI (TNI) dapat mengenal rakyat, mengetahui adat istiadat, budaya daerahnya dan rakyatpun dapat lebih mengenal dan memahami ABRI atau TNI, sehingga potensi kemanunggalan ABRI atau TNI dengan rakyat dapat mendorong dan menggerakkan masyarakat ke arah perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam mengatasi kemiskinan, dengan tujuan agar prajurit TNI lebih dekat dan mengenal rakyat, maka TMMD harus melibatkan rakyat dengan konsep gotong royong. Pelibatan rakyat ini penting karena salah satu tujuan TMMD.

TMMD merupakan salah satu program yang dapat mengakomodir serta merealisasikan maksud tersebut. TMMD merupakan program unggulan dalam rangka Pemberdayaan Wilayah Pertahanan (Perwilhan) diselenggarakan di setiap jajaran Komando Distrik Militer (Kodim) di seluruh penjuru wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan tujuan untuk meningkatkan Kemanunggalan TNI dan Rakyat agar terwujud bersama Rakyat TNI kuat .

Dalam melaksanakan tugas tersebut, salah satu implementasinya melalui pembinaan teritorial (Binter) yang merupakan upaya dalam menyiapkan kekuatan pertahanan meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya (masyarakat) sehingga tercapai kemanunggalan TNI dan Rakyat sebagai wujud citra baik TNI di mata masyarakat. Pembinaan Teritorial dilaksanakan oleh satuan jajaran TNI merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memberdayakan potensi wilayah agar dapat dijadikan kekuatan aspek pertahanan guna mewujudkan Ruang, Alat dan Kondisi (RAK) juang yang tangguh untuk kepentingan Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) sehingga dapat terwujud pemberdayaan pertahanan (perwilhan) dalam aspek fisik dan non fisik . Perwilhan yang dilaksanakan oleh Kodim 0621/Kabupaten Bogor memiliki

sasaran untuk mewujudkan RAK juang serta Kemanunggalan TNI dan Rakyat untuk mendukung kepentingan Pertahanan Negara di wilayah Kabupaten Bogor. (Renbinter Kodim 0621/Kab Bogor tahun 2019). Perwilhan di sini dapat meliputi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga dapat dikatakan bahwa program TMMD adalah program yang memanfatkan dan mendayagunakan SDA dan SDM untuk kepentingan pertahanan. Dalam pemberdayaan SDM itulah terdapat pemberdayaan masyarakat yang merupakan hal terpenting dalam suatu program menyentuh masyarakat seperti program TMMD,sehingga dapat disimpulkan bahwa program TMMD merupakan implementasi dari tugas pemberdayaan wilayah pertahanan yang dilaksanakan oleh tiap-tiap Satuan Kowil (Kodim). Kegiatan ini bersifat lintas sektoral dan terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan satuan TNI di wilayah Kabupaten Bogor tanpa mengabaikan kesiapsiagaan satuannya.

Adapun aspek fisiknya seperti pembangunan infra struktur baik membangun jalan, jembatan, gorong-gorong dan renovasi gedung atau rumah. Sedangkan untuk non fisik seperti adanya pendidikan dan latihan kader bela negara dan ini sesuai dengan program TMMD yang mengarah pada partisipasi masyarakat.

Fenomena yang ada dari hasil evaluasi pelaksanaan program TMMD tahun 2018 oleh Staf Teritorial Mabesad ada beberapa masalah yang teridentifikasi, bersifat umum dan ditemukan hampir di seluruh satuan Kowil (Kodim) di seluruh Indonesia yaitu : 1) Sasaran fisik tidak sesuai kebutuhan daerah, tidak menggunakan mekanisme *Bottom Up Planning*; 2) Tidak diusulkan oleh masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa/kecamatan; 3) Penggunaan alat berat lebih dominan; 4) Kegiatan gotong royong berkurang ; dan 5) Pelibatan masyarakat tidak maksimal.

Pelaksanaan TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor sudah sering dilaksanakan dan pelaksanaannya hampir setiap tahun sejak TMMD pertama kali dicanangkan pada tahun 1980 an. Hingga saat ini sudah ± 38 tahun berjalan. Peneliti memfokuskan penelitian ini pada aspek partisipasi dan pelibatan masyarakat. Untuk mengetahui tingkat partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor, pada lima tahun terakhir yaitu khususnya pada periode 2014 sampai dengan 2018.

Hasil pendataan sementara yang dilakukan peneliti terhadap pelaksanaan TMMD pada periode tahun 2014-2018 pada tiga lokasi yang berbeda di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor maka dapat dipetakan dengan tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Data Pelaksanaan TMMD

No	TMMD/ TA	Lokasi	Sasaran		Hasil
			Fisik	Non fisik	
1	Ke-94 2014	Kp Cijambe, desa Banyuasih, kec Cigudeg	-pembuatan badan jalan 6X4,5 km -pemasangan gorong-gorong sebanyak 12 buah -perkerasan badan jalan sepanjang ± 750 m	Penyuluhan KB-Kes,Penyuluhan pendididkan, Ceramah dan sosialisasi UU no.3/2003 tentang pertahanan negara, penyuluhan budi daya pertanian/penghijauan	
2	2015	-	-	-	-
3	Ke-96 2016	Ds Kiara pandak, Kec Suka jaya	-Pelebaran jalan 4 m x 5000 m -pembuatan bahu jalan ki/ka 2 m x 5000m -pembuatan saluran air ki/ka 1m x 5000 m -pemasangan gorong-gorong 12 titik	Penyuluhan KB-Kes,Penyuluhan pendididkan, Ceramah dan sosialisasi UU no.3/2003 tentang pertahanan negara, penyuluhan budi daya pertanian/penghijauan	
4	2017	-	-	-	-
5	Ke-102 2018	Kp Cijantur, Ds Rabak, Kec. Rumpin Kab Bogor	pembangunan fisik jalan sepanjang 3,7 Km, pengerasan jalan 4 meter, pelebaran bahu jalan 7 meter, pemasangan gorong-gorong di tiga titik, renovasi rutilahu 5 unit rumah, pembuatan mushola dan poskamling satu unit.	penyuluhan bela negara, wawasan kebangsaan, pelayanan kesehatan, pelayanan KB, pendidikan, agama, penyuluhan tentang bahaya narkoba, Kamtibmas, dan pertanian	

Sumber : Data diolah oleh Peneliti 2019

Dari tabel tersebut di atas peneliti mencoba membuat grafik terkait pelibatan masyarakat khususnya di ke tiga desa tersebut sebagai berikut :

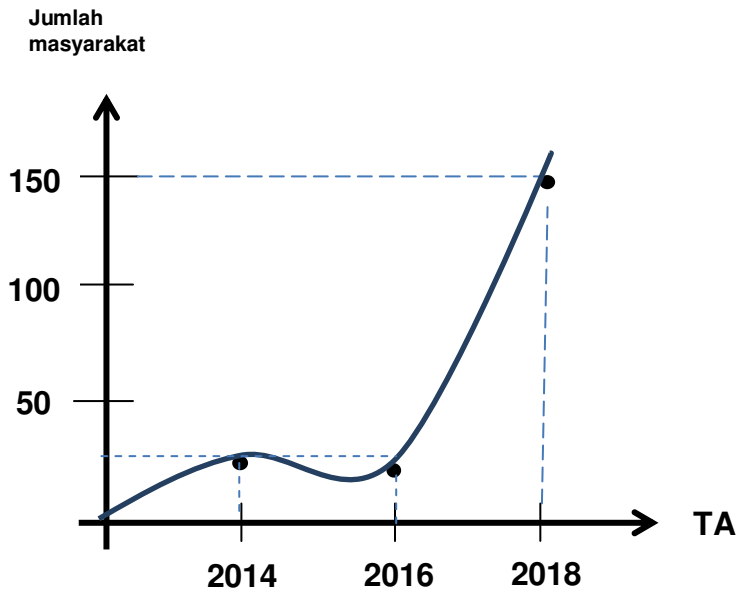

Gambar 1.1 Grafik pelibatan masyarakat dalam TMMD 2014-2018
Sumber : Data dari dokumen Kodim 0621/Kab Bogor, 2018

Dari grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa TMMD tahun 2018 dilaksanakan di Kampung Cijantur, Desa Rabak, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Kegiatan TMMD dilakukan selama 30 hari dimulai dari tanggal 10 Juli hingga 8 Agustus 2018 dengan sasaran pengerjaan fisik dan non fisik. Sasaran fisik berupa pembangunan fisik jalan sepanjang 3,7 Km, pengerasan jalan 4 meter, pelebaran bahu jalan 7 meter, pemasangan gorong-gorong di tiga titik, renovasi rutilahu (rumah tidak layak huni) 5 unit, pembuatan mushola dan poskamling satu unit. Sasaran non fisik yaitu penyuluhan bela negara, wawasan kebangsaan, pelayanan kesehatan, pelayanan KB, pendidikan, agama, penyuluhan tentang bahaya narkoba, kamtibmas, dan pertanian. Personel yang terlibat 365 orang terdiri dari TNI : 195 orang, Pemda : 10 orang, Polri : 10 orang dan partisipasi masyarakat 150 orang. (Laporan pelaksanaan TMMD ke-102 Kodim 0621/Kab Bogor)

Pada tahun 2016 pelaksanaan Program TMMD diwilayah Kodim 0621/Kab. Bogor dilaksanakan di desa Kiara Pandak, Kecamatan Suka Jaya, Kabupaten Bogor, Kegiatan TMMD dilaksanakan selama 30 hari dengan Sasaran fisik berupa Pelebaran jalan 4 m x 5000 m, pembuatan bahu jalan ki/ka 2 m x 5000m, pembuatan saluran air ki/ka 1m x 5000 m, pemasangan gorong-gorong 12 titik. Kegiatan sasaran non fisik yaitu penyuluhan KB-Kes, penyuluhan pendididkan, sosialisasi UU no.3/2003 tentang pertahanan negara, penyuluhan budi daya pertanian/penghijauan. Personil yang terlibat 150 orang terdiri dari TNI : 125 orang dan Pemda : 25 orang. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya yang hadir kurang optimal. (Laporan pelaksanaan TMMD Kodim 0621/Kab Bogor tahun 2016)

Selanjutnya pada tahun 2014 Program TMMD diwilayah Kodim 0621/Kab. Bogor dilaksanakan di Kp Cijambe, desa Banyuasih, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Kegiatan TMMD dilaksanakan selama 21 hari dengan sasaran fisik berupa pembuatan badan jalan 6 X 4,5 km, perkerasan badan jalan sepanjang ± 750 m, pemasangan gorong-gorong sebanyak 12 buah. Kegiatan sasaran non fisik yaitu Penyuluhan KB-Kes, Penyuluhan pendididkan, Ceramah dan sosialisasi UU Nomor 3 tahun 2003 tentang pertahanan negara, penyuluhan budi daya pertanian/penghijauan. Peralatan dan perlengkapan menggunakan alat Toolkit dukungan dari Ko atas. Personil yang terlibat 150 orang terdiri dari TNI : 135 orang, Pemda dan Polri : 15 orang. Partisipasi masyarakat minim. (Laporan pelaksanaan TMMD Kodim 0621/Kab Bogor tahun 2014)

Dokumen laporan hasil pelaksanaan TMMD pada tahun 2014 dan 2016 menyebutkan bahwa jumlah masyarakat yang hadir kurang dari 50 orang. Tahun 2018 partisipasi dan pelibatan masyarakat disebutkan menjadi 150 orang meningkat drastis. Maka antara perencanaan dan pelaksanaan TMMD pada tahun 2014 dan 2016 terdapat kejanggalan dalam aspek partisipasi dan pelibatan masyarakat. Namun pada tahun 2018, baik pada

dokumen perencanaan maupun laporan pelaksanaan TMMD, kedua-keduanya menyatakan dengan tegas bahwa tingkat partisipasi dan pelibatan masyarakat sejumlah 150 orang.

Peneliti menemukan adanya kejanggalan dalam perencanaan TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor pada kurun waktu tahun 2014 dan 2016, khususnya pada aspek tingkat partisipasi dan pelibatan masyarakat. Partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam program TMMD merupakan hal yang penting, karena salah tujuan TMMD adalah mewujudkan kemanunggalan TNI Rakyat. Bagaimana kemanunggalan TNI dan Rakyat akan terwujud apabila pelaksanaan program TMMD kurang adanya partisipasi masyarakat dan peneliti dalam penelitian ini menggunakan model teori implementasi oleh George Edward III dimana adanya komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana/disposisi dan stuktur birokrasi.

Pada prinsipnya masyarakat mendukung dan rencananya akan dilaksanakan secara bergiliran namun kembali lagi dalam pelaksanaannya masyarakat yang hadir kurang optimal serta tidak dinyatakan secara rinci berapa jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi pada saat itu.

Dengan demikian peneliti mengambil judul "**Implementasi program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dalam mendukung pemberdayaan Wilayah Pertahanan di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor periode 2014-2018"**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat berbagai masalah dan fenomena yang terjadi sebagaimana dijelaskan diatas, peneliti memandang penting adanya pemikiran terkait pemberdayaan wilayah pertahanan dengan membuat rumusan masalah sebagai berikut :

a. Bagaimana implementasi program TMMD dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat ?
b. Bagaimana hasil implementasi program TMMD khususnya tentang partisipasi masyarakat dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan penelitian adalah :

a. Menganalisis implementasi program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat.
b. Menganalisis hasil implementasi program TMMD sesuai konsep pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu dari aspek teoritis (keilmuan) dan manfaat dari aspek praktis (guna laksana), baik untuk pengembangan konsep maupun sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

1.4.1 Manfaat teoritis (Keilmuan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi pengembangan Studi Strategi Perang Semesta melalui kegiatan implementasi program TMMD khususnya tentang partisipasi masyarakat dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan. Penelitian ini akan menjelaskan program TMMD dari sudut keilmuan pertahanan secara ilmiah sehingga dapat diterima oleh publik dan kaum akademisi. Pengakuan dari publik dan kaum akademisi ini penting dalam

rangka mengangkat program TMMD ke level yang lebih strategis di tingkat nasional. Selanjutnya penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai refrensi dan bahan acuan bagi penelitian yang sejenis di kemudian hari.

Disamping itu secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan teori-teori implementasi, teori program terutama teori partisipasi masyarakat dan pemberdayaan. Teori ini sangat penting dalam rangka mewujudkan konsep program TMMD yang baik yang menjadikan warga masyarakat bukan hanya sebagai obyek pembangunan, namun sebagai subyek dalam pembangunan. Selain itu bermanfaat pula untuk mengembangkan khasanah keilmuan terutama dalam melaksanakan penelitian. Dengan penelitian ini, peneliti dituntut memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai tata cara penelitian, serta dapat mengembangkan pengetahuan yang diberikan selama pendidikan untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah.

1.4.2 Manfaat praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai dasar untuk mengambil keputusan bagi instansi yang terkait dalam upaya meningkatkan kualitas Implementasi program TMMD dimasa mendatang yang dapat memberikan kontribusi dan mendukung mewujudkan pemberdayaan wilayah pertahanan khususnya di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor.

Disamping itu secara praktis penelitian ini juga memiliki manfaat dalam rangka mengimplementasikan Program TMMD di wilayah dengan mengedepankan masalah partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan pada program yang tengah dilaksanakan. Bagi masyarakat mempunyai nilai manfaat dalam meningkatkan partisipasi aktifnya dalam kegiatan TMMD dan memelihara serta memanfaatkan hasil-hasilnya, yang pada akhirnya masyarakat menjadi mandiri. Warga masyarakat memiliki peran yang cukup penting dalam menyediakan Ruang, Alat, dan Kondisi Kejuangan (RAK

Juang) dalam mewujudkan sistem pertahanan rakyat semesta. Selain itu bermanfaat pula dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam rangka program pemberdayaan wilayah pertahanan yang berbasis partisipasi masyarakat khususnya Program TMMD.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep, proposisi yang telah disusun rapi, dan sistematis tentang variable-variable dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Landasan teori yang dituliskan dalam proposal penelitian lebih berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh peneliti memiliki teori dan memahami permasalahan yang diteliti walaupun permasalahan tersebut masih bersifat sementara. (Sugiyono, 2016: hal 48).

Pembuatan landasan teori secara baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi salah satu hal yang penting, karena landasan teori akan menjadi sebuah pondasi dan landasan dalam penelitian itu sendiri.

2.1.1 Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. **Implementasi** merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan. Implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah Undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna

menggerakkan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke kepada obyek penerima kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. (Wahab,A.S,1997:hal 64-65)

Implementasi merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahan yang sah dari suatu program yang meliputi upaya mengelola input. *Van Meter* dan *Van Horn* mendefinisikan "implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan". Tindakan-tindakan yang dimaksud mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh program. (Agustino,2006:hal 51-52)

Model teori implementasi kebijakan yang dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) disebut dengan *A Model of the Policy Implementation.* Pelaksanaan implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi perwujudan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

Implementasi suatu program merupakan suatu yang kompleks, dikarenakan banyaknya faktor yang saling berpengaruh dalam sebuah sistem yang tidak lepas dari faktor lingkungan yang cenderung selalu berubah. Donald P.Warwick mengatakan bahwa dalam tahap implementasi program terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu faktor pendorong (*Facilitating conditions*), dan faktor penghambat (*Impending conditions*). Pengertian dan unsur unsur pokok dalam proses implementasi sebagai berikut :

1) Proses implementasi program ialah rangkaian kegiatan tindak lanjut yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah langkah yang strategis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijaksanaan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran yang ditetapkan semula.

2) Proses implementasi dalam kenyataanya yang sesunguhnya dapat berhasil, kurang berhasil ataupun gagal sama sekali ditinjau dari hasil yang dicapai "*outcomes*" serta unsur yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung atau menghambat sasaran program.

3) Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat empat unsur yang penting dan mutlak yaitu :

a) Implementasi program atau kebijaksanaan tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa. Oleh karena itu faktor lingkungan (fisik, sosial budaya dan politik) akan mempengaruhi proses implementasi program pada umumnya.

b) Target group yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat program tersebut.

c) Adanya program yang dilaksanakan.

d) Unsur pelaksanaan atau implementer, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawaasan implementasi tersebut.

Mengacu pada beberapa penjelasan mengenai implementasi di atas, peneliti menemukan suatu kesimpulan bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu program, baik di lingkungan pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat yang hasilnya dapat di lihat dari perbandingan pencapaian target dengan tujuan awal, sehingga dalam implementasi ini sangat dimungkinkan banyak hal yang sifatnya teknis sebagai upaya dari pencapaian tujuan tersebut. Jadi maksudnya untuk melihat keberhasilan dari suatu implementasi program, maka lihatlah pelaksanaan program tersebut secara komprehensif dan menyeluruh. Bagaimana manajemennya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran.

Browne dan Wildavsky, mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. (Nurdin, Syafruddin dan Usman, Basyiruddin. 2003.). Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumya. Keberhasilan suatu program kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan yang

akan mempengaruhi implementasi dari program tersebut. Konsep yang mengarah pada efektivitas implementasi program atau kebijakan adalah pencapaian sasaran-sasaran program kebijakan yang dikemukakan dalam teori Implementasi oleh George Edwards III (George C (edited), *et al.*1990 : hal 149-154).

Secara konseptual Edwards III mengemukakan bahwa : *"Policy implementation,…….is the stage of policy making between the establishment of a policy …..and the consequences of the policy for people whom is affects."* Rumusan tersebut mengandung arti bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari suatu program yang ditujukan untuk mencapai tujuan dari kebijakan.(George C Edwards III 1980 : hal 1). Terkait dengan konsep tersebut, Edwads III mengemukakan model implementasi kebijakan yang kemudian dikenal dengan sebutan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Menurut Edwards III ada empat faktor (*four critical factors*) yang sangat menentukan efektivitas implementasi suatu kebijakan publik, antara lain : (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Sikap Pelaksana /Disposisi dan (4) Struktur Birokrasi.(George C Edwards III, 1980 : hal 10)

Memilih model implementasi program atau kebijakan yang dikembangkan oleh Edwards III (1980) didasarkan pada pertimbangan bahwa esensi teori yang dikembangkan Edward III dinilai cukup relevan dengan konteks masalah yang akan diteliti. Peneliti telah menjelaskan di atas mengenai teori implementasi dan analisis implementasi program yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan suatu program.

Implementasi program tidak hanya berkaitan dengan mekanisme operasional kebijakan ke dalam prosedur-prosedur birokrasi melainkan juga terkait dengan masalah konflik keputusan. Untuk mencermati proses implementasi program, terlebih dahulu perlu dipahami beberapa konsep tentang implementasi kebijakan.

Menurut Wahab dirumuskan sebagai berikut : Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan atau biasanya dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Peraturan Eksekutif, atau Dekrit Presiden . (Putra, Fadillah.2001 : hal 81).

Implementasi program pada program TMMD juga berkaitan dengan implementasi kebijakan, dimana program TMMD merupakan wujud dari kebijakan pimpinan TNI dalam rangka membantu rakyat guna mengatasi permasalahan dan membuat rakyat menjadi berdaya dalam rangka mewujudkan pemberdayaan wilayah pertahanan. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa implementasi program sebagai proses pelaksanaan kebijakan yang diterjemahkan dari perundang-undangan, peraturan peradilan, dan Keputusan Presiden. Di sisi lain, implementasi program perlu dilakukan secara arif, bersifat situasional, mengacu pada semangat kompetisi dan berwawasan pemberdayaan.

Kaitanya teori implementasi yang sudah diuraikan sebelumnya maka peneliti menggunakan teori implementasi untuk digunakan sebagai bahan analisis pembahasan pada penulisan implementasi program TMMD dalam mewujudkan pemberdayaan wilayah pertahanan. Namun sebagai teori utama dalam menganalisis hasil penelitian maka penulis menggunakan teori Edward III tentang teori implementasi kebijakan yaitu : **(1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Sikap Pelaksana/Disposisi dan (4) Struktur Birokrasi.**

2.1.1.1 **Komunikasi**

Mengacu pada pandangan Edwards III di atas, dapat dikemukakan bahwa faktor komunikasi merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan, bahwa implementasi kebijakan baru akan terjadi apabila para pembuat keputusan (*decision makers*) sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Para pembuat keputusan akan memahami terhadap apa yang akan dikerjakan

manakala komunikasi berlangsung dengan baik. Kecuali itu, kebijakan yang akan dikomunikasikan harus berlangsung secara tepat, akurat dan konsisten.

Tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan faktor komunikasi dalam konteks implementasi kebijakan, yaitu ; (1) transmisi, yakni penyaluran komunikasi dalam implementasi kebijakan. Dalam konteks ini dapat dikemukakan bahwa penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. (2) kejelasan, dalam arti bahwa komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan, (3) konsistensi, artinya perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk diterapkan.

Namun demikian, harus dipahami bahwa dalam konteks implementasi program TMMD, faktor komunikasi senantiasa akan menghadapi sejumlah kendala (*constrain*) atau hambatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sejumlah hambatan terkait dengan faktor komunikasi, antara lain “hambatan kemampuan, saat komunikasi kurang mampu menangkap dan menafsirkan pesan komunikasi, sehingga dipersepsi serta dilakukan salah.”(Hasibuan, 1996 : hal 1999)

2.1.1.2 **Sumber daya**

Pencapaian sasaran kebijakan juga tidak terlepas dari faktor sumber daya. Pada posisi ini, sumber daya merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dari implementasi kebijakan. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa “sumber daya memiliki peranan yang sangat besar dalam mengimplementasikan suatu kebijakan”. (Suharto. Edi, 2005: hal : 73). Kemudian dalam perspektif organisasi, dikemukakan bahwa : “Sumber daya organisasi mencakup (1) modal yang berupa uang, dan (2) material atau bahan baku, informasi, mesin-mesin, peralatan, perlengkapan,

gedung, kantor, waktu dan personel." (Sugandha, 1991: hal 49) Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa modal dipandang sebagai faktor yang sangat strategis dalam mendukung operasionalisasi organisasi.

Pandangan di atas mencerminkan bahwa faktor sumber daya dalam konteks organisasi secara operasional mencakup berbagai hal yang dibutuhkan oleh organisasi yang bersangkutan, baik berupa uang, material, informasi, peralatan dan sebagainya. Semua faktor sumber daya tersebut secara esensial dipandang penting dalam mendukung operasionalisasi kegiatan organisasi sebagai pengejawantahan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Sementara terkait dengan pentingnya sumber daya manusia dalam organisasi disampaikan bahwa : "sumber daya manusia merupakan kunci dalam suatu organisasi. Tanpa kehadiran sumber daya manusia, mustahil suatu organisasi dapat digerakkan". (Hasibuan, 1996 : hal 176)

2.1.1.3 **Sikap Pelaksana/ Disposisi**

Hal penting lainnya yang menjadi sorotan Edwards III adalah faktor disposisi atau sikap perilaku dari pelaksana kebijakan. Manakala implementasi kebijakan ingin berjalan dengan efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dikerjakan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Yang harus diperhatikan untuk memahami faktor disposisi ini, antara lain: (1) *pengangkatan birokrat*, dilaksanakan berdasarkan kompetensi dan dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, (2) *intensif*, yakni menambah keuntungan atau penghasilan bagi para pelaksana kebijakan.

Sikap atau disposisi merupakan "faktor budaya yang dimiliki oleh seorang birokrat yang diposisikan sebagai energi sosial untuk menggerakkan seorang implementor".(Tachjan, 2006: hal 83) Hal tersebut mengandung makna bahwa sikap aparat mencerminkan komitmen dan perilaku dari seorang aparat dalam menerjemahkan suatu kebijakan.

2.1.1.4 **Struktur Birokrasi**

Faktor yang keempat yang dipandang ikut andil dalam mempengaruhi implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Fungsi struktur dalam sebuah organisasi adalah memberikan informasi kepada seluruh manusia yang menjadi anggotanya untuk mengetahui kegiatan atau pekerjaan yang harus ia kerjakan, berkonsultasi, atau bertanggung jawab kepada siapa, sehingga proses kerja sama menuju pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.(Wicaksono, 2006: hal 75)

Pandangan di atas mencerminkan bahwa keberadaan struktur dalam sebuah organisasi memberikan kejelasan kepada semua anggota organisasi tentang apa yang harus mereka kerjakan, sehingga membantu dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Senada dengan argumentasi tersebut, lebih lanjut mengemukakan bahwa struktur dalam sebuah organisasi memberikan kegunaan terhadap kejelasan tanggung jawab, kejelasan kedudukan, kejelasan uraian tugas dan kejelasan jalur hubungan.(Wicaksono, 2006: hal 76).

Merujuk pada pendapat di atas, maka dapat dipahami apabila struktur organisasi selayaknya mampu memberikan penguatan terhadap kelancaran pelaksanaan suatu kebijakan. Sehubungan dengan hal tersebut, Edwards III mengemukakan dua karasteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi dalam konteks pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu : (1) melaksanakan *standard operating procedures,* (2) *fragmentasi*, yaitu upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktivitas pegawai di beberapa unit kerja.(George C III, 1980 : hal 125)

2.1.2 **Program**

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana, dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan dan sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk diopersionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan oleh Korten bahwa *"A programme is collection of interrelated project designed to harmonize and integrated various action an activities for achieving averral policy abjectives"* atau suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integratif untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan. Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa program tindakan yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik, jadi dalam menentukan suatu program harus dirumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai tujuan melalui partisipasi dari pelaksana programnya. (Korten,David C, dan Syahrir,(ED).2008:hal 232)

Kemudian terdapat tiga aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu:

1) Pengorganisasian Struktur oganisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

2) Interpretasi para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

3) Penerapan atau Aplikasi Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.(Korten,David C, dan Syahrir,(ED),2008:hal 101-102)

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disentesiskan bahwa implementasi program adalah langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri. Korten menyebutkan implemetasi program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan.

2.1.3 Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Pada dasarnya pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelengaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional.

Pengembangan dan pembangunan desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan umum pembangunan pemerintah kabupaten/ Kota, Provinsi dan nasional yang telah dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Karena otonomi desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang dihasilkan dari interaksi antar individu dalam masyarakat dalam kenyataannya pasti akan timbul keanekaragaman dari penataan desa, tata kehidupan, maupun tatanan pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh keanekaragaman asal usul dan istiadat masyarakat.

Adisasmita membatasi arti dari pembangunan masyarakat pedesaan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di mana mereka mengidentifikasikan kebutuhan dan masalahnya secara bersama dan meliputi Berdimensi jamak dalam hal ini artinya membahas komponen-komponen ekonomi maupun non ekonomi. Berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah pembangunan pedesaan. ada dua sisi pandang untuk menelaah pedesaan, yaitu:

a) Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.

b) Sisi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan pedesaan. (Adisasmita,Rahardjo,2013:hal 64).

Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai kini, masih belum beranjak dari profil lama, yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa masih dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya.

Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Bogor. Jika tidak, maka jurang pemisah antara

kota dan desa akan semakin tinggi terutama dalam hal perekonomian. Adapun sasaran pokok pembangunan pedesaan adalah terciptanya kondisi ekonomi rakyat di pedesaan yang kukuh, dan mampu tumbuh secara mandiri. Sasaran pembangunan pedesaan tersebut diupayakan secara bertahap dengan langkah:

a) Peningkatan kualitas tenaga kerja di pedesaan;
b) Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah desa;
c) Penguatan lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat desa;
d) Pengembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa;
e) Pengembangan sarana dan prasarana pedesaan;
f) Pemantapan keterpaduan pembangunan desa berwawasan lingkungan.

Pembangunan Masyarakat Desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik (raga), *intelegensia* (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi pencapaian objektif dan target pembangunan desa pada dasarnya banyak ditentukan oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai sistem pembangunan desa.

Konsep perencanaan pengembangan desa mencakup lima dimensi sebagai pilar utama yaitu menyangkut tata ruang desa, perekonomian desa, sosial budaya desa, mitigasi bencana, lingkungan hidup. Target pembanguann desa yang objektif adalah pembangunan yang jelas dan nyata sehingga menjadikan masyarakat yang tinggal di pedesaan akan semakin nyaman dan merasa tentram. Program pembangunan desa misalnya adalah pembangunan di bidang sarana dan prasarana desa (Infrastruktur).

Pembangunan dibidang infrastruktur ini dimaksudkan untuk kelancaran segala bentuk aktifitas yang dilakukan oleh desa yang bersangkutan. Pembangunan infrastruktur di desa tersebut harus di dasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga memungkinkan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaanya. Di sisi lain infrastruktur yang di bangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab dalam mengelola dan memelihara setelah proyek tersebut berakhir, dan di dalam membangun infrastruktur desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat sehingga sumber daya yang di milki oleh desa yang terbatas dapat di manfaatkan secara efektif dan efisien.

Alokasi dana Desa (ADD) adalah dukungan dana dari pemerintah daerah yang diberikan melalui ADD dan kemudian peralatan kantor yang sudah cukup lengkap. (Syakrani dan Syahriani,2009:hal 24). Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya di lakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa. Bantuan Langsung ADD di maksudkan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.

Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa. Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Dimana

ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disentesiskan bahwa pembangunan adalah suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa.

2.1.4 Pemberdayaan Masyarakat

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan (*enabling)*, memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian. (Tri Winarni, 1998: hal 75). Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan.

Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian.(Tri Winarni,1998 : hal 76). Akar pemahaman yang diperoleh dalam diskursus ini adalah :

a) Daya dipahami sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat, supaya mereka dapat melakukan sesuatu (pembangunan) secara mandiri.

b) Pemberdayaan merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu mandiri.(Tri Winarni,1998:hal 76).

Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka.(Suparjan dan Hempri, 2003: hal 43). Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek. Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (power) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya obyek menjadi subyek. (Suparjan dan Hempri, 2003 : hal 44).

Sejalan dengan pendapat diatas maka menurut definisinya pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat (Mas'oed, 1990). Keberdayaan masyarakat oleh Sumodiningrat (1997) diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. (Totok. 2015.).

Mengacu pada kutipan pernyataan tersebut, maka istilah pemberdayaan ini dapat juga dipahami sebagai upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh seseorang atau kelompok masyarakat agar mereka dapat memenuhi keinginannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konsep pemberdayaan masyarakat, kebutuhan dan keinginan masyarakat di suatu wilayah harus menjadi prioritas utama.

Terkait dengan kegiatan TMMD, sebagai program yang di selenggarakan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, maka pelaksanaan kegiatan TMMD harus merujuk pada sesuatu yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat di daerah tersebut. Dalam pelaksanaannya kegiatan TMMD pada hakikatnya adalah dalam rangka memberdayakan masyarakat dan desa untuk membantu, membimbing, mengarahkan dan mendorong masyarakat dalam membangun dan memelihara lingkungannya. (Buku Materi Sosialisasi TMMD, 2013: hal 11).

Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek yang sangat penting dalam mensukseskan kegiatan TMMD. Beberapa teori pemberdayaan masyarakat sangat mendukung dalam pembahasan dan penganalisaan penelitian pelaksanaan program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor. Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang lebih banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia barat. Meskipun disadari pula adanya berbagai bias terhadap konsep ini menurut Chambers mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *"people-centered, participatory, empowering, and sustainable"*. (Kartasasmita,Ginandjar.1996:hal 122)

Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat sehingga mampu menolong dirinya sendiri yang menempatkan masyarakat sebagai subyek dari pemberdayaan untuk menghasilkan masyarakat yang memiliki

kesadaran, kekuasaan, dan kemampuan untuk berubah di masa yang akan datang, mengakses sumberdaya, bekerjasama, peduli sesama, mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak, berpartisipasi dalam masyarakat, dan mengembangkan modal sosial di tengah masyarakat secara terus menerus dan tidak berhenti setelah program-program masyarakat tersebut selesai. Berkaitan dengan masalah pemberdayaan masyarakat, Lemhannas menguraikan sifat-sifat ketahanan nasional salah satunya adalah sifat kemandirian. (Lemhanas. 2001). Pengertian dari mandiri ialah percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dan tidak mudah menyerah. Sifat ini merupakan prasyarat untuk menjalin suatu kerjasama. Kerjasama perlu dilandasi oleh sifat kemandirian, bukan semata-mata tergantung oleh pihak lain.

Dalam proses pemberdayaan pun, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena ketidakberdayaan. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya. Pemberdayaan masyarakat juga bukanlah membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian *(charity).* Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan *(input),* serta pembukaan akses kepada berbagai peluang *(opportunities)* yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. (Kartasasmita,Ginandjar.1996:hal 127).

Berkaitan dengan hal di atas maka penelitian tentang Program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor adalah salah satu upaya untuk mempelajari ilmu administrasi pembangunan melalui studi tentang program-

program pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu kebijakan publik yang dilakukan oleh TNI apakah kebijakan tersebut memiliki manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Bagaimana kondisi masyarakat yang telah melaksanakan program apakah mengalami perubahan yang berarti ke arah yang lebih baik kondisi kesejahteraan dan kehidupan sosial, serta kemandirian masyarakatnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disentesiskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu paradigma baru pembangunan yang merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.

2.1.5 **Partisipasi Masyarakat**

Definisi partisipasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yakni *participate*. Kata tersebut memiliki dua pengertian. Pertama, memiliki sejumlah atribut, benda atau kualitas dari seseorang. Kedua, mengambil bagian dalam suatu kegiatan atau membagi sesuatu dalam kebersamaan. Perkembangan partisipasi dapat diukur melalui besar maupun arahnya. Arah tersebut perlu dikendalikan agar tidak kebablasan atau salah arah. Selain itu, perlu adanya pencermatan keberadaan "bibit" partisipasi publik di masing-masing daerah. Kualitas bibit lingkungan yang berpengaruh terhadap partisipasi publik dan lain halnya merupakan satu masalah yang menarik untuk dicermati. Koho (2007:126) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang, yakni: 1). Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan; 2). Partisipasi dalam pelaksanaan; 3). Partisipasi dalam pemanfaatan hasil; 4) Partisipasi dalam evaluasi. Beberapa definisi dari partisipasi masyarakat itu sendiri berdasarkan sudut pandang beberapa ahli antara lain:

a) Keith Davis (1962).

“Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut”.

b) Mubyarto (1997)

Partisipasi adalah tindakan mengambil bagian dalam kegiatan, sedangkan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan di mana masyarakat ikut terlibat mulai dari tahap penyusunan program, perencanaan dan pembangunan, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan.

c) Sulaiman (1985:6)

Partisipasi sosial sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat secara perorangan, kelompok, atau dalam kesatuan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program serta usaha pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial di dalam dan atau di luar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran tanggung jawab sosialnya.

d) Ach. Wazir Ws. (1999:29)

Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

e) Isbandi (2007:27)

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

(Oakley ,1991:hal 9) memberi pemahaman tentang konsep partisipasi, dengan mengelompokkan ke dalam tiga pengertian pokok, yaitu Partisipasi sebagai kontribusi; Partisipasi sebagai organisasi; dan Partisipasi sebagai pemberdayaan. Dengan landasan teori dari Oakley, disusun definisi konseptual variabel Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan langsung masyarakat dalam penanganan masalah yang meliputi kontribusi masyarakat, pengorganisasian masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah. Dari definisi konseptual tersebut diperoleh 3 (tiga) dimensi kajian, yakni Dimensi Kontribusi Masyarakat, Dimensi Pengorganisasian Masyarakat, dan Dimensi Pemberdayaan Masyarakat. Dimensi Kontribusi Masyarakat dijabarkan menjadi indikator-indikator : (1) Kontribusi Pemikiran, (2) Kontribusi Dana, (3) Kontribusi Tenaga, dan (4) Kontribusi Sarana. Dimensi Pengorganisasian Masyarakat dijabarkan menjadi indikator-indikator : (5) Model Pengorganisasian, (6) Struktur Pengorganisasian, (7) Unsur-unsur Pengorganisasian, dan (8) Fungsi Pengorganisasian. Dimensi Pemberdayaan Masyarakat dijabarkan menjadi indikator-indikator : (9) Peran Masyarakat, (10) Aksi Masyarakat, (11) Motivasi Masyarakat, dan (12) Tanggungjawab Masyarakat.

Sherry Arnstein adalah yang pertama kali mendefinisikan strategi partisipasi yang didasarkan pada distribusi kekuasaan antara masyarakat (komunitas) dengan badan pemerintah (agency). Dengan pernyataannya bahwa partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat (citizen

partisipation is citizen power), Arnstein menggunakan metafora tangga partisipasi dimana tiap anak tangga mewakili strategi partisipasi yang berbeda yang didasarkan pada distribusi kekuasaan. Partisipasi menurut Arnstein (Aliadi 1994) adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam perubahan sosial yang memungkinkan mereka mendapatkan bagian keuntungan dari kelompok yang berpengaruh. Selanjutnya Arnstein menyebutkan bahwa terdapat delapan tangga partisipasi (Gambar 2). Tangga pertama disebut manipulasi dan kedua terapi. Kategori manipulasi dan terapi ini bila yang dilakukan dalam bentuk mendidik dan mengobati. Dalam tangga pertama dan kedua ini Arnstein menganggap itu bukan bentuk partisipasi. Tangga ketiga adalah fase penyampaian informasi. Tangga keempat adalah konsultasi dan kelima peredaman kemarahan. Kategori pada tangga ketiga hingga lima ini disebut tingkat tokenisme, yaitu suatu tingkatan peran serta di mana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan.

Menurut Arnstein, jika partisipasi hanya dibatasi pada tingkat tokenisme, maka kecil kemungkinan ada upaya perubahan dalam masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Oleh karena itu, masih ada kategori tangga teratas dalam tingkat kekuasaan di mana rakyat memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Untuk tahap ini, tangga keenam disebut kemitraan. Tangga ketujuh pendelegasian kekuasaan dan kedelapan pengawasan masyarakat adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1. Level Partisipasi menurut Arnstein:
Sumber: Sherry R Arnstein, (1969)

2.1.6 Pemberdayaan Wilayah Pertahanan

Istilah "pemberdayaan wilayah pertahanan" terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pada Pasal 7 b dengan kata "…memberdayakan wilayah pertahanan….". Istilah "pemberdayaan wilayah pertahanan" juga dapat ditemui dalam buku "strategi pertahanan negara" tahun 2007. "pemberdayaan wilayah pertahanan" tidak dapat dilepaskan dari "sistem pertahanan negara" yaitu "sistem pertahanan yang bersifat semesta" yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.(Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015 : hal 28)

Pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan oleh TNI dimaksudkan untuk mewujudkan Ruang juang, Alat juang dan Kondisi juang serta Kemanunggalan TNI-Rakyat guna mendukung kepentingan Pertahanan negara. Kegiatan ini bersifat lintas sektoral, terpadu melibatkan seluruh

komponen bangsa dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kesiapsiagaan satuannya.).(Doktrin Induk Teritorial tahun 2018)

Pemberdayaan Wilayah Pertahanan oleh TNI ini dikemas dalam pola kegiatan yang disebut dengan Bakti TNI. Bakti TNI merupakan Dharma Bakti TNI dengan mendayagunakan kemampuan TNI, bersama-sama instansi pemerintah dan komponen bangsa lainnya dalam tugas membantu pemerintah menangani permasalahan sosial, penanggulangan bencana, pengungsian, bantuan kemanusiaan dan kegiatan dalam rangka mengatasi kesulitan rakyat lainnya. Program Bakti TNI diselenggarakan oleh TNI dalam wujud Karya Bakti TNI dan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). (Petunjuk penyelengaraan Bakti TNI. 2017: hal 16)

Selanjutnya pemberdayaan wilayah pertahanan yang disebut juga dengan istilah Binter (pembinaan teritorial) dilakukan secara terus menerus di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh satuan komando kewilayahan (Kodam, Korem, Kodim, Koramil) bersama Pemerintah daerah setempat dengan mengacu pada produk dasar binter yaitu renbinter (rencana pembinaan teritorial), progbinter (program pembinaan territorial), anpotwil (analisa potensi wilayah dan anpothan (analisa potensi pertahanan).(Doktrin Induk Teritorial tahun 2018).

Pemberdayaan Wilayah Pertahanan mengacu pada visi pertahanan negara, yaitu terwujudnya pertahanan negara yang tangguh serta misi menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, keselamatan bangsa, yang diimplementasikan ke dalam grand strategi pertahanan yang mencakup pemberdayaan wilayah pertahanan dalam menghadapi ancaman, implementasi menajemen pertahanan yang terintegrasi, peningkatan kualitas personel, perwujudan teknologi pertahanan yang mutakhir dan pemantapan kemanunggalan TNI dan rakyat dalam hal bela negara.(Pokok-pokok kebijakan Panglima TNI Tahun 2015: hal 34)

Mengacu pada hal tersebut maka pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan semesta. Pelibatan serta penyiapan secara dini seluruh Warga Negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya dilakukan melalui suatu proses pengelolaan terhadap sumber daya nasional agar dapat diwujudkan menjadi sumber daya pertahanan yang berdaya guna bagi kepentingan pertahanan negara serta pembinaan kekuatan/kemampuan hingga penggunaannya secara efektif dan efisien untuk kepentingan pertahanan negara.

Pemberdayaan wilayah pertahanan bertujuan memberdayakan masyarakat dengan memegang komitmen bersama untuk NKRI, sebagai kekuatan pendukung untuk dapat menangkal setiap ancaman yang datang. Penyiapan kondisi wilayah oleh Pemerintah menjadi suatu wilayah yang mendukung sistem pertahanan negara dilakukan melalui pemberdayaan wilayah pertahanan. Pemahamanan konsep tersebut diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa Pemberdayaan wilayah pertahanan adalah suatu upaya menyiapkan kondisi wilayah untuk mendukung sistem pertahanan negara. Pemberdayaan wilayah tersebut dilakukan dengan memberikan *power* (kekuatan), memberi daya atau kekuasaan kepada wilayah sehingga dapat mendukung sistem pertahanan negara di wilayah tersebut.

Program pemberdayaan wilayah pertahanan darat berskala besar dan kontinyu yang diselenggarakan oleh Satuan Kowil TNI seperti program membangun desa (TMMD) adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan institusi TNI dalam rangka membuka akses pedesaan dengan membangun infrastruktur *(providing the assets)* bekerjasama dengan masyarakat serta sebagai bentuk upaya TNI agar dapat menyatu (manunggal) dengan rakyat. Sebagai salah satu kebijakan publik, program-program tersebut memiliki berbagai macam aspek dan dimensi yang bisa dilihat dari kacamata ketahanan nasional baik yang menyangkut latar belakang program, visi dan

misi, tujuan, strategi sampai kepada manfaat yang akan diterima oleh sasaran dari program-program pemberdayaan masyarakat desa tersebut.

2.1.7 Pengertian TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)

TNI Manunggal Membangun Desa atau yang dikenal dengan nama TMMD adalah Kemanunggalan TNI-Rakyat yaitu menyatunya TNI dan Rakyat. TNI adalah bagian integral dari rakyat dan kekuatan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat apapun latar belakangnya.(Kepala Pusat komunikasi publik Kemhan; //www.beritasatu.com)

Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) pada awalnya dikenal dengan ABRI Masuk Desa (AMD) merupakan program kerjasama lintas sektoral antara TNI, Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Pemerintah Daerah, serta Komponen Bangsa lainnya yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dalam upaya membantu meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah-daerah tertinggal, terisolasi, daerah pinggiran dan terbelakang.

TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) adalah salah satu wujud Operasi Bhakti TNI, yang merupakan program terpadu lintas sektoral antara TNI dengan Pemerintah Daerah serta komponen bangsa lainnya, yang dilaksanakan secara terintegrasi bersama masyarakat, guna meningkatkan akselerasi kegiatan pembangunan di daerah pedesaan, Bersama Rakyat TNI Kuat, kekuatan TNI yang sejatinya adalah pada rakyat karena adanya TNI karena Rakyat, rakyat sejahterah,TNI akan kuat tentunya Negara kuat.

Payung hukum dalam program TMMD ini antara lain Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 tahun 2004, Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Surat Menteri Dalam Negeri RI tentang Pedoman Penyususan Anggaran APBD untuk

Program TMMD. Personil-personil yang dilibatkan dalam program TMMD ini tidak tanggung- tanggung yakni melibatkan 33 Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang secara terpadu memasukkan acuan program masing-masing instansi ke dalam program kegiatan fisik atau non fisik TMMD tersebut.

TMMD yang dilaksanakan oleh TNI adalah program yang bernilai strategis. Program tersebut merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dilakukan Pemerintah melalui TNI. Program TMMD yang merupakan bagian dari pemberdayaan wilayah pertahanan itu meliputi kegiatan program-program pemerintah dalam pelibatan masyarakat adalah dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat. Di desa/kelurahan, kegiatan tersebut dikelola oleh lembaga keswadayaan masyarakat dibantu oleh tim-tim khusus yang dibentuk sesuai kebutuhan melalui musyawarah masyarakat desa/kelurahan. Lembaga keswadayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dan ditetapkan oleh masyarakat di setiap desa/kelurahan, yang berfungsi secara kolektif dan berpartisipasi terhadap pengelolaan kegiatan TMMD di desa/kelurahan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat melalui musyawarah desa/kelurahan.

TMMD tidak hanya sekedar program TNI untuk dapat lebih dekat dan mengenal rakyat, namun lebih dari itu merupakan wujud pelaksanaan dari 8 Wajib TNI yaitu “tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat serta membantu mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya”. Oleh karena itulah maka Program TMMD dapat memperbaiki dan meningkatkan citra TNI di mata rakyat yang berarti persepsi positif masyarakat terhadap TNI pun akan semakin meningkat yang pada akhirnya integrasi dan sinergi atau kemanunggalan TNI dengan rakyat akan semakin kuat dan tangguh. Terwujudnya sinergi atau kemanunggalan TNI-Rakyat ini akan menjadikan elemen kunci bagi suksesnya pembinaan teritorial dan pemberdayaan

masyarakat dalam peningkatan ketahanan wilayah (Purwatiningsih, Eny:130 - 138).

Selain tingkat partisipasi masyarakat, tercapainya sasaran program TMMD juga merupakan hal yang penting. Sasaran program TMMD meliputi sasaran fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana seperti infrastruktur jalan, jembatan, fasum, fasos, mengatasi dampak bencana alam, banjir, pengentasan kemiskinan dan lain-lain. Sasaran non fisik meliputi penyuluhan dan penerangan tentang bela negara, semangat nasonalisme dan wawasan kebangsaan serta membantu pemerintah dalam hal peningkatan kesehatan dan keluarga berencana dan lain-lain. Di lihat dari manfaatnya maka sasaran fisik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Sedangkan sasaran non fisik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mental dan kejuangan masyarakat sebagai warganegara yang memiliki hak dan kewajiban bela negara.

Seberapa besar manfaatnya hasil sasaran fisik dan non fisik program TMMD bagi masyarakat dan TNI juga merupakan hal yang penting dalam program TMMD. Untuk mendapat kemanfaatan yang besar bagi masyarakat maka sasaran fisik dan non fisik harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu sebelum dimulainya pelaksanaan TMMD, maka dilaksanakan survei ke desa yang akan menjadi lokasi pelaksanaan TMMD untuk mendapatkan saran masukan dari rakyat. Hal ini telah menjadi ketentuan yang ditetapkan dalam mekanisme penentuan sasaran fisik dan non fisik program TMMD sebagaimana tertera dalam buku pedoman pelaksanaan program TMMD tahun 2017 yang di keluarkan oleh Staf Teritorial Mabes TNI-AD.

TMMD diselenggarakan oleh TNI dengan mempertimbangkan kemampuan satuan Komando kewilayahan sebagai Satuan Tugas (Satgas) pelaksana. (Petunjuk penyelengaraan Bakti TNI. 2017: hal 16). Ini berarti bahwa sasaran TMMD baik fisik maupun non fisik dalam kontek sumberdaya

yang meliputi anggaran, sarana prasarana, alat peralatan dan kemampuan harus berada dalam batas kemampuan satuan komando kewilayahan dalam penyelesaiannya. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan sasaran fisik dan non fisik yang akan dilaksanakan dalam TMMD. Jangan sampai sasaran fisik dan non fisik yang telah ditetapkan tidak dapat diselesaikan karena di luar kemampuan satuan komando kewilayahan selaku Satgas pelaksana TMMD. Hal ini dimungkinkan terjadi mengingat kemampuan satkowil juga terbatas terutama dalam konteks sumberdaya tersebut.

Berbicara tentang kemampuan, berarti berbicara tentang sumber daya baik berupa SDM (sumber daya manusia), sarana dan prasarana pendukung (alat peralatan) maupun anggaran. Karena TMMD merupakan program terpadu dengan prinsip sinergitas antara TNI-Pemda dan masyarakat, maka sarana dan prasana pendukung menggunakan alat peralatan TNI, Pemda dan masyarakat sesuai kondisi wilayah setempat dan jenis pekerjaan. SDM juga melibatkan personil TNI, Pemda dan masyarakat dipilih sesuai keahlian yang dibutuhkan berdasarkan jenis pekerjaan. Anggaran program TMMD menggunakan anggaran dari TNI dan Pemda, baik Pemda Kabupaten/Kota maupun Pemda Provinsi.

2.2 **Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Hasil dari mempelajari penelitian terdahulu berupa *literature* dalam terbitan-terbitan (publikasi) yang relevan dengan topik atau masalah penelitian yang akan diteliti dan sudah pernah dilakukan. Pada umumnya penelitian yang telah dilakukan membahas sejauhmana hubungan implementasi TMMD dengan pembangunan, efektifitas kemanunggalan TNI-Rakyat dan penilaian terhadapan kelayakan, efektivitas dan manfaat program TMMD bagi masyarakat. Sehingga penelitian yang akan dilaksanakan dengan topik, ‘Implementasi Program TMMD dalam Mendukung

Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor periode 2014-2018', merupakan tema baru. Dengan demikian dalam peninjauan kepustakaan (*literature review*) dari penelitian yang telah lalu, peneliti tidak dapat membahas secara kritis, namun peneliti tetap memanfaatkannya dalam mengambil beberapa sub topik dari *literature* yang dianggap masih *relevan* dan *up to date*.

2.2.1 Penelitian yang dilakukan oleh Mala Dalini (2012) dalam tesis yang berjudul "Peran TNI Dalam Pembangunan Daerah" (Studi Kasus TNI Manunggal Membangun Desa Ke 84 Desa Tanjung Baringin-Sigading, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas), menyatakan pembangunan adalah suatu usaha dalam mewujudkan perubahan. Siapapun dapat berperan dalam melakukan pembangungan, tidak terkecuali TNI. TNI sebagai alat pertahanan negara ternyata memiliki tugas dalam membantu pemerintah daerah sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004. Dalam menjalankan fungsi sosialnya TNI melakukan kegiatan-kegiatan yang salah satunya adalah TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang berperan dalam meningkatkan akselerasi pembangunan di desa tertinggal dan terisolir. Desa Tanjung Baringin dan Sigading adalah salah satu dari desa terpencil yang ada di wilayah Kodim 0212/TS. Maka untuk membantu pemerintah daerah Padang Lawas dalam pembangunan, Kodim 0212/TS menyelenggarakan kegiatan TMMD ke 84 di Desa Tanjung Baringin-Sigading, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana peran TNI dalam pembangunan di wilayah Kodim 0212/TS, kebijakan TMMD dalam meningkatkan akselerasi pembangunan di Desa Tanjung Baringin - Sigading, serta tanggapan dan partisipasi dari masyarakat dan pemerintah daerah Padang Lawas terhadap pelaksanaan TMMD.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisa data kualitatif. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci yaitu Kapten Inf B. Hutabarat selaku Pasiter saat ini dan Kapten Inf E. Purba, Pasiter pada pelaksanaan TMMD. Informan utama yaitu Kepala Desa Tanjung Baringin dan Sigading, Kasi jalan dan jembatan Kimprasda, Kabid Fisik Bappeda, Sekda Padang Lawas dan masyarakat Tanjung Baringin dan Sigading 15 orang.

Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa TNI berperan dalam membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah di wilayah Kodim 0212/TS. Salah satu dari peran TNI itu adalah melalui kegiatan TMMD yang dilaksanakan di Desa Tanjung Baringin-Sigading dimana dalam pelaksanaannya berhasil membuka keterisoliran kedua desa dengan pelebaran jalan dan perbaikan jembatan sehingga berdampak pada peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial ke dua desa tersebut. Selama pelaksanaan TMMD tidak ditemui kendala yang berarti, oleh sebab itu masyarakat sangat berterimah kasih begitu juga dengan pemda Padang Lawas. Namun setelah hampir setahun pelaksaan TMMD belum ada tindak lanjut yang berarti dari Pemda, karena asset hasil TMMD diserahkan ke Pemda. Oleh sebab itu pemerintah Padang Lawas harus segera melanjutkan pembangunan agar hasil dari TMMD tidak sia-sia.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor adalah pada sub fokus penelitian yaitu menganalisis proses mekanisme penentuan sasaran fisik dan non fisik dan menganalisis implementasi program TMMD dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah Kodim 0621/Kabupaten Bogor.

2.2.2 Penelitian yang dilakukan oleh Dedy Rahmanto (2013) dalam tesis **,** Mahasiswa Pascasarjana Universitas Pertahanan, berjudul Hubungan

Implementasi TMMD dengan efektifitas kemanunggalan TNI dan rakyat di wilayah Kodim 0508/Depok dari Kajian Pertahanan dan Strategis Prodi Manajemen Pertahanan. Menggunakan metode kuantitatif dengan alasan untuk menjaring fakta, data dan informasi dalam bentuk angka yang bervariasi dalam unit populasi yang lebih luas dengan menggunakan teori kerjasama dan efektifitas dalam analisis pembahasanya.

Kesimpulan hasil penelitian adalah pertama : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara implementasi kebijakan TMMD dengan efektifitas kemanunggalan TNI-Rakyat. Kedua : Penelitian yang dilaksanakan di daerah perkotaan yang aman dan kondusif sehingga hasil yang dicapai akan sangat berbeda apabila penelitian di daerah rawan konflik seperti konflik sosial, konflik komunal maupun konflik sparatis. Ketiga : Kerja sama lintas sektoral belum terjalin dengan baik terutama pada tahap perencanaan berkaitan dengan penyusunan sasaran program TMMD. Keempat : Kepercayaan dan komunikasi antara TNI dengan komponen bangsa lainya yang tergabung dalam Satgas TMMD belum maksimal terutama respon dan antusias masyarakat. Saran dalam penulisan ini paling menonjol adalah berkaitan dengan dimensi efektifitas kemanunggalan TNI dan Rakyat perlu perhatian pada dimensi kesadaran berbangsa dan bernegara yang hasilnya berada di bawah rata-rata.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor adalah pada sub fokus penelitian yaitu menganalisis proses mekanisme penentuan sasaran fisik dan non fisik dan menganalisis implementasi program TMMD dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah Kodim 0621/Kabupaten Bogor.

2.2.3 Penelitian yang di lakukan oleh Dwi Jati Utomo (2013) dalam tesis, dengan penelitian Implementasi Kebijakan TMMD dalam Mendukung Tugas Pokok TNI di Kodim 0619/Purwakarta. Dari Program Studi Strategi dan

Kampanye Militer, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan menggunakan teori kebijakan publik dan teori partisipasi dalam pembahasanya.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, **Pertama** : TMMD merupakan program terpadu dan lintas sektoral yang melibatkan TNI, Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian dan Pemerintah Daerah serta segenap lapisan masyarakat. Implementasi kebijakan TMMD masih layak dan tetap dipertahankan, karena sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pelaksanaannya cukup efisien dan efektif. **Kedua** : Regulasi TMMD selama ini belum cukup kuat dan cenderung multi tafsir serta tidak mengikat pemerintah daerah. Dalam implementasi kebijakan pelaksanaan TMMD ke-88 tahun 2012 yang dilaksanakan di Desa Pasanggrahan, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta dilakukan meliputi kegiatan fisik dan non fisik. **Ketiga** : Hasil yang dicapai dalam kegiatan TMMD ke-88 ini adalah dibangunnya fasilitas jalan, perbaikan gedung dan fasilitas lainnya sehingga mampu mewadahi ruang bagi masyarakat sekitar, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI dan instansi pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan terutama dalam organisasi pelaksana TMMD belum mencerminkan sinergitas lintas SKPD dan seolah-olah hanya merupakan urusan TNI saja.

Saran yang disampaikan hal yang paling menonjol adalah Kemendagri perlu merumuskan bersama dengan institusi TNI dan sektor lainnya ketentuan peraturan perundang-undangan (dapat dalam bentuk PP) yang mengatur secara teknis pelaksanaan TMMD dan beban penganggarannya baik yang bersumber dari APBN atau dari APBD agar tidak terjadi duplikasi anggaran atau penyalahgunaan kewenangan. Permasalahan anggaran TMMD tersebut juga ada disinggung oleh peneliti dalam permasalahan yang muncul dalam pasal 1 latar belakang, namun tidak menjadi fokus penelitian.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor adalah pada sub fokus penelitian yaitu menganalisis proses mekanisme penentuan sasaran fisik dan non fisik dan menganalisis implementasi program TMMD dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah Kodim 0621/Kabupaten Bogor.

Tabel 2.1 Rangkuman Hasil penelitian terdahulu yang relevan

NO	NAMA	JUDUL	METODE	TEORI/KONSEP	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Mala Dalini** (2012) . dalam tesis	Peran TNI Dalam Pem-bangunan Daerah (Studi Kasus TNI Manunggal Membangun Desa Ke 84 Desa Tanjung Baringin-Sigading, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas),	Kualitatif	- Teori Peran; - Teori Partisipasi; - Teori Sinergitas; - Membahas peran TNI dalam pembangunan di wilayah Kodim 0212/TS, kebijakan TMMD dalam mening-katkan akselerasi pembangunan di Desa Tanjung Baringin – Siga-ding.		Menggunakan teori sinergitas Membahas masalah pelaksanaan TMMD	
2	**Dedy Rahmanto (2013),** dalam tesis Mahasiswa Pascasarjana Universitas Pertahanan	Hubungan Implementasi TMMD dengan efektifitas kemanunggalan TNI dan rakyat di wilayah Kodim 0508/Depok	Kuantitatif	teori kerjasama dan efektifitas	Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara implementasi kebijakan TMMD dengan efektifitas kemanunggalan TNI-Rakyat. - Kerja sama lintas sektoral belum terjalin dengan baik terutama pada tahap perencanaan berkaitan dengan penyusunan sasaran program TMMD; - Kepercayaan dan komunikasi antara TNI de-	- Menggunakan Teori Kerjasama; - Membahas tentang pelaksanaan TMMD.	pembahasan Fokus pada implementasi TMMD Dalam pemberdayaan wilayah pertahanan hanya fokus terhadap hubungan kerjasama dengan efektifitas pelaksanaan program TMMD mewujudkan ketahanan wilayah

					ngan komponen bangsa lainya belum maksimal.		
3	**Dwi Jati Utomo** (2013). Dalam tesis	Implementasi Kebijakan TMMD dalam Mendukung Tugas Pokok TNI di Kodim 0619/Purwakarta	Metode kualitatif	- Teori kebija-kan Publik; - Teori partisipasi.	- TMMD merupakan program terpadu dan lintas sektoral yang melibatkan TNI; - Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian dan Pemerintah Daerah serta segenap lapisan masyarakat; - Implementasi kebijakan TMMD masih layak dan tetap dipertahankan, karena sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; - Regulasi TMMD selama ini belum cukup kuat dan cenderung multi tafsir serta tidak mengikat pemerintah daerah.	Sama-sama membahas implementasi program TMMD.	Penulis fokus proses mekanisme penentuan sasaran fisik dan non fisik dan menganalisis implementasi program TMMD dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dari adanya proses pelaksanaan program TMMD di wilayah Kabupaten Bogor pada tahun 2014-2018, dokumen laporan dan rencana menunjukkan adanya data tentang aspek partisipasi masyarakat menurun pada tahun 2014 dan 2016, sehingga dalam implementasi ini sangat dimungkinkan banyak hal yang sifatnya teknis terjadi permasalahan-permasalahan terutama aspek partisipasi dan pelibatan masyarakat serta penentuan sasaran fisik dan nonfisik. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan program TMMD, mengingat program TMMD adalah program berbasis pemberdayaan masyarakat, dimana partisipasi masyarakat merupakan hal yang mutlak.

Dalam pelaksanaan TMMD periode tahun 2014-2016 di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor menurut pengamatan peneliti ada indikasi tidak sesuai dengan perencanaan dimana aspirasi dan kepentingan masyarakat tidak terwadahi dengan baik atau diabaikan sehingga masyarakat enggan berpartisipasi. Hal ini sering terjadi dalam penentuan sasaran fisik dan non fisik yang tidak sesuai dengan aspirasi serta kepentingan masyarakat. Penentuan sasaran fisik dan non fisik pada kegiatan penyelenggaraan TMMD seolah-olah tidak melibatkan masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi program TMMD diwilayah Kodim 0621/Kab Bogor maka perlu dilakukan analisis secara mendalam yang mencakup 4 variabel penting dan mutlak yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi program menggunakan teori Edward III tentang teori implementasi yaitu : **(1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Sikap Palaksana/Disposisi dan (4) Struktur Birokrasi.**

Dengan alasan tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan model teori **implementasi program George Edward III** yang disebut dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Teori tersebut menyebutkan bahwa implementasi program dipengaruhi oleh 4 variabel sebagaimana yang disebutkan diatas. Dari proses implementasi program melalui empat indikator tersebut dapat

diketahui apa saja faktor hambatan dan faktor pendorong dalam implementasi program TMMD. Implementasi program TMMD dapat berhasil, kurang berhasil ataupun gagal. Hal ini dapat diketahui dari *out come* nya.

Dari penjelasan diatas dapat digambarkan kerangka berpikir sebagai berikut:

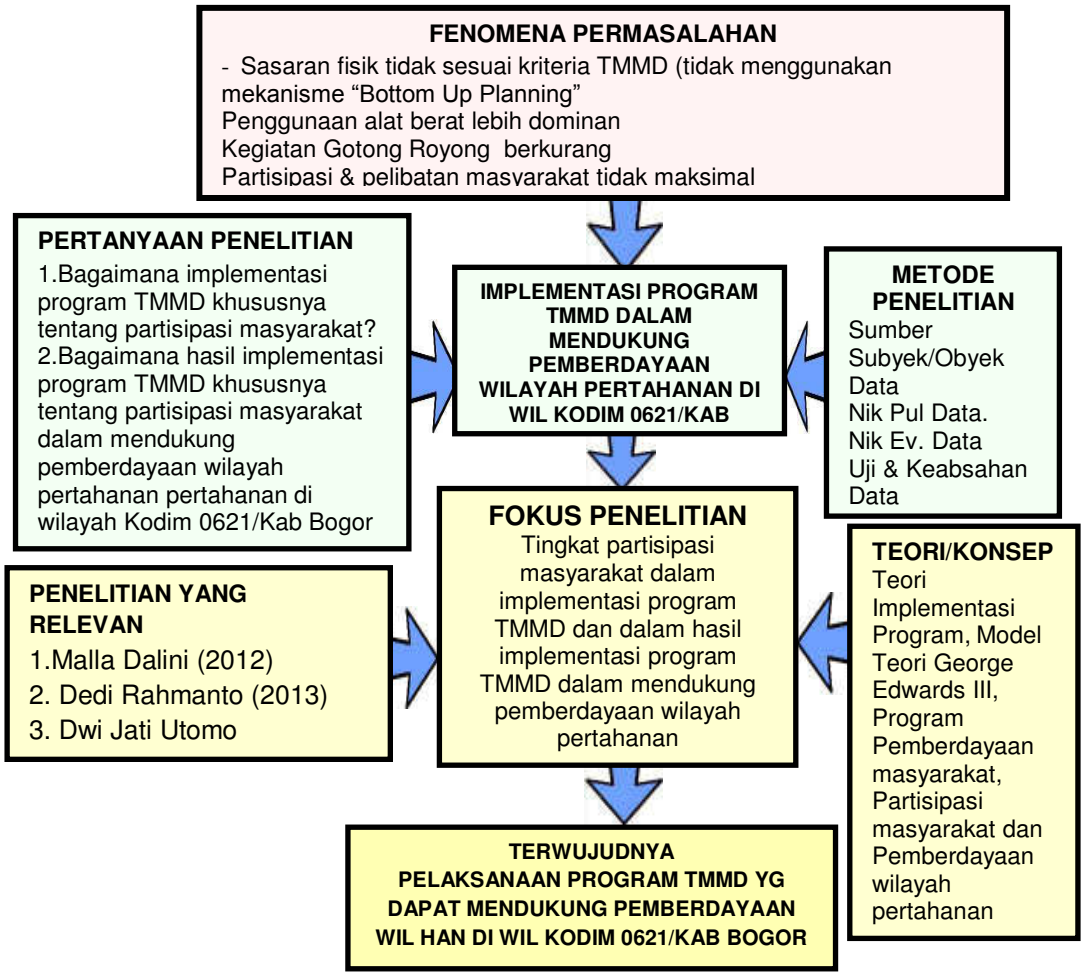

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir
Sumber : Data dari Peneliti 2019

BAB 3
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode dan Desain Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan, menyusun serta menganalisis data sehingga diperoleh makna yang sebenarnya. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Penelitian ini akan menggunakan desain penelitian dengan metoda kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, tekhnik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat indukti/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.(Sugiyono, 2016: hal 9).

Penelitian implementasi program TMMD dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan diwilayah Kodim 0621/Kab Bogor periode 2014-2018 menggunakan desain penelitian dengan metode kualitatif deskriptip. Tahapan-tahapan dalam desain penelitian terdiri mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi faktor-faktor penting, mencari kemungkinan solusi dalam pemecahan masalah.

Penelitian ini akan meneliti manajemen penyelenggaraan program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor periode 2014-2018. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi periodeisasi pelaksanaan program TMMD antara tahun 2014-2018, agar penelitian lebih fokus dan data-data yang diperoleh lebih akurat dan *up to date*, sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menentukan metode (desain) penelitian, sumber data dan lokasi penelitian, jenis data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan

data, metode analisa data. Metode penelitian kualitatif secara sistematis melihat lingkungan, merumuskan masalah, mengumpulkan data tentang tema/topik terkait, menganalisis fakta, menarik kesimpulan tentang cara memecahkan masalah dan memberikan rekomendasi. Penelitian kualitatif berfokus kepada latar belakang dan alasan data tersebut muncul. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi alamiah), sumber data primer, dan tekhnik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi. (Sugiyono, 2016 : hal 225).

Metode deskriptif merupakan penelitian yang memberikan uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti. Penelitian deskriptif menggunakan survey untuk mengumpulkan data, survey dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk selanjutnya dijadikan sebagai contoh (*sample*). Informasi didapat dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang sudah disiapkan, baik kepada perorangan maupun kelompok.(Ronny Kaountur, 2009, hal 79)

Penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoritis yang membentuk atau mempengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia. Untuk mempelajari permasalahan ini, para peneliti kualitatif menggunakan pendekatan kualitatif mutakhir dalam penelitian, pengumpulan data dalam lingkungan alamiah yang peka terhadap masyarakat dan tempat penelitian, analisa data yang bersifat induktif maupun deduktif dan pembentukan berbagai pola atau tema. Laporan atau presentasi tertulis akhir mencakup berbagai suara dari para partisipan/responden/narasumber, refleksivitas dari peneliti, deskripsi dan interpretasi tentang masalah penelitian dan kontribusinya pada literature atau seruan bagi perubahan. (Creswell, 2014; hal 59)

Menurut Creswell (1998), pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.(Creswell,1998;hal 15)

Dalam penelitian terhadap implementasi program TMMD ini, data diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan program TMMD dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor, menggunakan tekhnik pengumpulan data yang bermacam-macam (trianggulasi) dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus akan mengakibatkan variasi data yang tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, sehingga tekhnik analisa data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data-data yang dibutuhkan, didapatkan salah satunya melalui wawancara yang merupakan proses tanya jawab dengan pihak-pihak yang kredibel dan memiliki kompetensi untuk mendapatkan informasi ataupun keterangan yang dibutuhkan.(Abu Achmadi dan Nabuko Cholid, (2013), Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, Hlm 83). Selain itu, apabila terjadi kendala dan informannya berkenan, wawancara dilakukan tatap muka dengan memanfaatkan sarana komunikasi berupa internet maupun telepon.(Abu Achmadi dan Nabuko Cholid, (2013), Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, Hlm 83).

Melalui wawancara, peneliti mengharapkan dapat mengumpulkan data-data yang terkait implementasi program TMMD. Adapun narasumber yang dipilih untuk diwawancarai adalah individu-individu yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang terkait dengan implementasi program TMMD dan informan yang terlibat dan berperan dalam menyusun

kebijakan program TMMD baik di tingkat pusat maupun di daerah / lapangan.

Di samping melaksanakan wawancara, untuk mendapatkan data primer mengenai implementasi Program TMMD, penelitian juga dilakukan terhadap literatur atau sumber-sumber kepustakaan sebagai data sekunder. Kegunaan data sekunder untuk melengkapi dan sebagai pembanding data-data primer. Oleh karenanya tidak jarang penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder. Hal ini memberikan perspektif yang berbeda dibandingkan data primer. Data sekunder diharapkan didapatkan dari buku, peraturan perundangan, doktrin, makalah seminar, konferensi, lokakarya dan lain sebagainya. Hal demikan sangat berguna bagi peneliti untuk mendapatkan landasan teori dari penelitian yang berlangsung.

Data yang diperoleh selanjutnya dilakukan proses analisa data. Melakukan analisis data adalah pekerjaan yang sulit dan memerlukan kesungguhan serta kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisir data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Desain penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Pola desain penelitian dalam setiap disiplin ilmu memiliki kekhasan masing-masing, namun prinsip-prinsip umumnya banyak memiliki kesamaan. Desain penelitian memberikan gambaran tentang prosedur untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan untuk menjawab seluruh pertanyaan penelitian.

(Suwarjeni ,2014:hal 26),”desain penelitian adalah suatu rencana tentang bagaimana mengumpulkan dan mengolah data agar penelitian

yang diharapkan dapat tercapai". Menurut Nugroho (2013:hal 25), "peradaban manusia memperkenalkan penelitian sebagai instrument menemukan pengetahuan, dan metode sebagai cara untuk membuktikan bahwa ilmu yang ditemukan benar-benar ilmu, paling tidak di kalangan para ilmuwan dan belum tentu pada kehidupan nyata atau sehari-hari." Berdasarkan pendapat tersebut maka desain dan metode penelitian digunakan untuk menemukan sebuah pengetahuan atau ilmu dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Creswell sebagaimana dikutip dalam Nugroho, 2013 menyampaikan bahwa terdapat dua paradigma penelitian atau kemudian disebut juga olehnya desain penelitian yaitu desain penelitian kualitatif dan desain penelitian kuantitatif dengan asumsi masing-masing sebagai berikut : desain kuantitatif bersifat obyektif dan tunggal (ontologi), peneliti mengambil jarak dengan obyek penelitian (epistimologi), bebas nilai (aksiologi), deduktif, sebab-akibat,statis, kategorisasi dibuat sebelum penelitian, bebas konteks dan mengutamakan generalisasi sebagai penuntun ke prediksi, penjelasan dan pemahaman (metodologi), desain kualitatif bersifat subjektif dan lebih dari satu (ontologi), peneliti berinteraksi dengan obyek penelitian (epistemologi), sarat nilai (aksiologi), induktif, saling mempengaruhi timbal balik, desain berkembang selama penelitian (metodologi).

(Bungin ,2003 menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mempertanyakan makna suatu obyek suatu obyek secara mendalam dan tuntas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan induktif yang bermula dari pengumpulan fakta-fakta dan berakhir pada perumusan teori, dimana pada saat penelitian tidak terkekang dengan desain penelitian beserta kerangka teorindan parameternya yang bersifat ketat (Bakry, 2014)

Penelitian kualitatif merupakan suatu strategy *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karekteristik, gejala, symbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan

multimetode, bersifat alami dan holistic; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif. Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.(Yusuf, 2014 : hal 329)

Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme/enterpretif*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, tekhnik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2014:hal 38)

Penelitian kualitatif berarti melakukan suatu proses eksplorasi untuk memahami makna perilaku individu/kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian, mengumpulkan data pada setting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Pemilihan metode ini juga dapat diharapkan memberikan uraian yang jelas, sistematik, faktual, akurat dan valid terhadap implementasi program TMMD dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah Kodim 0621/Kabupaten Bogor.

Data ini diperoleh melalui observasi dengan cara mengamati langsung gejala/fenomena tentang fokus penelitian, wawancara untuk mengumpulkan keterangan secara lisan dengan cara bertanya langsung kepada informan berkaitan dengan masalah penelitian yang diperlukan dan studi pustaka untuk mengumpulkan berbagai data sekunder dengan cara penelaahan dan membandingkan berbagai sumber kepustakaan yang terdiri dari: buku, jurnal, dokumen resmi, media dan elektronik untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian. Kegiatan akhir

adalah membuat laporan ke dalam struktur yang fleksibel (Sugiyono, 2014: hal 348)

Seluruh tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mencapai pemahaman bagaimana orang merasakan dalam proses kehidupannya, dan bagaimana orang menginterpretasikan pengalamannya. Penelitian kualitatif ingin memahami fenomena berdasarkan pandangan responden/narasumber atau pandangan internal (*perspective emic*) dan bukan pandangan peneliti sendiri atau pandangan eksternal (*perpective etic)*.

Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olahraga, seni dan budaya dan lain-lain sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama. Masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tentative dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada dilapangan.(Sugiyono ; 2014:hal 349)

Berdasarkan pemikiran-pemikiran diatas, sesuai dengan konteks masalah dan tujuan penelitian, maka desain penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, karena menitikberatkan kepada pencarian makna dan pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena. Dengan desain penelitian kualitatif ini, dapat diperoleh data dan informasi yang mendalam sehingga mampu menjelaskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yaitu tentang bagaimana mekanisme penentuan sasaran fisik dan non fisik program TMMD dan bagaimana implementasi program TMMD dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah Kodim 0621/Kabupaten Bogor.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini tempat penelitian difokuskan pada lokasi kegiatan program TMMD tahun 2014-2018 di wilayah Kodim

0621/Kabupaten Bogor. Ada tiga lokasi kegiatan program TMMD yaitu Kampung Cijambe desa Banyuasih kec Cigudeg pada tahun 2014, Desa Kiara Pandak Kec Suka jaya pada tahun 2016 dan Kampung Cijantur Desa Rabak Kec. Rumpin Kab Bogor pada tahun 2018.

Waktu penelelitian selama 7 bulan, mulai bulan Maret 2019 sampai dengan September 2019. Selanjutnya untuk memudahkan dan pengendalian waktu maka peneliti membuat rencana/kerangka waktu dan lokasi yang akan digunakan dalam rangka kegiatan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk studi pustaka guna pengumpulan data dalam rangka penyelesaian penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan di Perpustakaan Universitas Pertahanan, Perpustakaan Negara, Perpustakaan Mabesad dan Perpustakaan Kemhan mulai dari pembuatan gagasan sampai selesai.
2. Untuk mendapatkan data awal dan data pendukung, dalam rangka pembuatan gagasan penulisan penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan di Markas Kodim 0621/Kab Bogor di Cibinong dan Markas Korem 061/SK di Kota Bogor.
3. Lokasi penelitian juga di lakukan di Kantor Ster Mabes TNI di Cilangkap, Kantor Sterad Mabes AD dan Pusat Teritorial AD di Cipayung untuk mendapatkan data pendukung berupa kebijakan-kebijakan terkait program TMMD.
4. Adapun kunjungan untuk wawancara dan observasi Implementasi program TMMD dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan akan dilakukan di beberapa lokasi sumber yaitu Pemda Kabupaten Bogor, Makodim 0621 dan Makorem 061/SK.
5. Untuk proses pembimbingan tekhnis dengan dosen pembimbing tesis dilakukan sepanjang penyusunan tesis berlangsung bertempat di Universitas Pertahanan, Sentul Bogor. Untuk jadwal penelitian lapangan akan menyesuaikan dengan jadwal

yang ditentukan oleh Universitas Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Program studi Strategi Perang Semesta.

Adapun rencana waktu penelitian yang dibuat selengkapnya terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT
1	Studi Pendahuluan							
2	Studi Kepustakaan							
3	Pengujian Kompreheinsif							
4	Pengujian Proposal							
5	Penelitian & Pengambilan data							
6	Pengolahan & Analisis data							
7	Penyusunan Laporan							
8	Konsultasi & Bimbingan							
9	Penyempurnaan Laporan							
10	Ujian/Sidang Tesis							
11	Perbaikan naskah Tesis							

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2019

3.3 Subyek dan Obyek penelitian

3.3.1 Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian sebagaimana yang tercantum dalam tabel 3.2 dipilih secara purposive. Subyek yang terpilih merupakan orang-orang kunci (*key person*) dan sumber data atas permasalahan yang akan diteliti karena adanya asumsi bahwa subyek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya dan tema penelitian yang sedang diteliti. (Idrus, Muhammad, Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua), (Jakarta: Erlangga, 2009), hh. 25 dan 104)

Subyek penelitian adalah orang-orang yang terlibat secara langsung dan tidak langsung (informan) dalam suatu kegiatan penelitian. Yusuf (2014) mengemukakan bahwa peneliti perlu menentukan sumber data yang dijadikan subyek penelitian dengan menggunakan tekhnik purpossive sampling atau snowball sampling. Purposive sampling didasari

oleh tujuan dan pertimbangan tertentu terlebih dulu yang sudah ditetapkan sebelumnya, sedangkan snowball sampling adalah tekhnik penelitian dengan memilih sumber informasi mulai dari sedikit sampai kemudian besar, sampai diketahui informasi yang diharapkan.

Terkait dengan penelitian ini, dalam menentukan subyek penelitian, peneliti menggunakan tekhnik purposive sampling dengan menetapkan informan yang memiliki pemahaman dan pengalaman dalam Implementasi Program TMMD dan informan yang terlibat dan berperan dalam menyusun kebijakan program TMMD baik di tingkat pusat maupun di daerah/lapangan. Dalam penelitian kualitatif, kuantitas subyek bukanlah hal utama, sehingga pemilihan informan lebih didasari pada kualitas informasi yang terkait dengan tema penelitian yang diajukan.

Subyek penelitian (informan) dalam kegiatan program TMMD tahun 2014-2018 di Kodim 0621/Kabupaten Bogor tersebut antara lain adalah Danrem 061/SK, Dandim 0621/Kab Bogor selaku Komandan Satuan Tugas. Pasi Teritorial Kodim 0621/Kab Bogor. Bupati Kabupaten Bogor, Kepala BPMPD Kab. Bogor (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa), Kepala Dinas PUPR Kab Bogor (Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat), Camat di lokasi TMMD, Kepala Desa/Kepala Kampung di lokasi TMMD, Tokoh Masyarakat/Agama/Adat/Pemuda di lokasi TMMD yang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan.

Tabel 3.2 Data Informan

NO	INFORMAN	INSTANSI	JUMLAH INFORMAN	KODE INTRUMEN
1	Bupati Kab Bogor	Pemda	1	A-1
2	Kepala BPMPD	Pemda	1	A-2
3	Kadis PUPR Kab Bogor	Pemda	1	A-3
4	Paban V/Bhakti TNI Ster	Mabes TNI	1	B-1
5	Paban V/Bhakti TNI	Mabes AD	1	B-2
6	Komandan Korem 061	Korem 061	1	B-3
7	Komandan Kodim	Kodim	1	B-4
9	Pasi Ter Kodim	Kodim	1	C-1
11	Danramil 2118/Cigudeg	Kodim	1	C-2
12	Danramil 2112/Rumpin	Kodim	1	C-3

10	Camat Cigudeg	Pemda	1	D-1
13	Kepala Desa Rabak	Pemda	1	D-2
14	Kepala Desa Kiara Pandak	Pemda	1	D-3
15	Kepala Desa Banyuasih	Pemda	1	D-4
16	Tokoh Masyarakat Ds Rabak	Masyarakat	1	E-1
17	Tokoh masyarakat Ds Kiarapandak	Masyarakat	1	E-2
17	Tokoh masyarakat Ds Banyuasih	Masyarakat	1	E-3

Sumber: Diolah Oleh Peneliti tahun 2019

3.3.2 **Obyek Penelitian**

Pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut: “Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.(Sugiyono.2009: 38)

Menurut Spradley Obyek penelitian adalah situasi sosial atau fenomena yang di ungkap secara mendalam dalam penelitian baik melalui wawancara terhadap pelaku maupun pengamatan terhadap situasi dan aktivitas yang dilakukannya.(Yusuf, 2014: hal 36). Obyek penelitian adalah sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian.(Arikunto, 2006; hal 29). Obyek penelitian sebagai sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal (variable tertentu).(Sugiyono : hal 2010).

Obyek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti meliputi berbagai informasi dan data terkait Implementasi program TMMD dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor yang diperoleh dari para informan/respoden/narasumber, observasi lapangan serta dokumen penelitian lainnya yang menjadi bahan utama penelitian, yang antara lain meliputi transkrip data, catatan observasi, catatan lainnya seperti naskah, rincian tupoksi dan lain-lain.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah

mendapatkan data. Tanpa mengetahui tekhnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. (Sugiyono, 2016: hal 62)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini: *participant observation* (peneliti mengamati secara langsung apa yang terjadi pada subyek dan obyek yang diteliti, sehingga peneliti akan memahami makna yang terkandung dalam fenomena yang terjadi dan mampu menyimpulkan kapan data telah selesai serta mulai melakukan analisis), *in-dept interview* (menggali informasi melalui wawancara mendalam) dan dokumentasi.

Pengumpulan data dilakukan peneliti untuk memperoleh data primer dari proses wawancara langsung dengan narasumber dan data sekunder dari laporan hasil operasi tahunan, dokumen maupun studi literatur. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari narasumber sedangkan data sekunder tidak didapatkan langsung. (Sugiyono, 2012: hal 225). Dalam penelitian ini sumber data primer adalah *informan* sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, doktrin maupun referensi lainnya melalui studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif memiliki beberapa cara yang sudah umum digunakan. Pengumpulan data diperoleh dari data sekunder maupun primer. Data-data sekunder didapat dari observasi, dokumentasi, buku-buku referensi, jurnal atau studi pustaka, dan *focus group discussion* (FGD). Untuk data primer diperoleh dari wawancara mendalam (*in depth interview)*. Dalam pengumpulan data terdapat teknik triangulasi yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan dan sumber data yang telah ada. Dengan teknik ini peneliti selain mengumpul-kan data juga dapat menguji keabsahan dan keterandalan data tersebut.(Sabeni Beni Ahmad, 2015 : hal 89)

3.4.1 **Wawancara**

Wawancara dilakukan oleh peneliti melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dengan nara sumber. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara (*interview*) ini dilakukan antara pewawancara (*interviewer*) dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung terhadap sesuatu objek yang diteliti. (Yusuf Muri, 2014 : hal 372). Adapun objek yang diteliti adalah implementasi program TMMD dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor.

Teknik wawancara merupakan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara dengan narasumber (terwawancara) dengan maksud menghimpun informasi. Terwawancara pada penelitian kualitatif sering disebut informan sedangkan pewawancara adalah peneliti itu sendiri. Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan instrumen penelitian.(Aan Komariah dan Djam'an Satori,2011:hal 24).

Wawancara mendalam dilakukan terkait dengan penelitian tesis berupa implementasi program TMMD dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahan di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor adalah sebagai berikut :

a. Rencana Wawancara

Dalam rencana wawancara, peneliti melakukan persiapan melaksanakan wawancara. Persiapan wawancara meliputi penyiapan pedoman wawancara, penyiapan surat ijin, penyiapan alat perekam dan alat tulis untuk mencatat. Wawancara terdiri dari 3 (tiga) jenis yakni wawancara terstruktur, semistruktur, dan tidak terstruktur ; (1) Wawancara terstruktur. Peneliti membuat daftar pertanyaan secara sistematis untuk menggali informasi dari responden dengan menggunakan alat bantu *tape recorder*, kamera photo, dan alat bantu wawancara lainnya; (2) Wawancara semistruktur termasuk dalam kategori *in depth interview*

dimana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur sehingga peneliti dapat menemukan permasalahan secara lebih terbuka dari yang diwawancarai. Peneliti harus mencatat secara cermat pernyataan yang diucapkan oleh informan; dan (3) Wawancara tidak terstruktur. Wawancara bebas, peneliti hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari responden, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara. (Sugiyono, 2010: hal 233).

b. Pelaksanaan Wawancara

Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung (*face to face*) dalam rangka menggali dan mengumpulkan data dari dimensi/sub-variabel tentang kegiatan berupa implementasi program TMMD dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor dengan informan/narasumber. Peneliti dalam melakukan teknik wawancara terhadap informan dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) sebagai panduan dalam melakukan wawancara tetapi tidak tergantung pada pedoman wawancara, apabila ditemukan informasi yang penting di luar pedoman maka dapat ditambahkan.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan (pedoman wawancara) maupun pertanyaan langsung oleh peneliti. Langkah yang harus disiapkan pada teknik wawancara untuk penelitian kualitatif adalah; (1) Menetapkan subyek yang diwawancarai; (2) Menyiapkan pokok masalah; (3) Mengawali, membuka dan melangsungkan alur wawancara; (4) Mengkonfirmasi ikhtiar hasil wawancara dan mengakhirinya; (6) Menuliskan hasil wawancara kedalam catatan lapangan; dan (7) Mengidentifikasi lebih lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

Idrus menyatakan pada teknik wawancara terhadap informan maka pertanyaan melingkupi: a) Apa, (apa yang terjadi, apa yang dilakukan, apakah merupakan peristiwa rutin atau tidak); b) Siapa, (siapa yang

terlibat, peran yang dimainkan, siapa pemimpinnya); c) Kapan, (kapan kejadian terjadi, apa yang menyebabkan kejadian itu muncul); d) Dimana, (dimana terjadi); e) Mengapa, (mengapa terjadi, apa faktor penyebabnya); f) Bagaimana, (bagaimana kejadian itu berlangsung dan bagaimana kejadian itu dihubungkan dengan peristiwa yang lain). (Idrus, Muhammad. 2009 : hal. 58.)

3.4.2 **Observasi (Pengamatan)**

a. **Rencana Observasi**

Rencana observasi adalah kegiatan peneliti dalam mempersiapkan pelaksanaan observasi. Kegiatan tersebut diantaranya adalah : (1) ketahui dan tentukan lebih dahulu apa-apa yang perlu diobservasi, (2) kenali lebih dahulu obyek atau sasaran penelitian melalui literature, (3) Selidiki tujuan-tujuan yang umum maupun khusus dari masalah-masalah reseach untuk menentukan apa yang harus diobservasi, (4) Buatlah suatu cara untuk mencatat hasil-hasil observasi, (5) siapkan alat peralatan terkait keperluan observasi yaitu check list, alat gambar atau kamera.

b. **Pelaksanaan Observasi**

Peneliti melaksanakan observasi dengan merekam berbagai fenomena yang terjadi, mengamati langsung obyek yang akan diteliti dalam ruang lingkup penelitian terkait dengan implementasi program TMMD dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor. Observasi dilakukan peneliti dalam rangka menghimpun data penelitian secara langsung dilapangan, dimana pengamatan dilakukan pada obyek yang diteliti. Hal ini untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai obyek penelitian. (Bungin, M. Burhan, 2008 :hal 35). Dalam pelaksanaan observasi dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : (1) Melakukan observasi dengan secermat-cermatnya, (2) Membuat hasil catatan-catatan/observasi, (3) Memahami pencatatan dan penggunaan alat.

3.4.3 **Studi Pustaka dan Dokumentasi**

Teknik Pengumpulan data pada studi pustaka dan dokumentasi merupakan cara yang dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari persfektif subyek lewat dokumen maupun media tertulis lainnya yang ditulis langsung oleh subyek yang bersangkutan.(Haris Herdiansyah,2015 : hal 124).

Pada studi ini peneliti akan mengumpulkan dan mencari data melalui buku-buku, jurnal, tesis, dokumen-dokumen resmi baik internal maupun eksternal yang relevan dengan penelitian ini berupa; transkrip, surat kabar, majalah, makalah seminar, konferensi, lokakarya, Undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, dan sebagainya. Hal ini dilakukan dalam rangka memperkuat argumentasi teori maupun sebagai pedoman penulisan naskah ini.

3.5. Pemeriksaan keabsahan data

Dalam rangka menjamin keakuratan data, maka peneliti harus berupaya melakukan keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Dalam peneltian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa seungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.(Sugiyono, 2016: hal 119).

Hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa hal, yaitu subyektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol, dan sumber data kualitatif yang kurang kredibel akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian. Oleh karena itu, dilakukan beberapa cara menguji keabsahan data; (1) *Credibility* yakni apakah proses dan hasil penelitian dapat diterima atau dipercaya. Untuk

dapat diterima atau dipercaya maka menggunakan triangulasi sumber, teknik dan teori; Triangulasi dilakukan peneliti menggunakan multi sumber sehingga memberikan keyakinan kepada peneliti bahwa simpulan yang disampaikan nantinya adalah valid. Menurut peneliti, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Metode triangulasi yang digunakan oleh peneliti yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu berkaitan dengan keefektifan waktu. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar dan belum banyak masalah akan memberikan data yang valid sehingga lebih kredibel. (2) *Dependability* (uji reliabilitas) yakni apakah hasil penelitian mengacu pada kekonsistenan peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan; Yang diuji reliabilitasnya hanyalah pertanyaan-pertanyaan yang valid saja. Uji realibilitas terkait dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Teknik yang digunakan oleh peneliti yaitu menguji kesesuaian hasil observasi, wawancara dengan sasaran penelitian. Hasil yang diperoleh dari observasi dan wawancara adalah hasil yang valid. (3) *Confirmability*, (uji obyektifitas), apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan; Pengujian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan untuk memperoleh obyektifitas penelitian. Uji ini dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh proses penelitian benar-benar dilakukan dan memastikan telah dilaksanakan dengan metodologi penelitian yang selaras dengan tujuan penelitian. (4) *Transferability,* apakah hasil

penelitian ini dapat diterapkan pada situasi yang lain. Sugiyono menjelaskan bahwa instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sebagaimana diungkap oleh Djamaludin dalam Masri bahwa validitas menunjukkan sejauhmana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 2012: hal.124) Dengan demikian, instrumen yang valid merupakan instrumen yang benar-benar tepat untuk mengukur apa yang hendak di ukur, baik dengan wawancara dan mengumpulkan data. (Sugiyono, 2017: hal 270).

Masalah yang dapat mengancam keabsahan data dari penelitian kualitatif; (1) Rasa percaya antara narasumber dengan peneliti yang kurang; (2) Terdapat ancaman keamanan hubungan antara peneliti dan narasumber; (3) Ketidaknyamanan hubungan antara peneliti dan narasumber; dan (4) Terdapat intervensi pemikiran dan sudut pandang peneliti didalam data. (Haris Hardiansyah,2014: hal 68).

Berikutnya adalah pengujian keterandalan data. Keterandalan dalam penelitian kualitatif berarti tingkat kesesuaian antara data/uraian yang dikemukakan oleh subjek dengan kondisi yang sebenarnya.(Haris Hardiansyah,2014: hal). Beberapa teknik untuk menguji keterandalan data, antara lain; (1) Melakukan prosedur cek ulang secara cermat. Dalam prosedur ini terdapat verifikasi dan falsifikasi. Verifikasi adalah mengecek apakah data yang diungkapkan oleh narasumber sesuai dengan situasi yang konkret di lapangan. Falsifikasi adalah suatu prosedur pengecekan untuk mengetahui seberapa jauh data yang ditemukan dapat diuji kebenarannya; (2) Melakukan teknik penggalian data yang bervariasi mengakibatkan Penelitian kualitatif sering kali sangat luas, sehingga diperlukan lebih dari satu teknik penggalian data. Misalnya dengan melakukan wawancara, dan jika memungkinkan menggali data dengan wawancara dan observasi; wawancara, observasi dan studi dokumentasi; serta lainnya sebanyak mungkin hingga keterandalan data

mudah didapatkan; dan (3) Menambah jumlah subjek dan informan penelitian. Jumlah subyek yang cukup dapat memberikan banyak data dan perspektif sehingga memperkaya hasil temuan lapangan dan analisanya. Untuk memperkuat data, tidak hanya berasal dari narasumber semata melainkan juga dari dukungan data dokumentasi lain yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Data-data tersebut digunakan sebagai data sekunder atau pendukung yang mampu meningkatkan keterandalan data. (Haris Hardiansyah,2014: hal 45)

Studi pustaka dilakukan di perpustakaan Universitas Pertahanan, serta *e-library* dan penelusuran situs terkait yang di akses melalui internet. Adapun studi lapangan dilakukan di lokasi kegiatan TMMD, di Kodim 0621/Kab Bogor dan Pemda Kab. Bogor serta beberapa tempat lainnya sebagaimana tergambar pada jadwal penelitian Tabel 3.1

3.6 Tekhnik Analisis Data

Salah satu proses penting dalam penelitian adalah analisis data. Kegiatan ini dilakukan setelah semua data yang diperlukan dalam rangka memecahkan permasalahan penelitian sudah diperoleh secara lengkap. Ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan, karena itu kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penelitian. Kesalahan dalam menentukan alat analisis dapat berakibat fatal terhadap kesimpulan yang dihasilkan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data dari Miles, Huberman dan Saldana, disebut analisis data model interaktif yang meliputi kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion/verifying*).
Tahapan siklus Miles Huberman diuraikan Idrus sebagai berikut. (Idrus, Muhammad. 2009 : hal 58.)

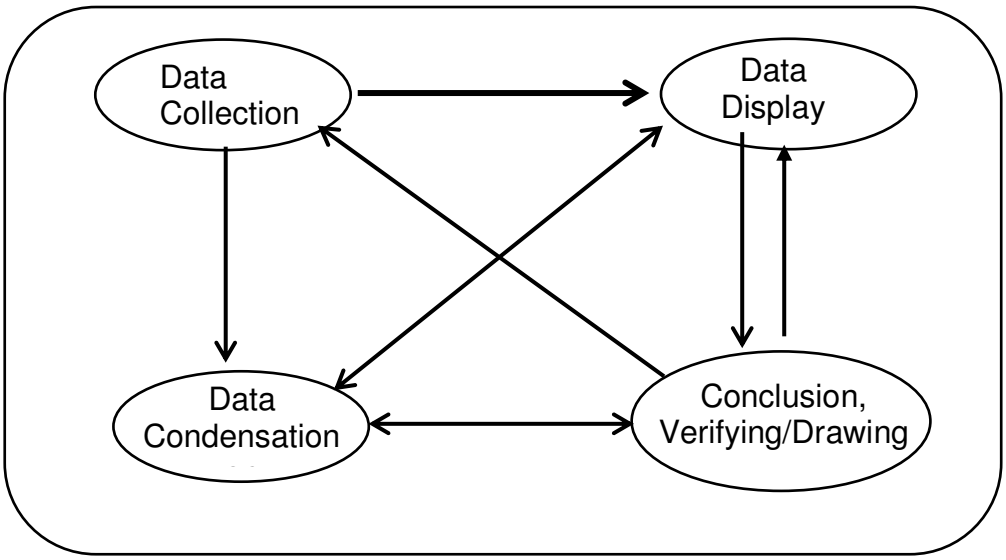

Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Model Interaktif
Sumber: data *Qualitative Data Analysis: A Methode Sourcebook*
(Miles et al., 2014)

Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi selain pengumpulan data.(Miles, B. Mathew dan M. Huberman.1992.)

Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.(Ulber Silalahi. 2012: Hlm 339)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

3.6.1. Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis data. Reduksi data, adalah memilih dan memilah data-data pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama penelitian yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Data-data yang telah didapatkan akan dilaksanakan pemilihan serta pemilahan disesuaikan dengan fokus yang menjadi penelitian, sehingga dengan data tersebut peneliti dapat menjawab permasalahan.(Basrowi dan Suwandi. 2008: 78.).

Selain reduksi data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi untuk mengecek keabsahan data. Pengertian triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan obyek lain dalam membandingkan hasil wawancara dengan obyek penelitian.(Moloeng, 2005:hal 33). Menurut Rahayu bahwa metode triangulasi merupakan salah satu metode yang paling umum dipakai dalam uji validitas penelitian kualitatif. (Iin Tri Rahayu dan Triastiadi Ardani, 2004:hal.142). Berdasarkan pendapat dari Moleong yang dikutip oleh Wahyu mengatakan bahwa metode Triangulasi merupakan proses membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi di- gunakan untuk mengecek kebenaran data, dan menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data. Untuk mencapai kepercayaan terhadap akurasi data, ditempuh langkah sebagai berikut; (1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa

yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat; dan (5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Peneliti menggunakan observasi partisipasif,wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber data berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang akan diperoleh akan lebih konsisten,tuntas dan pasti serta dapat meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan. Lebih jelasnya dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi dapat dilihat seperti berikut :

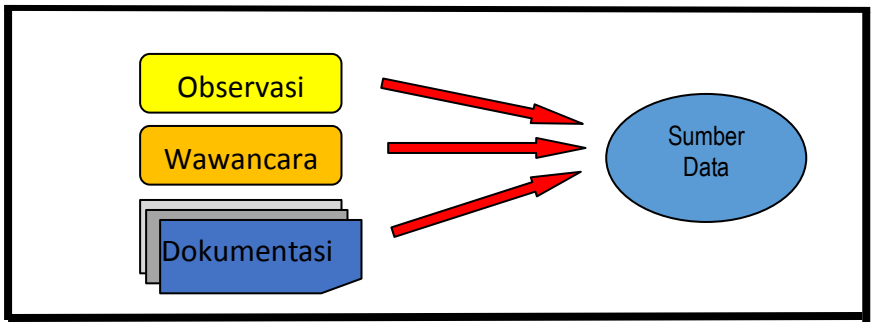

Gambar 3.2 Triangulasi Teknik pengumpulan data

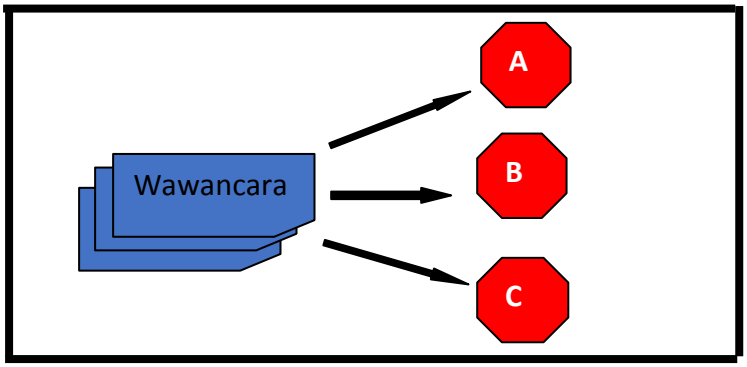

Gambar 3.3 Triangulasi Sumber pengumpulan data

3.6.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (Ulber Silalahi:hal 340). Penyajian data yang sering digunakan untuk data kualitatif pada masa yang lalu adalah dalam bentuk teks naratif dalam puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan halaman. Akan tetapi, teks naratif dalam jumlah yang besar melebihi beban kemampuan manusia dalam memproses informasi. Manusia tidak cukup mampu memproses informasi yang besar jumlahnya; kecenderungan adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.

3.6.3 Verifikasi Data

Verifikasi adalah proses menentukan kebenaran dari suatu pernyataan dengan menggunakan sebuah metode yang empirik dan pengujian ilmiah untuk suatu pernyataan atau proposisi untuk memastikan suatu kebenaran. Konfirmasi suatu pernyataan, proporsi, atau teori. Pengertian verifikasi data, yaitu adalah pembentukan kebenaran suatu teori, atau fakta atas data yang dikumpulkan. Pada verifikasi data ini biasanya data yang dikumpulkan akan diolah dan kemudian dianalisis agar dapat diuji secara hipotesis. Hipotesis kemudian diuji menggunakan fakta empirik agar mendapatkan jawaban yang benar secara ilmiah.

Data yang telah diperoleh dan terkumpul, selanjutnya disesuaikan dengan permasalahan yang di angkat sehingga dapat memahami permasalahan secara lebih komprehensif, serta dihubungkan dengan teori dan akan diuji secara empiris sehingga validitas, reliabilitas, dan obyektivitas data teruji. (Sugiyono, 2017: hal 121-131)

Triangulasi berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang

berbeda dalam penelitian kualitatif. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber.

3.6.4 Interpretasi Data

Interpretasi data diperlukan untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Interpretasi data bersama dengan analisis data digunakan untuk memberikan masukan bagi perbaikan kegiatan penelitian, hasilnya akan digunakan untuk menarik kesimpulan dari laporan penelitian. Teknik Interprelasi data dilakukan dengan; (1) Memperluas hasil analisis dengan mengajukan pertanyaan yang berhubungan, perbedaan antara hasil analisis, penyebab, dan implikasi dari hasil analisis sebelumnya; (2) Hubungan temuan dengan pengalaman empiris peneliti; (3) Memberikan pandangan yang kritis dari analisis yang dilakukan; (4) Menghubungkan hasil analisis dengan teori-teori yang digunakan; (5) menghubungkan dan meninjau teori yang relevan dengan fenomena atau permasalahan yang dihadapi.

3.6.5 Pengambilan kesimpulan

Kesimpulan ini masih besifat sementara dan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya atau obyektif.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum Obyek Penelitian

4.1.1. Wilayah Kodim 0621/Kab Bogor.

Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat. Luas wilayah Kabupaten Bogor adalah 2.663,81 km², dan secara geografis terletak antara 6° 19' - 6° 47' Lintang Selatan dan 106° 1' - 107° 103' Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, Kabupaten/Kota Bekasi dan Kota Depok di sebelah Utara, kemudian dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Karawang di sebelah Timur, sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Cianjur, sementara di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten serta di tengah-tengah terletak Kota Bogor. Gambar peta Kabupaten Bogor sebagai berikut:

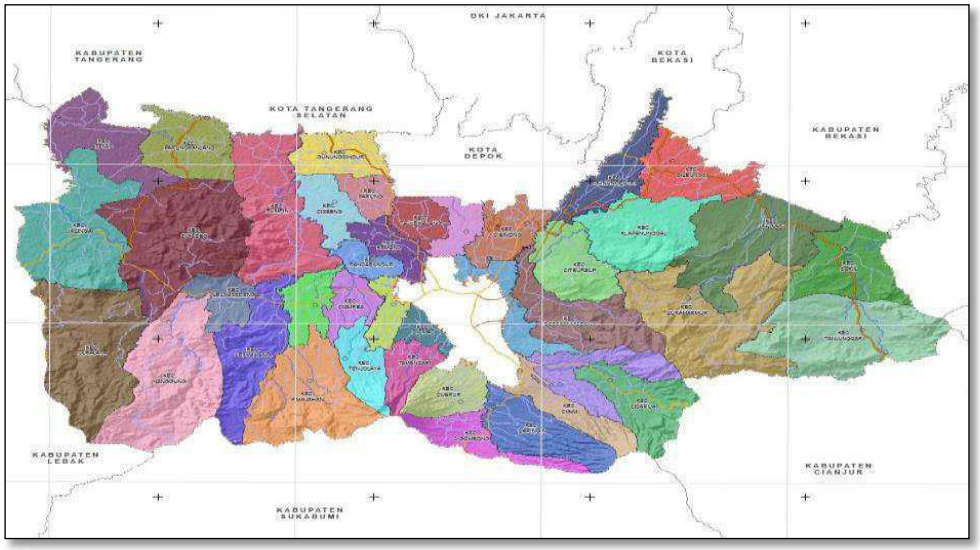

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Bogor
Sumber: bogorkab.go.id ta 2017

Letak Kabupaten Bogor sangat strategis, berdekatan ibukota negara sehingga menjadi daerah penyangga khususnya sektor pertanian. Secara administratif, Kabupaten Bogor terdiri atas 435 Desa/Kelurahan, yang terdiri dari 416 desa, 19 kelurahan, 4.028 RW, 16.256 RT yang tercakup dalam 40 Kecamatan.(Sumber: BPS Kabupaten Bogor, 2018). Wilayahnya memiliki tipe morfologi bervariasi yaitu dataran relatif rendah (bagian utara) dan dataran tinggi (bagian selatan). Ketinggian wilayah terdiri dari 15-100 mdpl (29,28%), ketinggian 100-500 mdpl (42,62%), 500-1000 mdpl (19,53%), 1000-2000 mdpl (8,43%), 2000-2500 mdpl (0,22%). Kabupaten Bogor terletak di antara Gunung Gede dan Gunung Salak sehingga sering menerima hujan orografi. Suhu rata-rata 25,9°C.

Tabel 4.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Bogor

NO	**KECAMATAN**	**LUAS (km^2)**	**NO**	**KECAMATAN**	**LUAS (km^2)**
1	Nanggung	135.25	21	Tanjungsari	129.98
2	Leuwiliang	61.77	22	Jonggol	126.86
3	Leuwisadeng	32.83	23	Cileungsi	73.78
4	Pamijahan	80.88	24	Klapanunggal	97.64
5	Cibungbulang	32.66	25	Gunungputri	56.28
6	Ciampea	51.06	26	Citeureup	67.19
7	Tenjolaya	23.83	27	Cibinong	43.36
8	Dramaga	24.37	28	Bojonggede	29.55
9	Ciomas	16.30	29	Tajurhalang	29.28
10	Tamansari	21.61	30	Kemang	63.69
11	Cijeruk	31.66	31	Rancabungur	21.68
12	Cigombong	40.42	32	Parung	73.76
13	Caringin	57.29	33	Ciseeng	36.78
14	Ciawi	25.81	34	Gunungsindur	51.26
15	Cisarua	63.73	35	Rumpin	111.00
16	Megamendung	39.87	36	Cigudeg	158.89
17	Sukaraja	42.97	37	Sukajaya	76.28
18	Babakanmadang	98.71	38	Jasinga	208.06
19	Sukamakmur	126.78	39	Tenjo	64.44
20	Cariu	73.66	40	Parungpanjang	62.59

Sumber: Bogor Kab BPS, 2017.

Jumlah penduduk tahun 2017 sebanyak 5.715.000 jiwa (2.920.288 jiwa laki-laki dan 2.794.721 jiwa perempuan). Pertumbuhan penduduk

sebesar 2,28%. Kepadatan penduduk tahun 2017 sebesar 2.145 jiwa/km². Jumlah angkatan kerja tahun 2017 sebanyak 2.600.121 orang, terdiri dari 2.351.753 penduduk bekerja dan 248.368 penduduk berstatus pengangguran terbuka. Jumlah angkatan kerja yang bekerja menurut pendidikan tertinggi dan jenis lapangan usaha tahun 2017 sebagai tertera pada table 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2.Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang bekerja menurut Pendidikan dan Jenis Lapangan Usaha di Kabupaten Bogor, 2017

LAPANGAN USAHA	<SD	SD	SMP	SMA	PT
Pertanian, Perkebunan,Kehutanan, Perburuan & Perikanan	25,36	11,96	4,04	1	1,77
Pertambangan dan penggalian	1,07	1,6	1,62	0,96	3,31
Industri pengolahan	11,92	22,06	20,01	21,66	16,21
Listrik, gas dan air minum	0	0	0,34	1,37	0
Konstruksi	5,85	10,57	11,04	2,34	4,02
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	33,96	28,32	37,65	35,96	11,51
Transpotasi,Pergudangan & Komunikasi	7,77	7,48	8,23	8,63	7,51
Lembaga Keuangan,Real Estate,Usaha & Jasa Keuangan	1,12	1,5	2,86	9,07	9,27
Jasa Kemasyarakatan, sosial dan perorangan	12,95	16,51	14,21	19,01	46,4
Jumlah Total (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Bogor Kab BPS, 2017.

Sesuai persentase penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi dan jenis lapangan usaha maka sektor perdagangan dan pertanian menjadi prioritas pekerjaan penduduk di Kabupaten Bogor. Mobilitas penduduk Kab Bogor relatif tinggi dimana banyak penduduk Kab. Bogor yang bekerja diwilayah DKI Jakarta dan berdomisili di Kab. Bogor.

Berdasarkan strategi wilayah pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Bogor bahwa wilayah Kabupaten Bogor

dikelompokkan ke dalam 3 Wilayah Pembangunan, yaitu: 1) Strategi percepatan di wilayah Bogor Barat, yang mencakup 13 Kecamatan, yaitu Kecamatan Nanggung, Leuwiliang, Leuwisadeng, Pamijahan, Cibungbulang, Ciampea, Tenjolaya, Rumpin, Cigudeg, Sukajaya, Jasinga, Tenjo dan Parungpanjang, dengan total wilayah seluas 128.750 hektar; 2) Strategi pengendalian di wilayah Bogor Tengah, yang mencakup 20 Kecamatan, yaitu Kecamatan Dramaga, Ciomas, Tamansari, Cijeruk, Cigombong, Caringin, Ciawi, Cisarua, Megamendung, Sukaraja, Babakan Madang, Citeureup, Cibinong, Bojonggede, Tajurhalang, Kemang, Rancabungur, Parung, Ciseeng dan Kecamatan Gunungsindur, dengan total wilayah seluas 87.552 hektar; 3) Strategi pemantapan di wilayah Bogor Timur, yang mencakup 7 Kecamatan, yaitu Kecamatan Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari, Jonggol, Cileungsi, Klapanunggal dan Kecamatan Gunungputri, dengan total wilayah seluas 100.800 hektar.

Berdasarkan website www.bogorkab.go.id menyatakan pusat pemerintahan Kabupaten Bogor awalnya di Panaragan (wilayah kota Bogor), kemudian berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982, ibukota Kabupaten Bogor dipindahkan dan ditetapkan di Cibinong. Sejak tahun 1990 pusat kegiatan pemerintahan berada di Cibinong. Visi Kabupaten Bogor adalah Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia. Misi Kabupaten Bogor terdiri dari :

1) Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
2) Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat, pengembangan usaha berbasis sumber daya alam dan pariwisata.
3) Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

4) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan.

5) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Trifungsi Kabupaten Bogor terdiri dari:

a) Bogor sebagai penyangga DKI Jakarta, pengembangan pemukiman perkotaan sebagai bagian dari sistem metropolitan Jabodetabek.

b) Konservasi berkenaan posisi geografis di bagian hulu dalam tata air untuk metropolitan Jabodetabek

c) Pengembangan pertanian, khususnya hortikultura, sehubungan dengan perkembangan dan keunggulan telah ada, selanjutnya dipacu.

Dampak krisis ekonomi yang berkelanjutan, kaum buruh di PHK, menjadi semakin banyaknya angka pengangguran dan bertambahnya masyarakat pra sejahtera; Tingginya harga-harga kebutuhan pokok sangat berpengaruh bagi masyarakat berpenghasilan rendah; Pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi. Maraknya aksi unjuk rasa buruh pabrik yang menuntut perubahan sosial (upah dan kesejahteraan lainnya) dan upaya memperjuangkan hak individu karyawan yang seakan-akan anti penindasan dari kaum kapitalisme dengan menggunakan UU kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat; Adanya unjuk rasa masyarakat yang disebabkan konflik individu, pencemaran lingkungan, pendirian tempat ibadah tanpa ijin, tempat-tempat lokalisasi WTS dan tempat hiburan lainnya; Sering terjadinya tawuran antar pelajar dan antara kampung; Maraknya kasus Miras, Narkoba dan lainnya. Mengantisipasi terhadap golongan fanatisme agama sempit; Mewaspadai kelompok masyarakat yang menganut aliran kepercayaan yang bertentangan dengan budaya Pancasila. (BPS Kab Bogor, bps kab bogor.co.id)

4.1.2 **Satuan Kodim 0621/Kab Bogor.**

Dibentuk pada tahun 1979, berdasarkan Kep Pangdam III/Slw Nomor. KEP/53/IV/1985 tanggal 28 Februari 1985. Kodim mempunyai tugas diantaranya membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan aspek darat yang disiapkan secara dini, meliputi wilayah pertahanan serta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP), yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara semesta. (Orgas Kodim, Per Kasad Nomor 111/12/2012). Kodim 0621/Kab. Bogor menyelenggarakan kegiatan Binter di wilayah Kabupaten Bogor, sehingga terjadi sinergi positif antara pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan penyiapan pertahanan negara. Membawahi 23 Koramil yang terdiri dari : Koramil 2101/Sukaraja, 2102/Cibinong, 2104/Citeureup, 2105/Gunung Putri, 2106/Cileungsi, 2107/Jonggol, 2108/Cariu,2111/Parung, 2112/Rumpin, 2113/Gunung Sindur, 2114/Ciampea, 2115/Kemang, 2116/ Leuwiliang, 2117/Jasinga, 2118/Cigudeg, 2119/Parung Panjang, 2120/ Ciomas, 2121/Cibungbulang, 2122/Ciawi, 2123/Cijeruk, 2124/Cisarua, 2125/Nanggung dan Koramil 2126/Klapanunggal serta 1 Unit Inteldim.

Dalam melaksanakan tugasnya Dandim 0621/Kab Bogor dibantu lima Perwira seksi (Pasi) yang dikoordinir oleh Kepala Staf (Kasdim) yaitu Perwira seksi Intelijen (Pasi Intel), Perwira seksi Operasi (Pasi Ops), Perwira seksi Personel (Pasi Pers), Perwira seksi Logistik (Pasi Log) dan Perwira seksi Teritorial (Pasi Ter) sebagaimana tergambar dalam struktur organisasi Kodim pada gambar 4.2 dibawah ini. Program TMMD merupakan bidang tugas Pasi Ter.

Tugas pokok Kodim 0621/Kab. Bogor adalah sebagai berikut :

a) Melaksanakan tugas fungsi utama sbb.

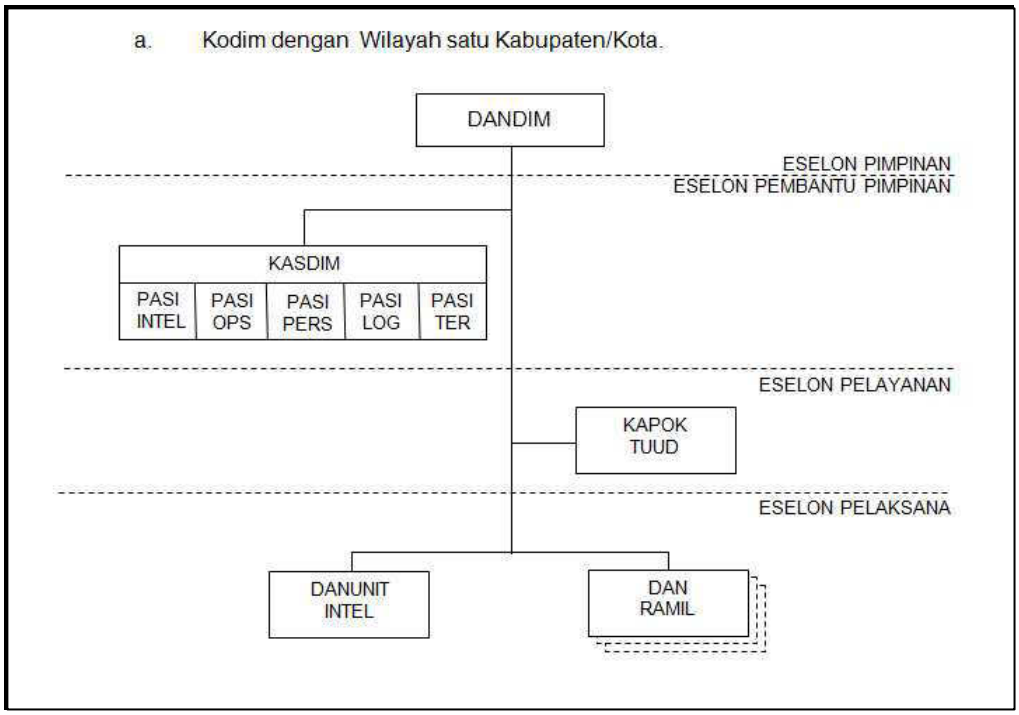

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kodim
Sumber: Peraturan Kasad Nomor Perkasad/111/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012

(1) Pertempuran.

(a) Pembinaan Ruang Pertempuran. Menyusun dan menyiapkan ruang untuk digunakan dalam penyelenggaraan pertempuran di darat baik dalam rangka Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

(b) Pembinaan Daya Tempur. antara lain Mewujudkan daya tempur kesatuannya yang mampu mendukung tugas pokok Kodam/Korem.

(c) Pembinaan Kesiapan Operasi. Mewujudkan kesiapan kekuatan pendukung dan tersedianya komponen cadangan serta Pendukung dalam rangka penyelenggaraan OMP dan OMSP

(2) Pembinaan Teritorial. Menyelenggarakan pembinaan kemampuan Teritorial, pembinaan perlawanan wilayah, pembinaan komunikasi sosial dan pembinaan Bhakti TNI, yaitu dengan:

(a) Membantu Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan aspek darat yang disiapkan secara dini, meliputi wilayah pertahanan serta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP), yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara semesta.

(b) Membantu Pemerintah Kabupaten Bogor menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(c) Membantu Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memberdayakan komponen pendukung.

(d) Membantu tugas Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memberikan bantuan kemanusiaan, menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, rehabilitasi infrastruktur dan mengatasi masalah akibat pemogokan serta konflik komunal.

(e) Membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan kemanunggalan TNI-Rakyat.

b) Melaksanakan Tugas Fungsi organik militer meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang intelijen, operasi, personel, logistik, teritorial, perencanaan serta pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka mendukung tugas Pokok Kodim.

c) Melaksanakan Tugas Fungsi Organik Pembinaan meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang latihan dalam rangka mendukung tugas pokok Kodim.

Dari perspektif ancaman, sebagai penyangga ibukota negara, Kabupaten Bogor rawan dan berpotensi sebagai basis terorisme dan faham radikalisme. Faktanya telah ditangkap pada tanggal 17 Mei 2019, kelompok teroris Bogor Endang alias Abu Rafi anggota jaringan ISIS dan JAD (Jamaah Ansharut Daulah) yang sedang konsolidasi di Nanggewer, Kecamatan Cibinong.(tempo.co.id, Sabtu 18 Mei 2019, https://fokus.tempo.co/read /1206989/ancaman-teror-bom-). Potensi ancaman terorisme dapat dikendalikan dengan bekerjasama dengan instansi terkait lainnya. Kodim 0621/Kab Bogor mengelola stabilitas wilayah dengan melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman teroris, radikalisme dan bencana alam di Kabupaten Bogor dengan menyelenggarakan kegiatan bakti TNI diantaranya dalam bentuk program TMMD. Program TMMD dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan penyiapan pertahanan negara. Diantaranya yang dilaksanakan lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2014, 2016 dan 2018.

4.1.3. **Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)**.

TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan Kegiatan Bakti TNI secara fisik maupun nonfisik, baik berdiri sendiri maupun bersama pemerintah, Kementerian/LPNK, Pemerintah daerah, masyarakat dan komponen bangsa lainnya secara terintegrasi dengan sasaran, waktu, tempat dan dukungan logistik yang telah ditetapkan untuk percepatan pembangunan di daerah pedesaan khususnya daerah tertinggal, miskin, terisolasi, terpencil, perbatasan dan daerah kumuh perkotaan serta daerah yang terkena bencana. (Petunjuk Penyelenggaraan Bakti TNI, Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 1070/XII/2017: hal 16)

TNI Manunggal Membangun Desa telah berjalan selama 39 tahun, diawali pada tahun 1980 ketika pertama kali digagas oleh Jenderal M. Jusuf. Pada saat itu masih bernama ABRI Masuk Desa (AMD). Program AMD fokus

pada pembangunan masyarakat di pedesaan. Desa dipilih sebagai objek pembangunan karena desa memiliki peran yang penting dalam pembangunan nasional. Termasuk didalamnya sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di desa, sehingga desa merupakan basis pertahanan terakhir dalam pertahanan negara. Dalam perkembangannya AMD menjangkau ke daerah-daerah terpencil dan terpelosok, perbatasan, kumuh perkotaan maupun daerah yang dilanda bencana alam. (Buku Pedoman Penyelenggaraan TMMD tahun 2019).

Kegiatan TMMD mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan bersifat fisik maupun non fisik dan memantapkan kemanunggalan TNI–Rakyat dalam rangka menyiapkan Ruang Juang, Alat Juang, dan Kondisi Juang yang tangguh.

b. Sasaran:

1) terwujudnya kesamaan visi dan misi antar aparatur pemerintah maupun para pembina kemasyarakatan secara terpadu serta melembaga dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungannya;

2) terwujudnya kesejahteraan dan kehidupan sosial masyarakat di daerah menuju masyarakat yang semakin sejahtera dan mandiri serta memiliki ketahanan wilayah yang tangguh dalam menghadapi setiap hakikat ancaman;

3) terwujudnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang tercermin adanya tertib hukum dan disiplin nasional dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

4) terwujudnya wawasan kebangsaan serta kesadaran bela negara yang tercermin dalam pola dan sikap hidup setiap warga

masyarakat sesuai bidang profesi dan pengabdiannya masing-masing; dan

5) terwujudnya semangat kebersamaan, gotong royong dan rasa kekeluargaan serta partisipasi aktif masyarakat dalam membangun daerahnya sehingga tercipta jiwa persatuan dan kesatuan yang kokoh kuat serta terwujudnya Kemanunggalan TNI-Rakyat.

Adapun macam kegiatan TMMD terdiri dari:

1) TMMD Reguler. TMMD Reguler adalah TMMD yang diprogramkan setiap tahun anggaran sesuai waktu, sasaran dan dukungan logistik yang ditetapkan.

2) TMMD Khusus. TMMD Khusus adalah TMMD yang dilaksanakan di luar program karena adanya kebutuhan khusus.

3) TMMD Skala Besar. TMMD Skala Besar adalah TMMD yang dilaksanakan atas inisiatif sendiri atau permintaan pemerintah pusat/daerah dengan sasaran strategis dan volume pekerjaan yang besar sehingga memerlukan waktu lebih lama dan dukungan biaya maupun logistik serta jumlah personel yang lebih besar.

4) TMMD Imbangan. TMMD Imbangan adalah TMMD di luar program yang dilaksanakan bersamaan waktunya dengan TMMD Reguler oleh Penanggungjawab Keberhasilan Operasi (PKO) atas inisiatif atau permintaan pemerintah daerah setempat dengan menggunakan anggaran dari pemerintah daerah setempat. (Petunjuk Penyelenggaraan Bakti TNI, Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 1070/XII/2017; hal 16)

Kriteria Keberhasilan Program TMMD berdasarkan Petunjuk Penyelenggaraan Bakti TNI (Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 1070/XII/2017; hal 22) adalah sbb

a. obyek sasaran dapat diselesaikan secara tuntas sesuai batas waktu yang direncanakan dan besarnya anggaran yang ditetapkan;

b. hasil kegiatan harus dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat;

c. dapat menunjang pertumbuhan perekonomian, meningkatkan kesehatan dan mencerdaskan masyarakat, sehingga masyarakat mampu tumbuh secara swasembada;

d. dapat meningkatkan rasa cinta tanah air, bela negara dan berwawasan kebangsaan;

e. dapat meningkatkan rasa toleransi dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat;

f. dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat;

g. mengurangi atau menghilangkan terisolasinya suatu daerah/tempat pemukiman; dan

h. semakin meningkatnya kemanunggalan TNI-Rakyat.

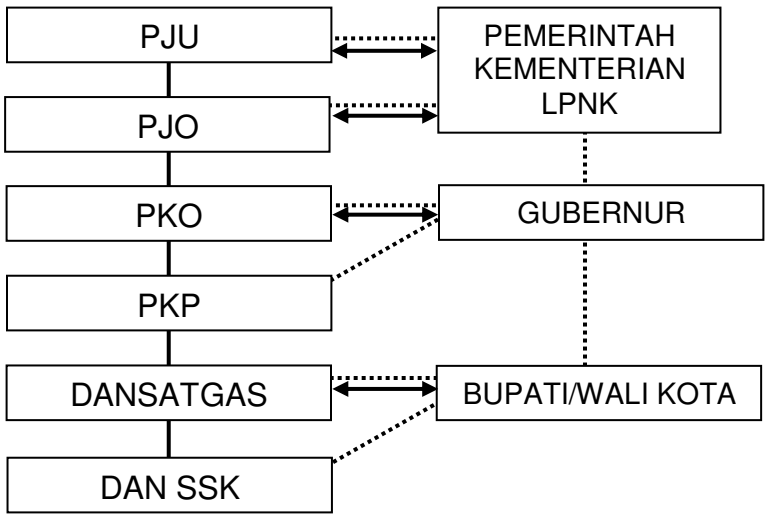

Keterangan :

——— : garis komando

..... : garis koordinasi
◄——► : garis kerjasama

Gambar 4.3 Struktur Organisasi TMMD
Sumber: Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 1070/XII/2017

Program TMMD berdasarkan Petunjuk Penyelenggaraan Bakti TNI (Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 1070/XII/2017; hal 22) di selenggarakan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Tahap Perencanaan.

1) Mabes TNI.

a) Panglima TNI selaku Komando Pengendali atau Penanggung Jawab Umum (PJU), membangun kerja sama dengan Pemerintah, Kementrian/LPNK dan instansi terkait berdasarkan Undang-Undang, Kepres, Inpres dan peraturan lainnya yang mendukung dalam rangka penyelenggaraan kegiatan TMMD;

b) melaksanakan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah, Kementerian/LPNK dan instansi terkait lainnya dan diteruskan ke Kas Angkatan; dan

c) Panglima dhi. Aster Panglima TNI mengeluarkan Direktif pelaksanaan kegiatan TMMD kepada Kas Angkatan;

2) Mabes Angkatan.

a) Kas Angkatan selaku Penanggung Jawab Operasional (PJO), menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU) dari Panglima TNI dengan Pemerintah, Kementerian/LPNK dan instansi tekait lainnya serta mengatur operasional kegiatan TMMD di satuan jajarannya sesuai MoU/Direktif Panglima TNI;

b) mengkoordinasikan kegiatan TMMD dengan pemerintah, Kementrian/LPNK dan diteruskan ke tingkat daerah; dan

c) mengeluarkan perintah pelaksanaan TMMD kepada satuan jajaran.

3) Kotama.

a) Pangkotama selaku Penanggung Jawab Kegiatan Operasional (PKO) mengoordinasikan dan bekerja sama dengan Pemerintah/instansi terkait di daerah tentang rencana pelaksanaan kegiatan TMMD;

b) PKO dapat menugaskan pejabat dalam lingkup Komandonya sebagai Penanggung Jawab Keberhasilan Pelaksanaan (PKP);

c) mengoordinasikan pelibatan TNI di wilayah guna mendukung pelaksanaan kegiatan TMMD; dan

d) mengeluarkan perintah kepada satuan jajaran.

4) Satkowil (Tingkat Provinsi).

a) Komandan Satuan Komando Kewilayahan TNI/ pejabat setingkat yang ditugaskan oleh Pangkotama selaku Penanggung Jawab Keberhasilan Pelaksanaan (PKP) di tingkat Provinsi mengkoordinasikan dan mengendalikan unsur-unsur Angkatan yang dilibatkan;

b) PKP dapat menugaskan pejabat di dalam lingkup Komandonya sebagai Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TMMD;

c) mengkoordinasikan rencana pelaksanaan kegiatan TMMD kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait sesuai strata;

d) menyusun pembentukan Satgas TMMD; dan

e) mengeluarkan perintah kepada satuan jajaran.

5) Satkowil (Tingkat Kabupaten/Kota).

a) Komandan Satuan Komando Kewilayahan TNI di tingkat Kabupaten/Kota atau pejabat setingkat yang ditugaskan selaku Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) oleh PKP mengoordinasikan rencana pelaksanaan kegiatan TMMD kepada pemerintah dan instansi terkait sesuai strata;

b) menyiapkan personel, materiil dan perlengkapan Satgas TMMD yang diperlukan; dan

c) mengeluarkan perintah kepada satuan jajaran.

6) Satnonkowil.

a) Pemimpin Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Satnonkowil TNI selaku satuan tugas pelaksana kegiatan TMMD, disebut Komandan Satuan Setingkat Kompi (Dan SSK);

b) mengoordinasikan rencana pelaksanaan kegiatan TMMD kepada pemerintah dan instansi terkait setempat sesuai strata; dan

c) menyiapkan personel, materiil dan perlengkapan Satgas TMMD yang diperlukan.

b. Tahap Persiapan.

1) Mabes TNI. PJU melakukan pengawasan dan pengendalian keberhasilan pelaksanaan kegiatan TMMD secara umum.

2) Mabes Angkatan.

a) PJO melanjutkan koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait guna mendukung kelancaran kegiatan TMMD; dan

b) PJO melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan TMMD secara operasional.

3) Kotama.

a) PKO menindaklanjuti koordinasi dengan pemerintah dan instsansi terkait di daerah guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan TMMD;

b) PKO menetapkan daerah sasaran serta kegiatan sesuai prioritas yang ditetapkan Mabes Angkatan dan telah dikoordinasikan dengan Gubernur/Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab pembangunan di daerah; dan

c) PKO melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan TMMD secara taktis.

4) Satkowil (Tingkat Provinsi).

a) PKP menindaklanjuti koordinasi pelaksanaan kegiatan TMMD kepada Pemerintah Daerah sesuai strata;

b) PKP melaksanakan pengecekan akhir kesiapan Satgas TMMD; dan

c) PKP mengendalikan pelaksanaan kegiatan kegiatan TMMD di wilayahnya secara teknis.

5) Satkowil (Tingkat Kabupaten/Kota).

a) Dansatgas menindaklanjuti koordinasi tentang pelaksanaan kegiatan TMMD sesuai stratanya.

b) Dansatgas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan TMMD di wilayahnya; dan

c) Dansatgas membentuk Pos Komando Taktis di daerah sasaran kegiatan TMMD.

6) Satnonkowil.

a) Dan SSK mengoordinasikan secara terpadu pelaksanaan kegiatan TMMD kepada pemerintah setempat sesuai strata; dan

b) Dan SSK mengendalikan pelaksanaan kegiatan TMMD sampai batas waktu yang telah ditentukan.

c. Tahap Pelaksanaan.

1) Mabes TNI. PJU melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan TMMD.

2) Mabes Angkatan. PJO melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan TMMD.

3) Kotama : PKO melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan TMMD.

4) Satkowil (Tingkat Provinsi) : PKP Mengendalikan kegiatan TMMD di wilayahnya.

5) Satkowil (Tingkat Kabupaten/Kota) : Dansatgas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan TMMD di wilayahnya dengan tugas TMMD Reguler. Melaksanakan kegiatan TMMD rutin yang diprogramkan setiap tahun anggaran sesuai waktu, sasaran dan dukungan logistik yang ditetapkan dalam rangka membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dan memperkokoh kemanunggalan TNI-Rakyat dengan :

   a) Kegiatan Sasaran Fisik. Segala usaha pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilaksanakan dengan prioritas perbaikan/pembangunan pada fasilitas umum fasilitas sosial dan bantuan kemanusiaan yang mempunyai nilai strategis.

   b) Kegiatan Sasaran Nonfisik. Segala usaha pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilaksanakan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan, bela negara dan cinta tanah air serta meningkatkan keterampilan masyarakat guna mendukung ketahanan wilayah.

6) Satnonkowil. Dan SSk melaksanakan dan mengendalikan kegiatan TMMD sesuai perintah Dansatgas sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

d. Tahap Pengakhiran.

1) Mabes TNI.

a) PJU menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan TMMD; dan

b) PJU melaksanakan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan TMMD yang telah dilaksanakan.

2) Mabes Angkatan.

a) PJO melaksanakan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan TMMD yang telah dilaksanakan;

b) PJO membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan TMMD; dan

c) PJO mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan TMMD kepada PJU.

3) Kotama.

a) PKO menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan TMMD;

b) PKO melaksanakan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan TMMD yang telah dilaksanakan; dan

c) PKO mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan TMMD kepada PJO.

4) Satkowil (Tingkat Provinsi).

a) PKP menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan TMMD;

b) PKP melaksanakan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan TMMD yang telah dilaksanakan; dan

c) PKP mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan TMMD kepada PKO.

5) Satkowil (Tingkat Kabupaten/Kota).

a) Dansatgas membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan TMMD.

b) Dansatgas melaksanakan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan TMMD yang telah dilaksanakan; dan

c) Dansatgas mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan TMMD kepada PKP.

6) Satnonkowil. Dan SSK melaksanakan evaluasi dan memberikan saran serta masukan yang berkaitan dengan pelaksanaan TMMD untuk perbaikan TMMD dimasa mendatang.

4.1.4. **Desa Rabak Kecamatan Rumpin.**

Program TMMD ke-102 tahun 2018 dilaksanakan di Kampung Cijantur, Desa Rabak, Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Memiliki 267 KK berdasarkan data pada tahun 2017, Kampung Cijantur memiliki lima rukun tetangga (RT) dalam satu Rukun warga (RW) yakni RT 01,02,03,04, dan 05/RW 06. Berjarak 3,7 Km dari pusat pemerintahan daerah Kabupaten Bogor di Cibinong, Kampung Cijantur berlokasi diatas bukit dengan jalan tanah yang berukuran satu meter ditambah medan berliku yang licin serta menanjak. Kondisi tersebut sangat menyulitkan warga, terutama jika ada warga yang sakit dan perlu dibawa ke rumah sakit terdekat. Warga harus bersusah payah menuruni bukit dengan menggotong warga yang sakit karena belum adanya akses jalan yang bisa dilalui mobil ambulans.

Sebagian besar wilayah Desa Rabak adalah persawahan yang subur, serta terletak di kaki pegunungan di antaranya Gunung Suling, Gunung Munara, dan lain-lain. Penduduk Desa Rabak berdasarkan data terakhir hasil Sensus Penduduk Tahun 2015 tercatat sebanyak jiwa, terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan jumlah kepala keluarga. Mata pencaharian masyarakat Desa Rabak mayoritas adalah petani, peternak, dan buruh di

perusahaan yang ada di Desa Rabak di antaranya peternakan sapi, ayam dan pertambangan batu gunung. Sebagian besar wilayah Desa Rabak adalah persawahan yang subur, serta terletak di kaki pegunungan di antaranya Gunung Suling, Gunung Munara, dan lain-lain.

Berlatarbelakang kondisi sosial kemasyarakatan yang dialami warga Kampung Cijantur, Kodim 0621/Kabupaten Bogor wilayah Korem 061/Suryakancana, langsung bergerak turun ke lokasi dan mensurvei kondisi wilayah sebagai sasaran kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-102 tahun 2018.

Berdasarkan dokumen perencanaan TMMD ke-102 tahun 2018 Implementasi program TMMD mulai proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran/evaluasi sebagai berikut :

a. **Tahap Perencanaan.**
   1) Rapat koordinasi awal Pokja TMMD Kab.Bogor;
   2) Pemilihan lokasi TMMD.
   3) Peninjauan awal lokasi TMMD.
   4) Pendataan hasil survey lokasi TMMD.
   5) Perencanaan sasaran kegiatan TMMD.
   6) Penyusunan rencana kegiatan TMMD.

b. **Tahap Persiapan.**
   1) Rapat koordinasi akhir Pokja TMMD Kab. Bogor.
   2) Peninjauan akhir lokasi TMMD.
   3) Penentuan sasaran TMMD.
   4) Pembuatan rencana kegiatan TMMD.
   5) Penyuluhan terhadap masyarakat di desa lokasi TMMD.
   6) Penyiapan sarana prasarana dan inventaris material.
   7) Penyiapan tenaga (Personel) TNI, Dinas Instansi, OKP (Ormas) dan masyarakat.

8) Pra TMMD dilaksanakan tanggal 27 juni s.d 9 Juli 2018
9) Menyiapkan tempat upacara pembukaan dan tempat pasukan SSK

c. **Tahap Pelaksanaan.**

1) Upacara pembukaan TMMD :
   a) Waktu : Tanggal 10 Juli 2018;
   b) Tempat : Ds Rabak Kec Rumpin; dan
   c) Irup : Bupati Bogor.
2) Pelaksanaan TMMD tanggal 10 Juli s.d 8 Agustus 2018
3) Rencana pengerahan tenaga (tiap hari).
   a) Satuan SSK :110 orang;
   b) Satuan TNI pendukung : 25 orang;
   c) Dinas/Instansi/jawatan/pemda : 25 orang;
   d) OKP/Ormas : 50 orang; dan
   e) Masyarakat hadir : 150 orang.
4) Upacara penutupan TMMD :
   a) Waktu : 8 Agustus 2018;
   b) Tempat : Ds Rabak Kec Rumpin; dan
   c) Irup : Bupati Bogor.

d. **Tahap Pengahiran.**

1) Inventarisasi perlengkapan/material yang digunakan;
2) Penyerahan hasil TMMD kepada masyarakat;
3) Lokakarya dan evaluasi hasil TMMD yang dicapai dan tindak lanjut pemeliharaan/pengembangan;
4) Laporan hasil kegiatan TMMD ke satuan atas; dan
5) Pengembalian satuan SSK dan sarana/prasarana yang dipinjam.

Sasaran kegiatan TMMD di Kampung Cijantur, Desa Rabak, Kecamatan Rumpin, yaitu pembangunan fisik jalan sepanjang 3,7 KM, pengerasan jalan 4 meter, pelebaran bahu jalan 7 meter, pemasangan gorong-gorong di tiga titik, renovasi rutilahu 3 unit plus tambahan dua rumah, pembuatan mushola dan Poskamling satu unit. Selain pembangunan fisik, dilakukan juga pembangunan non fisik berupa penyuluhan bela negara, wawasan kebangsaan, pelayanan kesehatan, pelayanan KB, pendidikan, agama, penyuluhan bahaya narkoba dan pertanian. Kegiatan TMMD ini, dilaksanakan selama 30 hari dimulai dari tanggal 10 Juli hingga 8 Agustus 2018. Personil yang terlibat 150 orang yang terdiri dari satuan unsur TNI AD, Lanud ATS, Yonif 310, Armed 105 Tarik Cipanas, Polisi, aparatur daerah dan masyarakat sekitar.

4.1.5 **Desa Kiarapandak kecamatan Sukajaya.**

Sesuai data statistik desa Kiarapandak memiliki penduduk dengan jumlah 6450 orang yang terdiri dari ± 3330 orang laki-laki dan ± 3120 orang perempuan. Dari jumlah tersebut, termasuk kelompok tenaga kerja dengan umur 15 tahun keatas hanya berjumlah ± 355 orang. Mata pencaharian penduduk desa Kiarapandak mayoritas petani dengan jumlah ± 440 orang dan buruh tani ± 87 orang. Bekerja di sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perdagangan di luar daerah ± 250 orang.

Berdasarkan dokumen rencana kegiatan TMMD tahun 2016, Program TMMD ke-97 dilaksanakan di Bukit Pasir Gocap Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor. Implementasi program TMMD mulai proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran/evaluasi sebagai berikut :

a. **Tahap Perencanaan.** Proses perencanaan melalui sistem *Bottom Up planning* secara selektif, diawali dari penyerapan aspirasi masyarakat dan mencermati proposal yang diajukan oleh Desa Kiarapandak dan Desa Pasirmadang Kec. Sukajaya Kab. Bogor, ditinjau dari berbagai aspek kepentingan baik kesejahteraan maupun pertahanan.

1) Sosialisasi dan penjelasan tentang Urgensinya kegiatan TMMD dan menentukan urut-urutan kegiatan.

2) Menerima dan menimbang usul saran dari Instansi atau unsur terkait dan tokoh masyarakat.

3) Menyusun rencana umum kegiatan TMMD ke-97 TA. 2016 dan melaporkan atau mengirimkan rencana umum ke Komando atas.

4) Menyelenggarakan rapat koordinasi dan peninjauan lokasi sasaran kebutuhan personel dan materiil serta kemampuan swadaya masyarakat desa dalam mendukung kegiatan pelaksanaan TMMD ke-97 TA. 2016. dan

5) Mempelajari dan memprediksi kemungkinan hambatan yang akan ditemui dalam pelaksanaan di lapangan.

b. **Tahap persiapan.** (Minggu III Agustus s.d Minggu II September 2016).

1) Melaksanakan rapat koordinasi persiapan TMMD ke-97 TA. 2016.

2) Melaksanakan kegiatan Pra TMMD mulai H-15 s.d H-1.

3) Dari H-12 s.d hari H–5 mengadakan koordinasi lanjutan dengan aparat

terkait, penataran Posko dan persiapan-persiapan lainnya.

4) Menyelenggarakan rapat persiapan akhir pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan TMMD ke-97 TA. 2016, dan

5) Hari H-4 s.d hari H-2 penyempurnaan rencana kegiatan dan rencana Serpas.

c. **Tahap pelaksanaan.**(Tanggal 20 Sept s.d 19 Okt 2016).

1) Pada hari "**H**" Upacara pembukaan dan penyerahan bahan kontak :

a) Hari : Selasa;

b) Tanggal : 20 September 2016;

c) Pukul : 09.00 WIB s.d selesai;

d) Tempat : Lapangan Desa Kiarapandak Kec. Sukajaya Kab. Bogor wilayah Koramil 2118/Cigudeg Kodim 0621/Kab. Bogor.

e) Irup : Bupati Bogor (Sesuai Juk Ko Atas).

2) Selesai upacara dilanjutkan Expose TMMD ke-97 TA. 2016.

3) Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal kegiatan mulai dari H+1 s.d H+29 (selama 30 hari) meliputi kegiatan yang bersifat Fisik dan Non Fisik.

d. **Tahap Pengakhiran.** (Tanggal 20 s.d 30 Oktober 2016).

1) Melaksanakan konsolidasi dan rehabilitasi serta pengembalian alat-alat perlengkapan yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan TMMD.

2) Penyelesaian administrasi dan pengamatan daerah sasaran tentang tanggapan masyarakat dan menghimpun bahan-bahan evaluasi kegiatan, serta melaksanakan Serpas kembali satuan induk masing-masing.

3) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan TMMD ke-97 TA. 2016 dan mengirimkan kepada Danrem 061/Sk selaku PKP, Pangdam III/Slw selaku PKO dengan tembusan Bupati Bogor dan Ses PJO TMMD.

Dalam pelaksanaannya warga bersama prajurit TNI bekerjasama melakukan pengerasan jalan. Pengerasan jalan ini dimulai dari Desa Kiarapandak-Pasirmadang, Kecamatan Sukajaya, dilakukan oleh prajurit TNI dan warga dari 11 desa. yang ada di Kecamatan Sukajaya. Dalam TMMD ini dilaksanakan pula pembangunan infrastruktur lain yaitu pembuatan dan rehab jembatan, pembuatan tanggul dan gorong-gorong termasuk pembangunan sarana sanitasi serta pusat kegiatan masyarakat. Selain sasaran fisik, dilaksanakan juga sasaran non fisik yaitu penyuluhan tentang BPJS oleh dinas kesehatan Kab Bogor, penyuluhan tentang pertanian dan kehutanan oleh dinas pertanian dan kehutanan Kab Bogor, penyuluhan tentang E-Ktp dan akta kelahiran oleh Pemda Kab Bogor serta penyuluhan tentang narkoba oleh Polres Kab Bogor.

TMMD dilaksanakan selama 30 hari dengan melibatkan sebanyak 104 personel TNI dari berbagai kesatuan di wilayah Korem 061/Surya Kencana, dibantu masyarakat bahu membahu menyelesaikan sasaran fisik dan non fisik. Dua unit kendaraan berat yakni exavactor dan dozer dikerahkan untuk menyelesaikan sasaran fisik. TMMD juga merehab dua rumah warga masyarakat diantaranya rumah Aman warga Kampung Wates RT 04/04, dan rumah Ahyadi warga Kampung Pasir Walang RT 04/02 Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya. Hal ini merupakan rangkaian Kegiatan bedah rumah dalam program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) yang dilaksanakan secara gotong-royong dengan masyarakat.

4.1.6. **Desa Banyuasih kecamatan Cigudeg.**

Desa Banyuasih adalah desa yang tertinggal dari berbagai aspek kehidupan dan jauh secara geografis dengan pusat pemerintahan. Saat malam hari, terdengar suara burung serta gemerciknya aliran Sungai Cipinang yang berjarak sekitar 300 meter. Tidak seperti desa lainnya, Desa

Banyuasih Kecamatan Cigudeg salah satu desa yang masuk desa terisolasi. Desa ini belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Mungkin inilah alasan mengapa pembangunan Desa Banyuasih sedikit lambat dibandingkan dengan desa-desa yang berada di Kecamatan Cigudeg. Akses jalan menuju desa yang masih berupa tanah berbatuan dan terbatasnya fasilitas umum yang tersedia merupakan bukti tertinggalnya desa tersebut.

Jumlah penduduk Desa Banyuasih sampai dengan akhir bulan Juli 2016 tercatat 6.320 jiwa yang terdiri dari laki-laki : 3.396 jiwa dan perempuan : 2.951 jiwa. (Profil Desa Banyuasih tahun 2016, Dokumen tidak dipublikasikan)

Grafik 4.4 : Penduduk Desa Banyuasih Berdasarkan Usia
Sumber: BogorKab BPS, 2017.

Berdasarkan data grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa penduduk dengan rentang usia 10-14 tahun merupakan penduduk terbanyak yakni 810 jiwa. Sementara itu, penduduk dengan usia 70 tahun ke atas merupakan penduduk yang paling sedikit yakni 59 jiwa. Penduduk Desa Banyuasih berdasarkan mata pencaharian didominasi oleh petani sebanyak 1.331 jiwa.(ibid) Dengan kata lain, profesi tersebut memiliki persentase 72,85% dari

keseluruhan profesi. Sedangkan penduduk dengan mata pencaharian yang paling sedikit adalah pekerja di bengkel sebanyak 2 jiwa atau hanya sekitar 0,1% saja dari keseluruhan profesi.

Grafik 4.5 : Penduduk Desa Banyuasih Berdasarkan Mata Pencarian
Sumber: BogorKab BPS, 2017.

Desa Banyuasih merupakan daerah agraris. Sebagian desa ini merupakan lahan pertanian dan perkebunan, tetapi lahan tersebut tidak dimiliki sepenuhnya oleh masyarakat Banyuasih melainkan dimiliki oleh beberapa perusahan-perusahan yang berinvestasi di sana. Masyarakat hanya sebagai buruh tani dari lahan tersebut. Sebagian masyarakat Banyuasih berprofesi sebagai buruh, baik itu buruh tani atau buruh pabrik yang tak jauh letaknya dari Desa Banyuasih. Dengan demikian, dapat katakan bahwa tingkat ekonomi masyarakat Banyuasih secara mayoritas adalah menengah ke bawah sehingga mereka hidup dalam keterbatasan dan seadanya, baik dalam hal sandang, pangan dan papan.

Program TMMD ke-94 tahun 2014 dilaksanakan di desa Banyuasih Kec.Cigudeg dengan sasaran fisik membuka jalan tembus Kp.Cijambe ke Kp.Cilangkap Desa Banyu Asih, dengan jarak 4,5 Km, selain itu pembuatan parit sepanjang 4,5 Km, pemasangan gorong-gorong 12 buah, perkerasan

badan jalan 750 meter, renovasi mushola dan perbaikkan rumah tidak layak huni. Program TMMD ini melibatkan 150 orang personil TNI dan pelaksanaan kegiatan TMMD berlangsung selama 21 hari. Implementasi program TMMD mulai proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran/evaluasi berjalan sebagai berikut :

a. **Tahap Perencanaan**. Proses perencanaan melalui sistem *Bottom Up planning* secara selektif, diawali dari penyerapan aspirasi masyarakat dan mencermati proposal yang diajukan oleh Desa Banyuasih, ditinjau dari berbagai aspek kepentingan baik kesejahteraan maupun pertahanan.

1) Sosialisasi dan penjelasan tentang Urgensinya kegiatan TMMD dan menentukan urut-urutan kegiatan.

2) Menerima dan menimbang usul saran dari Instansi atau unsur terkait dan tokoh masyarakat.

3) Menyusun Rencana Umum kegiatan TMMD ke-93 TA. 2014 dan melaporkan atau mengirimkan Rencana umum ke Komando atas.

4) Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan peninjauan lokasi sasaran kebutuhan personel dan materil serta kemampuan swadaya masyarakat desa dalam mendukung kegiatan pelaksanaan melaksanakan TMMD ke-93 TA. 2014, dan

5) Mempelajari dan memprediksi kemungkinan hambatan yang akan ditemui dalam pelaksanaan di lapangan.

b. **Tahap persiapan** (Mgg ke III Agustus s.d Mgg ke Mgg ke IV Sept 2014).

1) Melaksanakan Rapat Koordinasi persiapan TMMD ke-93 TA. 2014.

2) Melaksanakan kegiatan Pra TMMD mulai H - 14 s.d H – 2.

3) Dari H-12 s.d hari H–5 mengadakan koordinasi lanjutan dengan aparat

terkait, penataran Posko dan persiapan-persiapan lainnya.

4) Menyelenggarakan Rapat persiapan akhir pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan TMMD ke-93 TA. 2014. dan

5) Hari H – 4 s.d hari H – 2 penyempurnaan rencana kegiatan dan Rencana Serpas (pergeseran pasukan).

c. **Tahap pelaksanaan** (Tanggal 09 s.d 29 Oktober 2014).

1) Pada hari "H" Upacara pembukaan dan penyerahan Bahan Kontak :

a) Hari : Hari "H".

b) Tanggal : 09 Oktober 2014.

c) Pukul : 09.00 WIB.

d) Tempat : Desa Banyuasih Kec. Cigudeg Kab. Bogor wilayah Koramil 2118/Cigudeg Kodim 0621/Kab.Bogor

e) Irup : Danrem 061/SK

2) Selesai Upacara dilanjutkan Expose TMMD ke-93 TA. 2014.

3) Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal kegiatan mulai dari H + 1 s.d H + 20 meliputi kegiatan yang bersifat Fisik dan Non Fisik.

d. **Tahap Pengakhiran** (Tanggal 30 Oktober s.d 6 November 2014).

1) Melaksanakan konsolidasi dan rehabilitasi serta pengembalian alat-alat perlengkapan yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan TMMD.

2) Penyelesaian administrasi dan pengamatan daerah sasaran tentang tanggapan masyarakat dan menghimpun bahan-bahan evaluasi kegiatan, serta melaksanakan Serpas kembali satuan induk masing-masing.

3) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan TMMD ke-93 TA. 2014 dan mengirimkan kepada Danrem 061/Sk selaku PKP, Pangdam III/Slw selaku PKO dengan tembusan Bupati Bogor dan Ses PJO TMMD.

4.2 **Hasil Penelitian**

Penelitian ini mengangkat fenomena yang sering terjadi pada saat pelaksanaan program TMMD yaitu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat padahal TMMD adalah program terpadu lintas sektoral yang dilakukan TNI bersama masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam rangka membantu pemerintah memberdayakan wilayah pertahanan dengan tujuan meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah, membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional di wilayah Kab. Bogor, untuk dijadikan sebagai kekuatan pertahanan. Ditambah lagi dengan memudarnya semangat gotong-royong dan kerja bakti di tengah masyarakat pada era milineal ini. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan yaitu : 1) Bagaimana implementasi program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat? 2) Bagaimana hasil implementasi program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat. Dari hasil pengumpulan data melalui survei, wawancara, dan didukung dengan pengumpulan data melalui observasi, serta studi dokumentasi, maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut.

4.2.1. **Implementasi program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat**.

Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh

individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Mengacu pada uraian tersebut dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumya. Keberhasilan suatu program kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan yang akan mempengaruhi implementasi dari program tersebut. Konsep yang mengarah pada efektivitas implementasi program atau kebijakan adalah pencapaian sasaran-sasaran program kebijakan yang dikemukakan dalam teori Implementasi oleh George Edwards III (George C (edited), *et al.*1990 : hal 149-154).

Partisipasi masyarakat adalah sesuatu melibatkan masyarakat bukan hanya kepada proses pelaksanaan kegiatan saja, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam hal perencanaan dan pengembangan dari pelaksanaan program tersebut, termasuk menikmati hasil dari pelaksanaan program tersebut. Lebih lanjut secara sederhana partisipasi masyarakat adalah keterlibatan seseorang (individu) atau sekelompok masyarakat secara sukarela, dalam suatu kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai kepada proses pengembangan kegiatan atau program tersebut. Untuk mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat maka partisipasi masyarakat dalam implementasi program TMMD harus nyata. Baik kwantitas maupun kwalitas harus nyata terlihat dalam implementasi program TMMD tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, maka partisipasi masyarakat di pengaruhi oleh peran dan partisipasi Pemda, regulasi atau perda, pelaksanaan sosialisasi, partisipasi masyarakat itu sendiri baik pada saat

pelaksanaan maupun menentukan sasaran fisik dan non fisik, kondisi masyarakat pasca pelaksanaan program.

Peran dan partisipasi Pemda terhadap program TMMD.

Wawancara dengan Bupati Kabupaten Bogor, bahwa peran dan partisipasi Pemda dalam kegiatan TMMD, semua stake holder unsur perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor ikut berperan aktif dalam menunjang keberhasilan TMMD, baik sasaran kegiatan fisik maupun non fisik dimana Bupati berkedudukan sebagai pelindung dalam Tim Assistensi tingkat Kabupaten. TMMD adalah program kegiatan TNI dan Pemerintah daerah Kabupaten Bogor berperan sebagai penunjang dan memfasilitasi kelancaran kegiatan TMMD di masing-masing daerah.

Lain halnya wawancara yang sepaham dengan Kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (Kadis PMPD) serta Kepala dinas Pekerjaan Umum (Kadis PUPR) mengatakan bahwa sesuai surat edaran Mendagri Pemda sangat mendukung program tersebut karena pernah diadakan sosialisasi dengan instansi terkait serta diberikan arahan-arahan mekanisme dalam program tersebut. Respon Pemerintah daerah dan masyarakat Kab Bogor terhadap program TMMD cukup baik. Peran dan partisipasi Pemda wajib mengalokasikan dukungan anggaran APBD. Dasar hukumnya surat Mendagri tersebut. Kalau Pemda menolak, harus punya alasan yang kuat, memberi laporan kepada Mendagri dengan tembusan Kasad, Karena aturannya cukup jelas dari Mendagri. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan pemilihan desa tertinggal, terpencil, kumuh, rawan terhadap bencana alam, dan memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang layak untuk dikembangkan. Walaupun tidak ada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor yang secara khusus diterbitkan dalam mendukung program TMMD, karena TNI merupakan instansi vertical bagi Pemerintah daerah Kabupaten Bogor, yang memiliki peraturan

perundang-undangan yang berbeda dalam penyusunan program, perencana kegiatan, pengelolaan keuangan dan lain sebagainya. Kegiatan TMMD dilaksanakan karena ada keterkaitan dalam tugas pokok dan fungsi bersama Pemerintah daerah.

Selanjutnya Pasiter Kodim, Danramil Cigudeg dan Danramil Rumpin mengatakan bahwa Pemkab Bogor sangat mendukung peran TMMD yang dilaksanakan, Kodim 0621/Kab Bogor, karena kami pernah sosialisasi, khususnya kepada masyarakat kabupaten Bogor, kampung/daerah yang akan dilaksanakan program TMMD wajib diadakan sosialisasi tentang mekanisme pekerjaan TMMD tersebut. Respon Pemerintah daerah dan masyarakat sangat bagus untuk masyarakat daerah yang terisolir sangat mengharapkan kegiatan TMMD dari TNI, mengingat desa tersebut membutuhkan akses untuk kebutuhan masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dan pelibatan masyarakat pada dasarnya mendukung, namun pada daerah tertentu masyarakat kurang optimal karena banyak warga merantau ke kota untuk bekerja. Namun masyarakat yang ada membantu pelaksanaan kegiatan TMMD tersebut. Kehadiran masyarakat wajib, untuk pengendalian masyarakat dalam kedatangannya dibagi per-RT atau per-kampung.

Camat Cigudeg dan tiga Kepala Desa yaitu desa Rambak, Kiara Pandak dan Banyuasih juga mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor sangatlah mendukung program TMMD yang dilakukan oleh satuan Kodim 0621/Bogor. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan anggaran APBD setiap tahun sebagai bentuk partisipasi dari Pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Karena TMMD sangat membantu meningkatkan Pembangunan di Kabupaten Bogor terutama di Kecamatan Cigudeg yang sudah dilaksanakan pada tahun 2014. Pernah menerima sosialisasi tentang TMMD.

Berdasarkan hasil wawancara dari para pejabat bahwa peran dan partisipasi pemda terhadap program TMMD adalah cukup baik hal ini dikarenakan bahwa terdapat alokasi anggaran APBD setiap tahun, serta di dukung oleh masing –masing instansi yang terkait dengan peran dan parsipisasinya.

Pemda Kabupaten Bogor tidak mempunyai regulasi (Perda).

Wawancara dengan Bupati Kabupaten Bogor mengatakan bahwa secara aturan tidak tersurat dalam Perda, akan tetapi secara hubungan Vertikal antara Pemda Kabupaten Bogor dengan unsur TNI dalam hal ini Kodim 0621/Kab. Bogor, Pemda Kabupaten Bogor memberikan dukungan melalui hibah bantuan keuangan kegiatan TMMD.

Berdasarkan hasil wawancara dari pejabat bahwa Pemda Kabupaten Bogor tidak mempunyai regulasi (Perda), namun tetap mendukung dan membantu program TMMD.

Korem 061/SK pernah melaksanakan sosialisasi.

Wawancara dengan Paban V/Bhakti TNI Ster, Paban V/ Bhakti TNI dan Komandan Korem 061SK (Danrem 061/SK) mengatakan pernah melaksanakan sosialisasi, dan sosialisasi Program TMMD dilaksanakan secara terus menerus setiap tahunnya pada pelaksanaan Rapat Koordinasi penyelenggaraan TMMD dan Rapat Paripurna TMMD sebagai evaluasi pelaksanaan TMMD tahun berjalan serta rencana penyelenggaraan TMMD tahun dan melibatkan sosialisasi dengan melibatkan Kementerian/LPNK, Pemda dan instansi terkait lainnya

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat dari Korem 061/SK bahwa Korem 061/SK pernah melaksanakan sosialisasi dengan materi cara-cara dan tekhnis pelaksanaan TMMD dilapangan termasuk aspek partisipasi masyarakat dan menurutnya sebaiknya diadakan sosialisasi dengan

melibatkan Kementerian/LPNK, Pemda dan instansi terkait lainnya. Pelaksanaan sosialisasi dijajaran Korem 061/SK dilaksanakan oleh seluruh Kodim dijajaran Korem 061/SK termasuk diantaranya Kodim 0621/Kab Bogor.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program TMMD.

Wawancara dengan Pasiter Kodim menyatakan bahwa masyarakat dilibatkan berdasarkan pengajuan/proposal yang di tujukan dari desa yang akan dilaksanakan program TMMD. Pengajuan usul dan saran tersebut sesuai kebutuhan masyarakat seperti membuat jalan, apabila melintasi sungai bisa dibuat jembatan. Membuat proposal melalui kesepakatan masyarakat dengan RT,RW, dilanjutkan ke desa, kecamatan dan koramil berupa surat permohonan, ditujukan kepada Dandim, dan Pemerintah daerah dengan keluhan masyarakat setempat. Pemda mau mengucurkan dana TMMD untuk mengembangkan daerah yang terisolir, agar daerah tersebut menjadi lebih maju. Partisipasi masyarakat setiap hari, sesuai dengan lokasi atau wilayah. Pada wilayah wilayah tertentu partisipasi masyarakat cukup baik seperti pada tahun 2018 di wilayah desa Rabak. Namun di beberapa daerah tertentu seperti pada tahun 2014 di desa Banyuasih partisipasi masyarakat kurang optimal karena masyarakat banyak yang bekerja di luar desa terutama di Jakarta. Kalau siang masyarakat keluar desa merantau. Kendalanya sudah dijadwalkan namun dengan berkoordinasi pada instansi terkait atau yang ditunjuk sehingga sangat membantu dalam pekerjaan.

Danramil Cigudeg sepaham dengan Danramil Rumpin juga mengatakan partisipasi tergantung wilayahnya, biasanya daerah terpencil dan terisolir masyarakatnya banyak yang merantau, sehingga didea tersebut hanya ada ibu dan kakek serta anak kecil (usia tidak produktif). Kalau melihat dari perencanaan, masyarakat dilibatkan dalam rapat koordinasi yang dilakukan Kodim, selalu mengundang dan melibatkan masyarakat, hanya

saja tidak semua masyarakat, masyarakat diwakilkan kepada tomas, toga, todat dan pemuda. Sebelum Kodim mengundang rapat koordinasi, saya juga mengundang ke Koramil sebelumnya supaya masyarakat satu suara. Selama pelaksanaan TMMD masyarakat selalu hadir sesuai jadwal yang telah dibuat. Tingkat kehadiran masyarakat berbeda-beda sesuai kondisi wilayah. Pada tahun 2014 di desa Banyuasih sangat minim, demikian juga pada tahun 2016 di desa Kiarapandak karena masyarakat pada kedua daerah tersebut banyak yang merantau ke Jakarta. Sehingg dilihat dari kehadiran masyarakat tiap hari rata-rata kurang dari 40-50 orang.

Selanjutnya tokoh mayarakat desa Rabak, sepaham dengan tokoh masyarakat desa Banyuasih dan tokoh masyarakat desa Kiarapandak yang mengatakan bahwa Desa Kiarapandak pernah melaksanakan TMMD satu kali pada tahun 2016. Partisipasi masyarakat pada dasarnya baik, masyarakat dilibatkan dalam pengerjaan korve batu. Ada yang dilibatkan dalam pemasangan batu. Masyarakat desa Kiarapandak sangat antusias membantu pelaksanaan TMMD dan diarahkan oleh kepala desa dan para tokoh masyarakat desa Kiarapandak. Hanya saja kehadiran masyarakat tidak optimal karena karena banyak yang merantau bekerja di luar daerah. Oleh karenanya masyarakat diatur perhari secara bergilir dari beberapa desa di sekitarnya dengan sisitim arisan, antusias masyarakat cukup baik. Hal ini disebabkan masyarakat pernah menerima sosialisasi tentang TMMD pada saat sebelum pra TMMD. Untuk seluruh masyarakat desa Kiarapandak semuanya terlibat dalam pelaksanaan TMMD dan dijadwal per-RW secara giliran. Tiap orang mendapat giliran 1 kali setiap 6-7 hari dengan melibatkan masyarakat di sebelas desa. Pekerjaan rutin mereka tinggalkan sementara untuk 1 hari tersebut. Jika ada masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan TMMD disebabkan ada yang ijin, sakit atau ada keperluan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan, nanti pada gelombang berikutnya bisa hadir. Untuk kegiatan non fisik, dilakukan malam hari, diatur secara bergilir antara

masyarakat yang ikut kegiatan non fisik dan kegiatan fisik membantu TNI sebagai pelaksana. Intinya kesadaran masyarakat Kiarapandak untuk gotong royong sebenarnya baik. Hal ini tidak lepas dari peran Kades sebagai pemotivasi warga untuk membantu selama program TMMD agar tertib, lancar dan aman serta merawat hasil TMMD yang sudah dilaksanakan**.** Ini dikarenakan komunikasi dan sikap perilaku prajurit TNI dengan masyarakat selama kegiatan TMMD di desa Kiarapandak sangat baik, ramah dan bisa berbaur dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber tersebut bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan TMMD tergantung pada wilayah dan daerah tertentu, seperti TMMD tahun 2018 di desa Rabak partisipasi masyarakat cukup baik, namun pada TMMD tahun 2014 di desa Banyuasih dan TMMD tahun 2016 di desa Kiarapandak kehadiran masyarakat belum optimal karena masyarakat banyak yang merantau. Masyarakat selalu hadir sesuai jadwal yang telah dibuat intinya pelibatannya cukup baik dan sangat antusias membantu pelaksanaan TMMD, namun secara kwantitas jumlah nya tidak optimal karena banyak yang merantau ke luar desa.

Partisipasi masyarakat dalam menentukan sasaran fisik dan non fisik program TMMD.

Wawancara dengan Paban Bakti TNI Ster Mabes TNI, mengatakan masyarakat berpartisipasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan

a. Masyarakat melaksanakan musyawarah desa dalam rangka menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan

b. Masyarakat membuat proposal pengajuan kegiatan TMMD

c. Bersama TNI dan SKPD terkait melaksanakan survey lokasi

d. Bersama SKPD terkait membuat RAB kegiatan

e. Bersama TNI melaksanakan kegiatan TMMD

f. Swadaya masyarakat berupa konsumsi dan tenaga.

Sedangkan Paban V/Bhakti TNI Sterad mengatakan bahwa untuk menentukan sasaran fisik dan non fisik yang dilaksanakan dalam TMMD sudah ada ketentuannya sebagaimana tertuang di dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan TMMD tahun 2018. Ketentuan dalam pemilihan sasaran TMMD diutamakan di daerah 3T, yaitu terisolir, terdepan dan terpencil. Daerah-daerah tersebut harus diusulkan secara *Bottom Up* sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga hasil dari pelaksanaan TMMD benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat dalam meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan kita selalu mengeluarkan ST sebagai penekanan maupun perintah pelaksanaan kegiatan. Seluruh satuan Kowil pasti sudah paham dan sudah tahu ketentuan tersebut. Termasuk dengan instansi vertikal juga sudah kami sampaikan melalui sosialisasi dalam Rapat Koordinasi Tekhnis (Rakornis) Penyelenggaraan TMMD yang diadakan setiap tahun dengan mengundang seluruh Dandim, Bupati, Danrem, Pangdam dan Gubernur seluruh Indonesia. Kalau setiap Dandim melaksanakan ketentuan tersebut dalam perencanaan TMMD maka itu berarti masyarakat terlibat dalam menentukan sasaran fisik dan non fisik TMMD. Masyarakat memberikan respon yang positif terhadap kehadiran TMMD diwilayahnya hal ini berdasarkan testimoni langsung tim wasev TMMD pada saat di lapangan sedangkan partisipasi masyarakat sangat baik dan mendukung program TMMD yang sasaran fisiknya benar-benar yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat, sedangkan untuk sasaran fisik yang kurang menyentuh kebutuhan masyarakat akan berdampak terhadap kurangnya partisipasi masyarakat.

Danrem 061/SK dan Dandim 0621/Kab Bogor mengatakan bahwa Partisipasi masyarakat lumayan baik, masyarakat memberi saran dan

masukan tentang sasaran fisik dan non fisik sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat dilibatkan sesuai ketentuan sebagaimana tertuang dalam buku pedoman penyelenggaraan TMMD tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Staf teritorial TNI AD yang menyatakan bahwa proses penentuan/pemilihan sasaran dilaksanakan dengan mekanisme secara terpadu dan terkoordinasi dimulai dari tingkat Desa atau Kelurahan melalui forum rapat LMD (Lembaga Musyawarah Desa) atau LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) dan BPD (Badan Pengawas Desa) atau Dekel (Dewan Kelurahan) atau yang sejenis lainnya. Hasil rapat di tingkat Desa/Kelurahan ini diajukan ke tingkat Kecamatan dalam diskusi UDKP (Unit Desa Kerja Pembangunan). Kemudian saran kegiatan yang terpilih diteliti dan dipadukan dengan rencana program pembangunan Pemda tingkat Kabupaten/Kota, serta dikoordinasikan dalam Rapat Rencana Pembangunan Daerah (Renbangda) selanjutnya diusulkan melalui rapat dengan DPRD untuk disahkan menjadi Program Pembangunan Daerah.

Menurut Pasiter Kodim bahwa pelibatan masyarakat dilibatkan berdasarkan pengajuan/proposal yang di tujukan dari desa yang akan dilaksanakan program TMMD, membuat jalan apabila melintasi sungai, bisa dibuat jembatan. Membuat proposal melalui kesepakatan masyarakat dengan RT,RW, dilanjutkan ke desa, kecamatan dan koramil berupa surat permohonan, ditujukan kepada Dandim 0621/Kab Bogor, dan Pemerintah daerah Kab Bogor dengan keluhan masyarakat setempat. Pemda mau mengucurkan dana TMMD untuk mengembangkan daerah yang terisolir, agar daerah tersebut menjadi lebih maju. Partisipasi masyarakat setiap hari, sesuai dengan yang sudah dijadwalkan dengan berkoordinasi pada instansi terkait atau yang ditunjuk sehingga sangat membantu dalam pekerjaan.

Kedua Danramil Cigudeg dan Danramil Rumpin menyatakan dalam menentukan lokasi yang akan dilaksanakan harus benar-benar tepat sasaran sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat, untuk itu masyarakat perlu

diajak bicara, perlu ditanya satu-persatu, disitulah peran Babinsa dan aparat desa, mulai dari dari kepala kampung, sampai ketua RW/RT. Partisipasi masyarakat dalam menentukan sasaran fisik dan non fisik baik. Masyarakat yang diwakili oleh ketua RT/RW dan tokoh masyarakat selalu dilibatkan dalam rapat koordinasi yang dilakukan apparat desa dan Koramil, selalu mengundang dan melibatkan masyarakat, hanya saja memang tidak semua masyarakat, hanya diwakilkan kepada tomas, toga, todat dan pemuda. Sebelum Kodim mengundang rapat koordinasi, Koramil juga mengundang ke Koramil sebelumnya supaya masyarakat satu suara dan pastinya untuk menentukan lokasi TMMD adalah tempat yang memang belum pernah tersentuh untuk kegiatan pengerjaan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat. Namun ketika usulan masyarakat dibawa oleh aparat desa ke kecamatan dan dari kecamatan ke Pemda untuk di bahas, biasanya usulan masyarakat desa suka kalah dengan usulan dari desa-desa lain. Kan yang mengusulkan pembangunan semua desa, bukan satu desa saja. Ini menjadi kewenangan dan pertimbangan Pemda, karena disesuaikan dengan program Pemda.

Wawancara dengan Camat Cigudeg bahwa Partisipasi masyarakat dalam mementukan sasaran fisik dan non fisik baik, masyarakat banyak memberi saran dan masukan tentang kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan masyarakat terkait sasaran fisik dan non fisik yang akan dikerjakan. Masyarakat memang perlu diajak bicara, perlu ditanya satu-persatu, Sasaran fisik yang akan dikerjakan, adalah sasaran yang benar-benar dibutuhkan masyarakat sehingga bermanfaat bagi kehidupan masyarakat namun pada kenyataannya masyarakat hanya ditanya dan dimintai saran masukan, sedangkan keputusan tentang sasaran fisik dan non fisik ada di tim tekhnis gabungan yang terdiri dari Kodim, Dinas PMPD dan Dinas PUPR diputuskan dalam rapat Musrenbangda tingkat Kabupaten, keputusan ada pada saat pembahasan rapat antar stake holder di Pemda yang dipimpin Bupati. Boleh-boleh saja masyarakat mengajukan saran dan

proposal, namun semuanya akan dipadukan dengan program Pemda. Ada kalanya usulan desa kalah prioritas dengan program Pemda khususnya Bupati yang memimpin pada saat itu.

Lain halnya wawancara dengan Kepala desa Banyuasih yang sepaham dengan Kepala desa Rabak serta Kepala desa Kiarapandak mengatakan partisipasi bahwa Partisipasi masyarakat dalam menentukan sasaran fisik dan non fisik program TMMD baik dan masyarakat cukup antusias, semua memberi saran dan masukan, karena memang di desa sarana prasarana masih minim. Namun dari beberapa saran tersebut tidak semua juga terpenuhi. Saran dan masukan masyarakat dibawa aparat desa ke Camat dan di Kecamatan nanti disaring lagi oleh Pak Camat baru di bawa ke Pemda Kabupaten. Kadang-kadang usulan desa kami kalah prioritas dengan usulan dari desa-desa lain, sehingga realisasinya lambat.

Selanjutkan Kepala desa Rambak, Kiara pandak dan Banyuasih, Intinya partisipasi masyarakat bagus dan sangat antusias. Ketika masyarakat ditanya sasaran fisik apa yang akan dipilih untuk dibangun, semua memberi saran dan masukan, karena memang di desa sarana prasarana masih minim. Namun kewenangan untuk memutuskan saran dan masukan tersebut berdasarkan rapat tim asistensi tekhnis gabungan bersama Kepala Desa. Untuk itulah peran Kepala Desa untuk menentukan yang prioritas dihadapkan dengan anggaran yang ada. Menentukan sasaran fisik dan non fisik benar-benar harus tepat sasaran sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat, untuk itu masyarakat perlu diajak bicara, perlu ditanya satu-persatu, mulai dari kepala kampung, sampai ketua RW/RT harus ditanyai saran dan masukannya. Sasaran fisik yang nantinya dipilih adalah sasaran yang harus benar-benar dibutuhkan masyarakat sehingga memudahkan kehidupan yang layak bagi masyarakat. Namun dari beberapa saran tersebut tidak semua juga terpenuhi. Saran dan masukan berupa hasil rapat musrenbangdes kita bawa ke Camat dan di Kecamatan nanti disaring lagi oleh Pak Camat baru di

bawa ke Pemda Kabupaten. Kadang-kadang usulan desa kami kalah prioritas dengan usulan dari desa-desa lain, sehingga realisasinya lambat.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber bahwa partisipasi masyarakat dalam menentukan sasaran fisik dan non fisik program TMMD sudah ada mekanismenya yang disebut dengan *Bottom Up Planning.* Mekanisme ini merupakan ketentuan dari Komando atas yang tertuang dalam buku pedoman penyelenggaraan TMMD tahun 2018/2019 yang dikeluarkan oleh Staf teritorial TNI AD, sehingga mulai dari tingkat Koramil sampe dengan Kodim sudah melakukannya dengan mengumpulkan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Usulan ini dibahas pada tingkat desa, kecamatan dan dibawa ke tingkat Pemda Kabupaten. Dan dibahas dalam rapat Musrenbangda Kabupaten. Mekanisme ini sudah berjalan sehingga dapat disimpulkan bahwa penentuan sasaran fisik dan non fisik sudah melibatkan partisipasi masyarakat.

Kondisi masyarakat setelah pelaksanaan TMMD

Bupati menjelaskan, dengan terbukanya akses jalan, memudahkan masyarakat untuk menjangkau tempat pelayanan di desa seperti kantor desa, sekolah, pasar dan puskesmas sehingga dapat merubah kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik.

Sepaham dengan Kepala Dinas PMPD Kabupaten Bogor dan Kadis PUPR Kabupaten Bogor, bahwa Kegiatan TMMD di lokasi-lokasi sasaran kegiatan merasakan manfaat yang nyata secara bertahap dalam peningkatan indeks pembangunan manusia dari segala bidang kehidupan bermasyarakat. Secara bertahap kondisi kesejahteraan sosial, ekonomi dan politik masyarakat berubah menjadi lebih baik, karena hasil dari kegiatan fisik dan non fisik yang membuat cara berfikir dan pola hidup masyarakat sedikit demi sedikit berubah dengan bertambahnya wawasan dan infrastruktur penunjang dari hasil kegiatan TMMD. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan pemilihan

desa tertinggal, terpencil, kumuh, rawan terhadap bencana alam, dan memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang layak untuk dikembangkan.

Tokoh Masyarakat Desa rabak mengatakan Setelah dilaksanakan TMMD, hasil program TMMD lebih di manfaatkan oleh masyarakat, yang tadinya jalan setapak menjadi bisa kendaraan mobil, kondisi masyarakat pun berubah, masyarakat sosial ekonominya jadi meningkat, dan lebih mandiri. Karena hasil TMMD sesuai keinginan masyarakat memang itu yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Sebelum pelaksanaan TMMD, sosialisasi tentang pemahaman TMMD itu sangat bermanfaat, ekonomi menjadi meningkat karena pembangunan jalan dll, tentang pelaksanaan TMMD contoh ada tanah warga masyarakat yang kena pembuatan jalan, masyarakat harus rela. Pemahaman tentang TMMD adalah sangat bermanfaat bagi masyarakat dari ekonomi, dari awal hasil bumi dipikul sekarang naik mobil, perekonomian jadi naik, transportasi lebih mudah. TMMD suatu bakti untuk membangun negeri. Perilaku prajurit baik, sopan dan masyarakat sangat menyukai karena prajurit disiplin. Masyarakat sangat senang, bahkan ketika TMMD selesai dan prajurit pulang, ada warga masyarakat yang sedih.

Tokoh Masyarakat Desa Kiarapandak juga mengatakan Kondisinya menjadi lebih baik dan bagus. Hasil TMMD tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga kondisi masyarakat yang di wilayahnya telah dilaksanakan program TMMD masyarakat mengalami perubahan kearah yang lebih baik, kondisi kesejahteraan dan kehidupan sosial menjadi meningkat, serta masyarakat jadi mandiri. Hal ini disebabkan karena hasil TMMD sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tentara itu membantu masyarakat yang tadinya tidak ada jalan menjadi ada jalan. Jadi keuntungan TMMD itu banyak sekali dan rasa dekat dengan tentara itu terasa sekali pada saat TMMD karena tentara membawa pembangunan supaya dekat dengan

masyarakat.TMMD itu membangun mental masyarakat, masyarakat jadi terasa aman. Disamping itu TMMD bermanfaat karena masyarakat diajak rembuk dalam rencana TMMD, saya mengusulkan yang kira-kira dibutuhkan masyarakat, saya selaku tokoh masyarakat bantu masyarakat untuk menyampaikan apa yang diperlukan masyarakat.

Tokoh Masyarakat Desa Kiarapandak bahwa Kondisinya menjadi lebih baik dan bagus. Hasil TMMD tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga kondisi masyarakat yang di wilayahnya telah dilaksanakan program TMMD masyarakat mengalami perubahan kearah yang lebih baik, kondisi kesejahteraan dan kehidupan sosial menjadi meningkat, serta masyarakat jadi mandiri. Hal ini disebabkan karena hasil TMMD sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tentara itu membantu masyarakat yang tadinya tidak ada jalan menjadi ada jalan. Jadi keuntungannya banyak sekali dan rasa dekat dengan tentara itu terasa sekali pada saat TMMD karena tentara membawa pembangunan supaya dekat dengan masyarakat.TMMD itu membangun mental masyarakat, masyarakat jadi terasa aman. Disamping itu bermanfaat karena masyarakat diajak rembuk dalam rencana TMMD, saya mengusulkan yang kira-kira dibutuhkan masyarakat, saya selaku tokoh masyarakat bantu masyarakat untuk menyampaikan apa yang diperlukan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat dan narasumber tersebut diatas bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang di wilayahnya telah dilaksanakan TMMD mengalami perubahan menjadi lebih baik. Umumnya perekonomian masyarakat meningkat setelah di wilayah tersebut dilaksanakan program TMMD hal ini disebabkan karena program TMMD sangat membantu dalam mewujudkan apa yang diinginkan masyarakat sehingga dapat terpenuhi dan kedekatan masyarakat dengan TNI juga terlihat cukup baik dan harmonis mereka merasa nyaman dan aman.

Tabel 4.3 Rangkuman tentang Implementasi program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat .

No	Pertanyaan	Temuan
1	Peran dan partisipasi pemda	memberi alokasi anggaran APBD setiap tahun, serta di dukung oleh masing – masing instansi yang terkait dengan peran dan parsipisasinya.
2	Pemda Kabupaten Bogor tidak mempunyai regulasi (Perda),	namun sangat mendukung dan membantu program TMMD.
3	Korem 061/SK pernah melaksanakan sosialisasi,	pernah dan sebaiknya diadakan sosialisasi dengan melibatkan Kementerian/LPNK, Pemda dan instansi terkait lainnya.
4	partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan TMMD,	tergantung wilayahnya, ada beberapa wilayah kurang optimal karena masyarakat merantau
5	partisipasi masyarakat dalam menentukan sasaran fisik dan non fisik program TMMD	sudah berjalan dan masyarakat banyak memberi saran dan masukan tentang kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan masyarakat terkait namun saran-saran belum tentu terpenuhi karena keputusan bukan ditangan masyarakat.
6	Kondisi masyarakat yang telah melaksanakan program	TMMD menyampaikan kondisinya jadi lebih baik karena TMMD sangat membantu apa yang diinginkan masyarakat terpenuhi dan kedekatan TNI mereka merasa nyaman dan aman.

Sumber : data dari Peneliti tahun 2019

4.2.2. **Hasil implementasi program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat.**

Partisipasi masyarakat adalah sesuatu kegiatan yang melibatkan masyarakat bukan hanya di proses pelaksanaan kegiatan saja, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam hal perencanaan dan pengembangan dari pelaksanaan program tersebut, termasuk menikmati hasil dari pelaksanaan program tersebut. *Participation in Benefit* adalah partisipasi masyarakat

dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan (Cohen dan Uphoff .1977)

Dari hasil penelitian yang meliputi pengumpulan data dan keterangan dilapangan maka dapat diketahui bahwa hasil implementasi program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat sebagai berikut.

Tujuan dan sasaran program TMMD.

Wawancara dengan Bupati Kabupaten Bogor mengatakan bahwa tujuan kegiatan TMMD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memantapkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bela negara dan disiplin nasional. Sasaran TMMD pembangunan fisik dan non fisik di antaranya pembangunan infrastruktur baik jalan maupun jembatan, serta pembekalan bela negara dan peningkatan wawasan kebangsaan, penanaman nilai-nilai ideologi pancasila, pencegahan penyalahgunaan narkoba, penyuluhan agama tentang deradikalisasi paham keagamaan, dan penyuluhan serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat. Pelaksanaan TMMD sebagai wujud pengabdian TNI bersama rakyat, untuk membantu percepatan pembangunan di daerah tertinggal demi tercapainya kesejahteraan bagi rakyat, Melalui kegiatan TMMD sangat membantu Pemda dalam upaya mempercepat pembangunan di wilayah. Pada dasarnya TMMD adalah sebagai bentuk partisipasi TNI dalam pembangunan di daerah yang berdaya guna, bagi kepentingan pembangunan, peningkatan kesejahteraan maupun, pertahanan dan ketahanan negara.

Kepala Dinas PMPD mengatakan bahwa tujuan kegiatan TMMD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memantapkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bela negara dan disiplin nasional. Tentunya yang paling mendasar tentang tugas pokok operasi militer selain

perang, dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah membantu tugas pemerintah di daerah dalam pembinaan teritorial yang bertujuan untuk menyiapkan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukung melalui kemanunggalan TNI dengan masyarakat melalui kegiatan fisik seperti pembuatan akses jalan, rehabilitasi tempat ibadah, sarana air bersih dan air kotor, dan lain-lain. Adapun kegiatan non fisik seperti penyuluhan tentang kebersihan lingkungan, program keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan untuk alih informasi dan memotivasi masyarakat pedesaan.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor mengatakan bahwa tentunya yang paling mendasar tentang tugas pokok operasi militer selain perang, dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah membantu tugas pemerintah di daerah dalam pembinaan teritorial yang bertujuan untuk menyiapkan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukung melalui kemanunggalan TNI dengan masyarakat melalui kegiatan fisik seperti pembuatan akses jalan, rehabilitasi tempat ibadah, sarana air bersih dan air kotor, dan lain-lain. Adapun kegiatan non fisik seperti penyuluhan tentang kebersihan lingkungan, program keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan untuk alih informasi dan memotivasi masyarakat pedesaan.

Selanjutnya wawancara dengan Paban V/Bakti TNI Sterad yang sepaham dengan Paban Bakti TNI Mabes TNI mengatakan bahwa tujuan dari program TMMD dihadapkan dengan perspektif pertahanan adalah untuk menyiapkan dan mengolah potensi wilayah untuk mendukung pertahanan aspek darat berdasarkan kepada unsur Geoografi, Demografi dan Kondisi Sosial untuk mendukung RAK Juang yang tangguh melalui kegiatan fisik (pembangunan infrastruktur) dan non fisik (penyuluhan bela negara/wasbang).

Camat Cigudeg menjelaskan Tujuan dari TMMD adalah agar terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera serta meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat oleh karena maka yang paling utama adalah sasaran non fisik, dan selanjutnya melaksanakan kegiatan sasaran fisik. Untuk sasaran TMMD adalah : 1) daerah yang terpencil; 2) yang tidak bisa didanai oleh dana desa; 3) kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak.

Kepala desa Rabak, desa Kiara pandak dan desa Banyuasih mengatakan tujuan dari TMMD adalah agar terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera serta meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat oleh karena maka yang paling utama adalah sasaran non fisik, dan selanjutnya melaksanakan kegiatan sasaran fisik. Untuk sasaran TMMD adalah : 1) daerah yang terpencil; 2) yang tidak bisa didanai oleh dana desa; 3) kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak. Tujuan Program TMMD adalah untuk mendukung program pembangunan desa dan program pembangunan di Kabupaten Bogor karena kegiatan TMMD sangat berguna bagi masyarakat desa Kiarapandak, manfaatnya banyak misalnya kita yang dulunya sakit itu harus digotong, sekarang dengan adanya jalan tidak digotong lagi, dengan adanya TMMD sudah ada jalan, meningkat perekonomian.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber tersebut bahwa dari tujuan dan sasaran program TMMD dapat diidentifikasi dalam dua perspektif. Dalam perspektif Pemerintah daerah dan masyarakat umum (public) tujuan dan sasaran program TMMD adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pembangunan di daerah terpencil dan terisolir serta mempercepat program pembangunan Pemda. Sedangkan dari perspektif pertahanan tujuan dan sasaran program TMMD adalah untuk menyiapkan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukung melalui kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui kegiatan fisik seperti pembuatan akses jalan, rehabilitasi tempat ibadah, sarana air bersih dan air kotor, dan

lain-lain. Menurut masyarakat yang diwakili oleh narasumber tokoh masyarakat terlihat menyadari bahwa program TMMD sangat bermanfaat, sangat berguna bagi masyarakat desa dan sekitarnya serta memantapkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, bernegara serta bela negara dan disiplin nasional.

Struktur organisasi TMMD menunjang terwujudnya pemberdayaan wilayah pertahanan.

Wawancara dengan Paban Bakti TNI Mabes TNI yang sepaham dengan Paban V/Bakti TNI Sterad, Danrem 061/SK dan Dandim 0621/Kab Bogor mengatakan bahwa struktur organisasi TMMD bersifat lintas sektoral, ada TNI dan ada Pemda serta masyarakat yang bersinergi disana demikian juga pemberdayaan wilayah pertahanan. Semua pelaku dan pendukung kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan juga sudah ada disitu, sehingga sudah memadai lah struktur organisasi TMMD ini untuk mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan, bahkan sudah otomatis berjalan.

Lain halnya wawancara dengan Pasiter Kodim 0621 yang sepaham dengan Danramil 2112/Rumpin dan Danramil 2118/Cigudeg mengatakan bahwa yang kami pahami di lapangan, struktur organisasi TMMD sama dengan struktur organisasi Kodim, hanya ada tambahan pendukung dari unsur-unsur Pemda sebagai tim asistensi dan masyarakat sehingga disebut organisasinya sebagai organisasi Satgas TMMD. Organisasi Satgas TMMD ini tupoksinya melaksanakan TMMD. Pelaksanaan TMMD dapat mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan, maka struktur organisasi TMMD inipun dapat menunjang terwujudnya pemberdayaan wilayah pertahanan.

Berdasarkan hasil wawancara dari para narasumber bahwa Struktur organisasi TMMD dapat menunjang terwujudnya pemberdayaan wilayah pertahanan yang merupakan salah satu tujuan dan sasaran program TMMD

dan pada akhirnya dapat mewujudkan pertahanan negara di wilayah Kab Bogor. Struktur organisasi TMMD bersifat lintas sektoral, ada TNI dan ada Pemda yang bersinergi untuk mencapai tujuan organisasi Satgas TMMD.

Berdasarkan buku Pedomam Penyelenggaraan TMMD 2019, struktur Organisasi Satgas TMMD sebagai mana gambar dibawah ini :

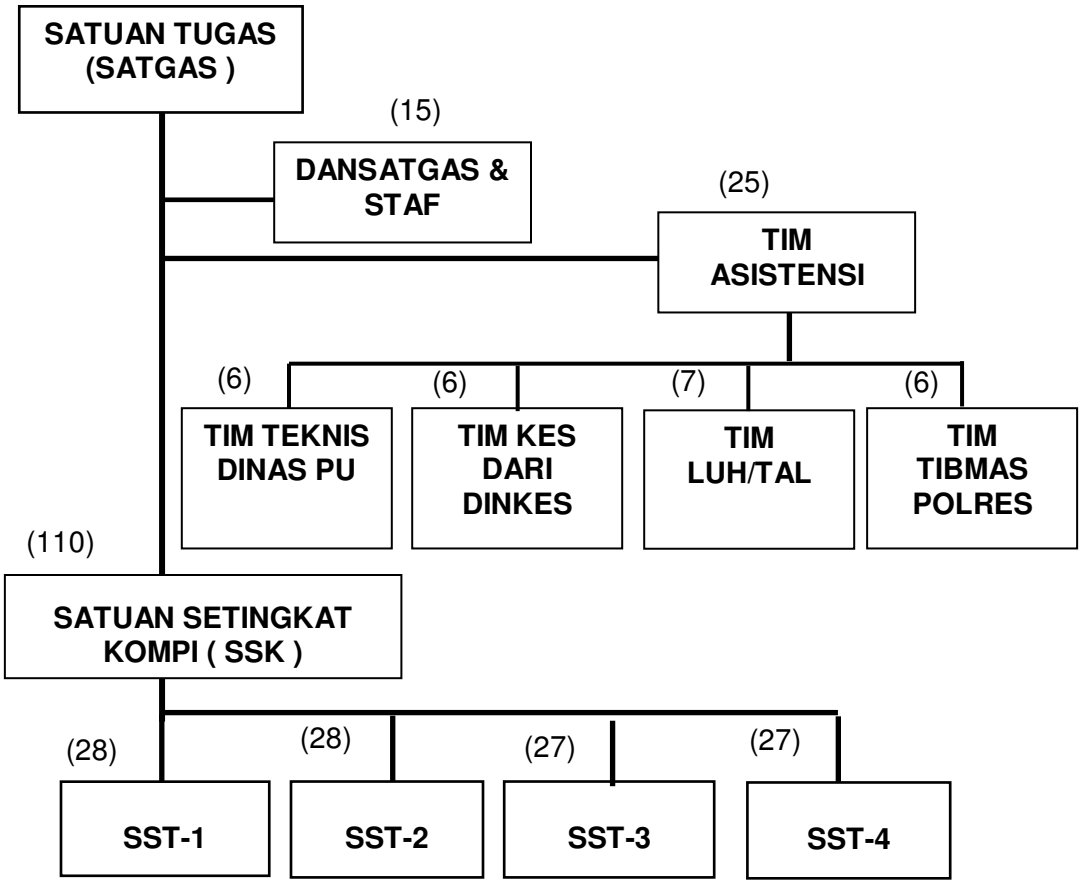

Gambar 4.1 Struktur Oranisasi Satgas TMMD
Sumber : Buku Pedoman Penyelenggaraan TMMD 2018

Hasil Program TMMD mewujudkan ruang alat kondisi (RAK) juang.

Paban V/Bhakti TNI Sterad sepaham dengan Paban Bakti TNI Mabes TNI dan sepaham Danrem 061/SK dan Dandim 0621/Kab Bogor bahwa salah satu hasil dari pembangunan TMMD secara fisik adalah jalan dan jembatan. Sarana ini selain untuk membantu masyarakat diharapkan juga dapat digunakan sebagai sarana pertahanan yang secara teknis dimanfaat sebagai jalan-jalan mobilitas personel apabila dalam keadaan perang, ini merupakan wujud ruang juang. Selanjutnya manfaat lain pelaksanaan TMMD diantaranya adalah terciptanya mobilitas Sumber Daya Manusia akibat adanya pembangunan dan terciptanya kondisi fisik dan mental masyarakat yang prima melalui pelayanan dan penyuluhan kesehatan. Dengan terciptanya kondisi ini diharapkan masyarakat dapat memberikan kontribusi yang positif dalam bidang Pertahanan Negara, ini merupakan wujud sebagai alat juang. Dan berikutnya secara tidak langsung hasil kegiatan TMMD tentu memiliki dampak yang positif bagi masyarakat dalam hal sosial maupun ekonomi. Peningkatan kondisi ini diharapkan dapat menjadi faktor pendorong terciptanya semangat juang masyarakat dan meningkatkan rasa cinta tanah air sehingga dapat meningkatkan kondisi juang bagi pertahanan Negara, ini merupakan wujud kondisi juang.

Sedangkan Pasiter menjawab hasil program TMMD sangat berdampak yaitu hasil pencapaian Program TMMD dapat mendukung Pemberdayaan wilayah Pertahanan dan sistem Pertahanan Negara di wilayah melalui pencapaian hasil kegiatan fisik TMMD yaitu pembangunan sarana infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendukung terwujudnya pemberdayaan wilayah pertahanan. Adapun kegiatan non fisik juga bertujuan untuk meningkatkan semangat bela Negara, cinta tanah air dan wawasan kebangsaan serta meningkatkan semangat gotong royong

yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan Ruang Alat Kondisi (RAK) juang yang tangguh.

Kedua Danramil Cigudeg dan Rumpin mengatakan bahwa hasil program TMMD sangat berdampak yaitu hasil pencapaian Program TMMD dapat mendukung Pemberdayaan wilayah Pertahanan dan sistem Pertahanan Negara di wilayah melalui pencapaian hasil kegiatan fisik TMMD yaitu pembangunan sarana infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendukung terwujudnya pemberdayaan wilayah pertahanan. Adapun kegiatan non fisik juga bertujuan untuk meningkatkan semangat bela Negara, cinta tanah air dan wawasan kebangsaan serta meningkatkan semangat gotong royong yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan Ruang Alat Kondisi (RAK) juang yang tangguh.

Berdasarkan hasil wawancara dari pejabat bahwa Hasil Program TMMD berdampak pada terwujudnya ruang alat kindisi (RAK). Sangat berdampak yaitu hasil pencapaian Program TMMD dapat mendukung Pemberdayaan wilayah Pertahanan dan sistem Pertahanan Negara di wilayah melalui pencapaian hasil kegiatan fisik TMMD yaitu pembangunan sarana infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendukung terwujudnya pemberdayaan wilayah pertahanan. Adapun kegiatan non fisik juga bertujuan untuk meningkatkan semangat bela Negara, cinta tanah air dan wawasan kebangsaan serta meningkatkan semangat gotong royong yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan Ruang Alat Kondisi (RAK) juang yang tangguh.

Hasil TMMD mewujudkan kemanunggalan TNI dan Rakyat.

Menurut Camat Cigudeg bahwa adanya komunikasi dan sikap perilaku prajurit TNI selama kegiatan TMMD di desa Banyuasih sangat baik, ramah dan bisa berbaur dengan masyarakat. Tidak ada yang arogan, tidak ada yang jadi mandor. Hal ini terlihat ketika prajurit TNI istirahat makan siang,

masyarakat yang tadinya sama-sama bekerja ada yang ikut makan bersama, tetapi untuk bekalnya bawa masing-masing, Demikian juga adanya kebijakan prajurit TNI tinggal dan menetap bersama rakyat menyebabkan terwujudnya Kemanunggalan TNI Rakyat.

Menurut tiga Kepala yaitu desa Rabak, Kiara pandak dan Banyuasih bahwa Yaa, karena pada saat TMMD terjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dan TNI dan sikap perilaku prajurit TNI selama kegiatan TMMD di desa Rabak sangat baik, ramah dan bisa berbaur dengan masyarakat. Tidak ada yang arogan, tidak ada yang jadi mandor. Hal ini terlihat ketika prajurit TNI istirahat makan siang, masyarakat yang tadinya sama-sama bekerja ada yang ikut makan bersama, tetapi untuk bekalnya bawa masing-masing, Demikian juga adanya kebijakan prajurit TNI tinggal dan menetap bersama rakyat menyebabkan terwujudnya Kemanunggalan TNI Rakyat.

Berdasarkan hasil wawancara dari pejabat bahwa hasil TMMD mewujudkan kemanunggalan TNI dan Rakyat., baik karena pada saat TMMD terjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dan TNI dan sikap perilaku prajurit TNI selama kegiatan TMMD di desa Rabak sangat baik, ramah dan bisa berbaur dengan masyarakat. Tidak ada yang arogan, tidak ada yang jadi mandor. Hal ini terlihat ketika prajurit TNI istirahat makan siang, masyarakat yang tadinya sama-sama bekerja ada yang ikut makan bersama, tetapi untuk bekalnya bawa masing-masing, Demikian juga adanya kebijakan prajurit TNI tinggal dan menetap bersama rakyat menyebabkan terwujudnya Kemanunggalan TNI dan Rakyat.

Tabel 4.4 Rangkuman tentang Hasil implementasi program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat.

No	Pertanyaan	Temuan
1	Tujuan dan sasaran program TMMD,	sangat tepat berguna bagi masyarakat desa dan sekitarnya yang memerlukan

		keberadaan TNI dan harapkan olehnya sehingga tujuan diantara instansi terpenuhi.
2	Struktur organisasi TMMD dapat menunjang terwujudnya pemberdayaan wilayah pertahanan	karena struktur organisasi TMMD sama dengan struktur organisasi Kodim, hanya ada tambahan pendukung dari unsur-unsur Pemda sebagai tim asistensi dan masyarakat sehingga disebut organisasinya sebagai organisasi Satgas TMMD.
3	Hasil Program TMMD berdampak pada terwujudnya ruang alat kondisi (RAK).	Sangat berdampak yaitu hasil pencapaian Program TMMD dapat mendukung Pemberdayaan wilayah Pertahanan dan sistem Pertahanan Negara di wilayah melalui pencapaian hasil kegiatan fisik TMMD yaitu pembangunan sarana infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendukung terwujudnya pemberdayaan wilayah pertahanan. Adapun kegiatan non fisik juga bertujuan untuk meningkatkan semangat bela Negara, cinta tanah air dan wawasan kebangsaan serta meningkatkan semangat gotong royong yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan Ruang Alat Kondisi (RAK) juang yang tangguh.
4	Hasil TMMD mewujudkan kemanunggalan TNI dan Rakyat	baik karena pada saat TMMD terjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dan TNI dan sikap perilaku prajurit TNI selama kegiatan TMMD di desa Rabak sangat baik, ramah dan bisa berbaur dengan masyarakat. Tidak ada yang arogan, tidak ada yang jadi mandor. Hal ini terlihat ketika prajurit TNI istirahat makan siang, masyarakat yang tadinya sama-sama bekerja ada yang ikut makan bersama, tetapi untuk bekalnya bawa masing-masing, Demikian juga adanya kebijakan prajurit TNI tinggal dan menetap bersama rakyat menyebabkan terwujudnya Kemanunggalan TNI Rakyat.

Sumber : Data diolah dari peneliti 2019

4.3. Pembahasan

Pada dua subbab sebelumnya telah diuraikan tentang gambaran umum obyek penelitian, analisa data dan hasil penelitian. Hasil yang di dapat dari kedua subbab tersebut peneliti mendapatkan temuan sebagaimana yang di sampaikan diatas. Selanjutnya pada pembahasan ini temuan yang didapat akan dihubungkan dan dianalisa menggunakan perangkat teori sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab 2 tentang tinjauan pustaka.

Hasil evaluasi penelitian mengenai partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam program TMMD, dan hasil program TMMD adalah sebagai berikut :

4.3.1. Implementasi program TMMD khususnya tentang partisipasi masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut.(Wahab,A.S,1997: hal 64-65). Program TMMD termasuk kebijakan derivate atau turunan dari Undang-undang RI No 34 Tahun 2004 tentang TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) diantaranya memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan Sishanta dan membantu tugas pemerintah di daerah. Mengacu dari hal tersebut diatas maka Implementasi program TMMD adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka mengantarkan kebijakan pemerintah tentang UU nomor 34 tahun 2004 perihal tugas TNI dalam OMSP kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Implementasi program TMMD ini sejalan dengan pendapat *Van Meter* dan *Van Horn* yang mendefinisikan “implementasi sebagai tindakan-tindakan

yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan". Tindakan-tindakan yang dimaksud mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh program. (Agustino.2006:hal 51-52).

Untuk melihat keberhasilan dari suatu implementasi program, ada beberapa cara yaitu pertama dapat di lihat dari perbandingan antara pencapaian target dengan tujuan awal, yang kedua dilihat dari kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumya. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa yang pertama mengacu pada hasil akhir, sedangkan yang kedua mengacu pada pelaksanaan program-program sebelumnya.

Mengacu pada hal tersebut berdasarkan analisa hasil penelitian Implementasi program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat di pengaruhi oleh peran dan partisipasi Pemda, regulasi atau perda, pelaksanaan sosialisasi, partisipasi masyarakat itu sendiri baik pada saat pelaksanaan maupun menentukan sasaran fisik dan non fisik, kondisi masyarakat pasca pelaksanaan program.

Peran dan partisipasi Pemda terhadap program TMMD (Struktur Birokrasi).

Peran dan partisipasi Pemerintah daerah Kabupaten Bogor terhadap program TMMD memberi alokasi anggaran APBD setiap tahun, serta mendukung oleh masing-masing instansi yang terkait dengan peran dan partisipasinya. Peran dan pelibatan Pemda Kabupaten Bogor hanya didasari oleh adanya hubungan kemitraan secara hubungan Vertikal antara Pemda

Kab. Bogor dengan unsur TNI dalam hal ini Kodim 0621/Kab. Bogor, Pemda Kab. Bogor memberikan dukungan melalui Hibah bantuan keuangan kegiatan TMMD. Selain itu disebabkan program TMMD membantu pemerintah daerah dalam percepatan dan pemerataan pembangunan pedesaan.

Peran dan partisipasi Pemerintah daerah Kabupaten Bogor terhadap program TMMD sesuai dengan tindakan-tindakan yang dimaksud mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh program. (Agustino.2006:hal 51-52)

Sepaham dengan Edward III tentang teori implementasi, maka peran dan partisipasi Pemda merupakan bagian dari struktur birokrasi. Fungsi struktur birokrasi dalam sebuah organisasi adalah memberikan informasi kepada seluruh manusia yang menjadi anggotanya untuk mengetahui kegiatan atau pekerjaan yang harus ia kerjakan, berkonsultasi, atau bertanggung jawab kepada siapa, sehingga proses kerja sama menuju pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.(Wicaksono, 2006: hal 75). Terkait implementasi program TMMD, adanya peran dan partisipasi Pemda dapat juga diartikan sebagai bentuk legasi atas program TMMD, sehingga aparat desa maupun koramil dapat memobilisasi partisipasi masyarakat.

Adanya peran dan partisipasi Pemda Kabupaten Bogor pada implementasi program TMMD sesuai juga dengan faktor disposisi atau sikap pelaksana pada teori implementasi Edward III. Sebagaimana dikatakan oleh Tachjan (2006) dalam Implementasi Kebijakan Public bahwa sikap atau disposisi merupakan “faktor budaya yang dimiliki oleh seorang birokrat yang diposisikan sebagai energi sosial untuk menggerakkan seorang implementor”.(Tachjan, 2006: hal 83). Hal tersebut mengandung makna

bahwa sikap Pemda Kabupaten Bogor mencerminkan komitmen dan perilaku dari aparat birokrasi dalam menerjemahkan suatu kebijakan.

Adanya Peran dan Partisipasi Pemda Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Edaran Mendagri kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan Pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota No 903/556/ SJ tanggal 30 Januari 2014 tentang Dukungan Dana APBD untuk Program TMMD yang diperkuat lagi dengan Surat Mendagri RI kepada Gubernur serta Bupati/Walikota Nomor 140/174/Sj Tanggal 16 Januari 2017 tentang penambahan kegiatan Program TMMD dari 2 kali menjadi 3 kali dalam setahun. Dengan adanya program TMMD ini, ekonomi masyarakat ikut mengalami peningkatan karena jalur transportasi makin mudah dijangkau.

Pemda Kabupaten Bogor tidak mempunyai regulasi (Perda).

Pemda Kabupaten Bogor tidak mempunyai regulasi (Perda), namun sangat mendukung dan membantu program TMMD. Dengan status program terpadu dan lintas sektoral, selayaknya Pemda Kabupaten Bogor membuat Perda atau regulasi untuk memperkuat peran dan partisipasinya dalam program TMMD. Regulasi atau Perda tersebut untuk menegaskan standar kegiatan, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam implementasi program tersebut. Sepaham dengan hal tersebut Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pencapaian sasaran kebijakan juga tidak terlepas dari faktor sumber daya. Dalam perspektif organisasi, dikemukakan bahwa : “Sumber daya organisasi mencakup (1) modal yang berupa uang, dan (2) material atau bahan baku, informasi, mesin-mesin, peralatan, perlengkapan, gedung, kantor, waktu dan personel.” (Sugandha, 1991: hal 49) Pandangan tersebut

mengisyaratkan bahwa modal dipandang sebagai faktor yang sangat strategis dalam mendukung operasionalisasi organisasi. Adanya modal atau anggaran dalam birokrasi pemerintah merupakan realisasi dari Perda yang mendukung suatu kegiatan atau program. Sehingga dapat disimpulkan tidak adanya Perda tentang program TMMD, jika mengacu pada teori implementasi Edwards III, yaitu faktor sumber daya tidak mendukung.

Pandangan di atas mencerminkan bahwa faktor sumber daya dalam konteks organisasi secara operasional dalam lingkungan Pemerintah mencakup berbagai hal yang dibutuhkan organisasi, baik berupa uang, material, informasi, peralatan dan sebagainya. Semua faktor sumber daya tersebut secara esensial dipandang penting dalam mendukung operasionalisasi kegiatan TMMD sebagai wujud dari kebijakan yang telah ditetapkan. Mengacu dari ulasan diatas, ketiadaan Perda Kabupaten Bogor dalam mendukung program TMMD menyebabkan implementasi program TMMD pincang dan kurang optimal. Dukungan sumber daya yang bersumber dari lingkungan Kabupaten Bogor juga tidak optimal karena tidak adanya kewenangan diluar tupoksi nya. Para pegawai Pemda Kabupaten Bogor hanya berbuat sebatas tupoksinya, sehingga tidak muncul inisiatif dan kreatifitas dalam pelaksanaan program TMMD. Sepaham dengan hal tersebut dinyatakan oleh Madva Lwihpakerti dan Hartuti Purnaweni, Magister dan Doktor Ilmu Lingkungan, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro dalam jurnalnya yang berjudul “Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi kegiatan TMMD di kota Semarang”, dalam pembahasannya mengatakan bahwa Kewenangan yang dilaksanakan diprogram TMMD hanya berupa pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi, selain itu para pelaksana program TMMD kurang tegas dalam mengajak instansi perangkat daerah lain dan masyarakat untuk berpartisipasi diprogram TMMD.

Pemda Kabupaten Bogor tidak mempunyai regulasi (Perda) maka sebagai program terpadu lintas sektoral, implementasi program TMMD dari tidak optimal. Partisipasi Pemda Kabupaten Bogor dinilai kurang kuat karena tidak didasari adanya regulasi setingkat Perda yang akan mengikat para pelaksana atau implementator di lingkungan Pemda. Hal ini terlidat dari para implementator di lingkungan Pemda Kabupaten Bogor hanya berbuat sebatas tupoksinya, tidak muncul inisiatif dan kreatifitas dalam menghadapi kendala di lapangan.

Korem 061/SK pernah melaksanakan sosialisasi.

Implementasi program TMMD dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tinggkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

Untuk mengukur keberhasilan faktor komunikasi dalam konteks implementasi kebijakan, yaitu ; 1) *transmisi,* yakni penyaluran komunikasi dalam implementasi kebijakan; 2) *kejelasan*, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan, 3) *konsistensi*, artinya perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk diterapkan. Transmisi berkaitan erat dengan bagaimana penyaluran perintah yang dibuat dan perintah tersebut untuk pelaksanaannya telah ditetapkan sebelum akhirnya pejabat tersebut mengimplementasikan kebijakan/program, penyaluran informasi ketika rapat dapat diterima oleh semua pihak yang terkait dalam program TMMD dan dapat menyesuaikan kebutuhan saat pelaksanaan program

TMMD, selain melalui rapat penyaluran informasi juga melalui pesan singkat jika ada informasi yang mendadak. Kejelasan informasi erat kaitannya dengan keutuhan informasi yang jelas, akurat dan tidak ambigu. masyarakat dan pihak-pihak pendukung program TMMD dapat mengerti kegiatan-kegiatan saat program TMMD serta lokasi yang akan dilaksanakan program TMMD. Konsistensi informasi berkaitan dengan informasi yang diterima dapat konsisten serta tidak berubah-ubah saat informasi tersebut diterima oleh sasaran kebijakan dapat diketahui dari seringnya pihak-pihak yang terkait dalam program TMMD berkoordinasi, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten *(accuracy and consistency)* (Van Mater dan Varn Horn, dalam Widodo 1974).

Dilaksanakannya sosialisasi oleh Korem 061/SK dan jajarannya menunjukkan adanya komunikasi antara pembuat kebijakan dengan para implementator maupun dengan masyarakat. Sejalan dengan Edwards III, dikemukakan bahwa faktor komunikasi merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan, implementasi kebijakan baru akan terjadi apabila para pembuat keputusan (*decision makers*) sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Partisipasi masyarakat dalam program TMMD tidak lepas dari peran Korem 061/SK yang memerintahkan seluruh Kodim-Kodim di jajarannya untuk melaksanakan sosialisasi termasuk Kodim 0621/Kab Bogor. Satgas TMMD rajin melakukan sosialisasi-sosialisasi kegiatan sebelum hari-H kegiatan dimulai dari sosialisasi kegiatan sasaran fisik maupun sasaran non fisik. Namun sayangnya, kegiatan ini hanya berbentuk *informing* saja, hanya untuk mensosialisasikan kegiatan yang telah ditentukan, bukan membangun motivasi warga untuk mandiri membangun desanya sendiri. Bahkan banyak

para implementator termasuk personel Kodim tidak paham bahwa program TMMD bertujuan untuk menyiapkan wilayah pertahanan.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program TMMD.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan TMMD, tergantung wilayahnya, ada beberapa wilayah kurang optimal karena masyarakatnya merantau. Partisipasi masyarakat dalam implementasi program TMMD ini akan di lihat dari beberapa aspek. Pertama dari aspek teori partisipasi masyarakat itu sendiri dan kedua dari aspek teori implementasi Edwards III. Partisipasi masyarakat sejalan dengan faktor disposisi atau sikap pelaku/pelaksana dalam teori Implementasi program Edward III. Menurut Edward III manakala implementasi kebijakan ingin berjalan dengan efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dikerjakan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Kemampuan dapat berarti ketersediaan waktu yang di miliki. Ketersediaan waktu masyarakat di desa Banyuasih pada tahun 2014 dan desa Kiarapandak tahun 2016 sangat terbatas karena faktor kebutuhan pokok (mencari nafkah). Edward III menekankan yang harus diperhatikan untuk memahami faktor disposisi ini, antara lain: (1) *pengangkatan birokrat*, dilaksanakan berdasarkan kompetensi dan dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, (2) *intensif*, yakni menambah keuntungan atau penghasilan bagi para pelaksana kebijakan. Pemberian intensif kepada masyarakat perlu dipertimbangkan walaupun hal ini tidak lazim dalam budaya gotong-royong. Sepaham dengan hal tersebut Mubyarto (1997:35) mendefinisikan bahwa “partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri”. Harus ada keuntungan instan yang bisa dinikmati masyarakat setelah pelaksanaan program.

Partisipasi masyarakat di tiga desa yang menjadi lokasi pelaksanaan program TMMD sudah terlihat dalam proses perencanaan, persiapan dan pelaksanaan TMMD. Namun di desa Banyuasih dan Kiarapandak partisipasi masyarakat berbeda. Partisipasi pada tahap perencanaan program TMMD menurut Hobley dapat dikategorikan sebagai *Manipulatif Participation*, Karakteristik dari model ini adalah keanggotaan yang bersifat keterwakilan pada suatu komisi kerja, organisasi kerja atau kelompok-kelompok dan bukannya pada individu. Bersifat perwakilan karena pengambilan saran dan pendapat dilaksanakan pada forum desa yang diwakili oleh tokoh-tokoh desa dan aparat desa. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor partisipasi masyarakat tidak optimal. Perlu dipahami bahwa bentuk partisipasi sesungguhnya diindikasikan dengan adanya kontrol warga (citizen control) terhadap bentuk dan sasaran kegiatan TMMD. Namun dalam prakteknya, penyelenggara TMMD dari pihak Pemda Kabupaten Bogor yaitu Dinas PUPR mendominasi penentuan lokasi dan sasaran TMMD dalam rapat Musrenbang tingkat Kabupaten dengan alasan sinkronisasi program pembangunan daerah.

Partisipasi masyarakat dalam penentuan sasaran fisik dan non fisik program TMMD.

Partisipasi masyarakat dalam menentukan sasaran fisik dan non fisik program TMMD sudah berjalan dan masyarakat banyak memberi saran dan masukan tentang kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan masyarakat terkait namun saran-saran belum tentu terpenuhi karena keputusan bukan ditangan masyarakat. Sepaham dengan Mubyarto (1997), Partisipasi adalah tindakan mengambil bagian dalam kegiatan, sedangkan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan di mana masyarakat ikut terlibat mulai dari tahap penyusunan program, perencanaan dan pembangunan, perumusan kebijakan, dan

pengambilan keputusan. Adisasmita membatasi arti dari pembangunan masyarakat pedesaan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di mana mereka mengidentifikasikan kebutuhan dan masalahnya secara bersama dan meliputi berdimensi jamak dalam hal ini artinya membahas komponen-komponen ekonomi maupun non ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian, proses penentuan sasaran TMMD di desa Banyuasih pada tahun 2014 dan Kiarapandak tahun 2016 belum optimal, masyarakat dimintai saran dan masukan oleh aparat desa adalah perwakilan dan tokoh masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena terbatasnya waktu masyarakat untuk urun rembug di desa. Saran dan masukan masyarakat banyak namun skala prioritas diputus kan oleh elit desa tanpa partisipasi masyarakat. Di tingkat kecamatan usul dan saran tiap-tiap desa dipertimbangkan lagi oleh aparat kecamatan dengan skala prioritas untuk diajukan ke tingkat Kabupaten. Proses partisipasi tergambar menurut Hobley yang disebut *Manipulatif Participation*, yaitu Karakteristik bersifat keterwakilan pada suatu komisi kerja, organisasi kerja atau kelompok-kelompok dan bukannya pada individu.

Di tingkat musrenbang Desa, hanya perwakilan masyarakat yang hadir yaitu para ketua RW, Ketua organisasi masyarakat. Bila dilihat dari sisi peserta dalam proses perencanaan di tingkat Desa dan kecamatan belum mewakili unsur masyarakat, terlebih dalam proses perencanaan di tingkat Kecamatan, tingkat keterwakilan masyarakat masih rendah. Masyarakat belum dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan yang dianggap prioritas untuk diajukan ke proses perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, para elit desa dan kecamatan mendominasi pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan yang dianggap prioritas untuk diajukan ke proses perencanaan pembangunan yang lebih tinggi.(Purnamasari,Irma. 2008, Studi Partisipasi masyarakat dalam perencanaan

pembangunan di Kecamat Cibadak Kabupaten Sukabumi, Tesis Program Pasca Sarjana Undip)

Sepaham dengan Syakrani dan Syahriani, faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan pembangunan desa menurutnya adalah Partisipasi masyarakat, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. (Syakrani dan Syahriani,2009:hal 24).

Pelaksanaan TMMD di desa Kiarapandak dan desa Banyuasih terdapat masalah dengan partisipasi masyarakat desanya. Sasaran TMMD walaupun ditentukan oleh perwakilan elit desa dan tokoh masyarakat namun sesuai dengan kebutuhan warga desa yaitu akses jalan menuju dan dari kecamatan serta desa-desa tetangganya. Namun bentuk jalan dan bangunan yang akan direhab ditentukan oleh tim asistensi tekhnis Satgas TMMD yang terdiri dari Dinas PUPR dan Dinas PMPD Kabupaten Bogor.

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan (*enabling)*, memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian.(Tri Winarni,1998:hal 75). Mengacu kepada hal tersebut maka partisipasi masyarakat yang rendah mengakibatkan pengembangan (enabling) dan potensi atau daya (empowering) masyarakat juga menurun sehingga kemandirian masyarakat tidak terwujud.

Peran serta warga seperti ini menurut Arnstein termasuk ke dalam derajat partisipasi tokenisme. Artinya bahwa peran masyarakat untuk menentukan sasaran dan bentuk kegiatan sangat minim. Ketika peneliti mengadakan pengamatan di lokasi hasil program, ternyata memang jalan di

desa Kiarapandak dan desa Banyuasih belum mencerminkan keinginan warga. Terbukti pada saat musim hujan yang lebat, jalan justru kebanjiran yang menyebabkan warga akhirnya kembali melambung ke jalan lain yang lebih jauh. Desa Banyuasih masyarakat melakukan perbaikan atas jalan TMMD secara swadaya dengan dukungan dana desa.

Pembangunan infrastruktur desa harus ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga memungkinkan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaanya. Di sisi lain infrastruktur yang di bangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab dalam mengelola dan memelihara setelah proyek tersebut berakhir, dan di dalam membangun infrastruktur desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat sehingga sumber daya yang di milki oleh desa yang terbatas dapat di manfaatkan secara efektif dan efisien.

Kondisi masyarakat setelah pelaksanaan TMMD

Kondisi masyarakat yang diwilayahnya telah dilaksanakan program TMMD, mengalami perubahan, kondisi kesejahteraan dan kehidupan sosial, serta kemandirian masyarakatnya kearah yang lebih baik. Program TMMD menjadikan kondisi baik dan sangat membantu apa yang diinginkan masyarakat terpenuhi dan kedekatan TNI mereka merasa nyaman dan aman. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan adalah suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa.

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang lebih banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia barat. Meskipun disadari pula adanya berbagai bias terhadap pemberdayaan masyarakat sebagai suatu paradigma baru pembangunan yang merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.

Konsep ini menurut Chambers mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *"people-centered, participatory, empowering, and sustainable"*.(Kartasasmita, Ginanjar, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Pustaka Cidesindo, Jakarta. Hal 122). Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat sehingga mampu menolong dirinya sendiri yang menempatkan masyarakat sebagai subyek dari pemberdayaan untuk menghasilkan masyarakat yang memiliki kesadaran, kekuasaan, dan kemampuan untuk berubah di masa yang akan datang, mengakses sumberdaya, bekerjasama, peduli sesama, mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak, berpartisipasi dalam masyarakat, dan mengembangkan modal sosial di tengah masyarakat secara terus menerus dan tidak berhenti setelah program-program masyarakat tersebut selesai. Berkaitan dengan masalah pemberdayaan masyarakat, Lemhannas menguraikan sifat-sifat ketahanan nasional salah satunya adalah sifat kemandirian. (Lemhannas, 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama). Maksud mandiri ialah percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dan tidak mudah menyerah. Sifat ini merupakan prasyarat untuk menjalin suatu kerjasama. Kerjasama perlu dilandasi oleh sifat kemandirian, bukan semata-mata tergantung oleh pihak lain. Dalam proses pemberdayaan pun, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena ketidakberdayaan. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya.

Apabila di kaitkan dengan hasil penelitian yang terdahulu yang hampir sama dengan peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang di lakukan oleh Dwi Jati Utomo (2013) dengan penelitian Implementasi Kebijakan TMMD dalam Mendukung Tugas Pokok TNI di Kodim 0619/Purwakarta. Dari Program Studi Strategi dan Kampanye Militer,

Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan menggunakan teori kebijakan publik dan teori partisipasi dalam pembahasanya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, **Pertama** : TMMD merupakan program terpadu dan lintas sektoral yang melibatkan TNI, Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian dan Pemerintah Daerah serta segenap lapisan masyarakat. Implementasi kebijakan TMMD masih layak dan tetap dipertahankan, karena sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pelaksanaannya cukup efisien dan efektif. **Kedua** : Regulasi TMMD selama ini belum cukup kuat dan cenderung multi tafsir serta tidak mengikat pemerintah daerah. Dalam implementasi kebijakan pelaksanaan TMMD ke-88 tahun 2012 yang dilaksanakan di Desa Pasanggrahan, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta dilakukan meliputi kegiatan fisik dan non fisik. **Ketiga** : Hasil yang dicapai dalam kegiatan TMMD ke-88 ini adalah dibangunnya fasilitas jalan, perbaikan gedung dan fasilitas lainnya sehingga mampu mewadahi ruang bagi masyarakat sekitar, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI dan instansi pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan terutama dalam organisasi pelaksana TMMD belum mencerminkan sinergitas lintas SKPD dan seolah-olah hanya merupakan urusan TNI saja. Saran yang disampaikan hal yang paling menonjol adalah Kemendagri perlu merumuskan bersama dengan institusi TNI dan sektor lainnya ketentuan peraturan perundang-undangan (dapat dalam bentuk PP) yang mengatur secara teknis pelaksanaan TMMD dan beban penganggarannya baik yang bersumber dari APBN atau dari APBD agar tidak terjadi duplikasi anggaran atau penyalahgunaan kewenangan.

Persamaannya : Sama-sama membahas implementasi program TMMD. Penulis fokus proses mekanisme penentuan sasaran fisik dan non fisik dan menganalisis implementasi program TMMD dalam mendukung

pemberdayaan wilayah pertahanan. Sedangkan perbedaannya lokasi tempat peneliti yang berbeda .

Dari uraian tersebut diatas maka hasil evaluasi penelitian tentang Tingkat partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam program TMMD ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya : 1) peran dan partisipasi pemda namun kurang optimal, walaupun terdapat alokasi anggaran APBD setiap tahun; terkait dengan hal tersebut disebabkan karena, 2) pemda tidak ada regulasi (Perda) yang mengikat implementator di lingkungan Pemda; 3) Sosialisasi sudah dilaksanakan namun tidak tepat sasaran; 4) partisipasi masyarakat itu sendiri yang di beberapa wilayah kurang optimal hal ini disebabkan karena, 5) partisipasi masyarakat dalam penentuan sasaran TMMD diwakili oleh elit desa dan tokoh masyarakat; 6) kondisi masyarakat yang diwilayahnya telah dilaksanakan program TMMD, mengalami perubahan kearah yang lebih baik, baik kondisi kesejahteraan maupun kehidupan sosial, serta kemandirian masyarakatnya.

4.3.2. Hasil implementasi program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat.

Yang dimaksud dengan memberdayakan wilayah pertahanan adalah:

a) Membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta.

b) Membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c) Membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung. (Penjelasan UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI)

Yang dimaksud dengan membantu tugas pemerintah di daerah adalah membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infra struktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal.(Penjelasan UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI)

Mengacu pada hal tersebut berdasarkan analisa hasil penelitian Implementasi program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang manfaat hasil program TMMD dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan di pengaruhi oleh tujuan dan sasaran TMMD, struktur organisasi TMMD, terwujudnya RAK juang dan kemanunggalan TNI dan rakyat.

Tujuan dan Sasaran program TMMD

Tujuan dan sasaran program TMMD, sangat tepat berguna bagi masyarakat desa dan sekitarnya yang memerlukan keberadaan TNI dan sangat di harapkan oleh masyarakat sehingga tujuan diantara instansi terpenuhi. Fakta menunjukkan bahwa pemahaman terhadap tujuan dan sasaran TMMD tiap-tiap implementator berbeda-beda sesuai tingkat pengetahuan dan tupoksi. Hal ini disebabkan terbatasnya informasi dan pengetahuan tentang TMMD yang bisa diakses oleh masyarakat. Sepaham dengan Edward III dalam teori Implementasi dikatakan bahwa fungsi struktur dalam sebuah organisasi adalah memberikan informasi kepada seluruh manusia yang menjadi anggotanya untuk mengetahui kegiatan atau pekerjaan yang harus ia kerjakan, berkonsultasi, atau bertanggung jawab kepada siapa, sehingga proses kerja sama menuju pencapaian tujuan

organisasi dapat terwujud sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.(Wicaksono, 2006: hal 75)

Berdasarkan hal tersebut, masyarakat selaku implementator kurang paham tujuan dan sasaran program TMMD sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran TMMD yaitu membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan bersifat sasaran fisik maupun sasaran non fisik guna memantapkan Kemanunggalan TNI dan Rakyat dalam rangka menyiapkan Ruang, Alat dan Kondisi Juang yang tangguh. (buku Pedoman Penyelenggaraan TMMD 2019)

Pencapaian sasaran kebijakan juga tidak terlepas dari faktor sumber daya. Pada posisi ini, sumber daya merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dari implementasi kebijakan. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa “sumber daya memiliki peranan yang sangat besar dalam mengimplementasikan suatu kebijakan”. (Suharto,2005: hal : 73)

Struktur organisasi TMMD menunjang terwujudnya pemberdayaan wilayah pertahanan.

Struktur organisasi TMMD dapat menunjang terwujudnya pemberdayaan wilayah pertahanan, karena struktur organisasi TMMD sama dengan struktur organisasi Kodim, hanya ada tambahan pendukung dari unsur-unsur Pemda sebagai tim asistensi dan masyarakat sehingga disebut organisasinya sebagai organisasi Satgas TMMD. Pandangan tersebut mencerminkan bahwa keberadaan struktur dalam sebuah organisasi memberikan kejelasan kepada semua anggota organisasi tentang apa yang harus mereka kerjakan, sehingga membantu dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan argumentasi tersebut, Edward III lebih lanjut mengemukakan bahwa struktur dalam sebuah organisasi memberikan

kegunaan terhadap kejelasan tanggung jawab, kejelasan kedudukan, kejelasan uraian tugas dan kejelasan jalur hubungan.(Wicaksono, 2006: hal 76).

Merujuk pada pendapat di atas, maka dapat dipahami apabila struktur organisasi satgas TMMD selayaknya mampu memberikan penguatan terhadap kelancaran pelaksanaan program TMMD dan selanjutnya mendukung terwujudnya pemberdayaan wilayah pertahanan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Edwards III mengemukakan dua karasteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi dalam konteks pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu : (1) melaksanakan SOP (*standard operating procedures),* (2) *fragmentasi*, yaitu upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktivitas pegawai di beberapa unit kerja.(George C III, 1980 : hal 125)

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang lebih banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia barat. Meskipun disadari pula adanya berbagai bias terhadap konsep ini menurut Chambers mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *"people-centered, participatory, empowering, and sustainable"*. (Kartasasmita,Ginandjar.1996:hal 122)

Hasil program TMMD mewujudkan Ruang Alat Kondisi (RAK) Juang di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor.

Hasil Program TMMD berdampak pada terwujudnya ruang alat kondisi (RAK) juang yang tangguh. Sangat berdampak yaitu hasil pencapaian Program TMMD dapat mendukung Pemberdayaan wilayah Pertahanan dan sistem Pertahanan Negara di wilayah melalui pencapaian hasil kegiatan fisik TMMD yaitu pembangunan sarana infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendukung terwujudnya pemberdayaan wilayah

pertahanan. Adapun kegiatan non fisik juga bertujuan untuk meningkatkan semangat bela Negara, cinta tanah air dan wawasan kebangsaan serta meningkatkan semangat gotong royong yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan Ruang Alat Kondisi (RAK) juang yang tangguh.

Sejalan dengan pendapat diatas maka menurut definisinya pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat (Mas'oed, 1990). Keberdayaan masyarakat oleh Sumodiningrat (1997) diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. (Totok.2015.Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik.2015.Alfabeta. Mardikanto Bandung).

Hasil program TMMD mewujudkan kemanunggalan TNI Rakyat di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor.

Implementasi merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahan yang sah dari suatu program yang meliputi upaya mengelola input. *Van Meter* dan *Van Horn* mendefinisikan "implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan". Tindakan-tindakan yang dimaksud mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh program. (Agustino.2006:hal 51-52)

Hasil TMMD mewujudkan kemanunggalan TNI dan Rakyat, baik karena pada saat TMMD terjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dan TNI dan sikap perilaku prajurit TNI selama kegiatan TMMD di desa

Rabak sangat baik, ramah dan bisa berbaur dengan masyarakat. Tidak ada yang arogan, tidak ada yang jadi mandor. Hal ini terlihat ketika prajurit TNI istirahat makan siang, masyarakat yang tadinya sama-sama bekerja ada yang ikut makan bersama, tetapi untuk bekalnya bawa masing-masing, Demikian juga adanya kebijakan prajurit TNI tinggal dan menetap bersama rakyat menyebabkan terwujudnya Kemanunggalan TNI Rakyat. Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejewantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

Apabila di kaitkan dengan hasil penelitian yang terdahulu yanghampir sama dengan peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang di lakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh **Dedy Rahmanto (2013),** Mahasiswa Pascasarjana Universitas Pertahanan, berjudul Hubungan Implementasi TMMD dengan efektifitas kemanunggalan TNI dan rakyat di wilayah Kodim 0508/Depok dari Kajian Pertahanan dan Strategis Prodi Manajemen Pertahanan. Menggunakan metode kuantitatif dengan alasan untuk menjaring fakta, data dan informasi dalam bentuk angka yang bervariasi dalam unit populasi yang lebih luas dengan menggunakan teori kerjasama dan efektifitas dalam analisis pembahasanya. Kesimpulan hasil penelitian adalah pertama : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara implementasi kebijakan TMMD dengan efektifitas kemanunggalan TNI-Rakyat. Kedua : Penelitian yang dilaksanakan di daerah perkotaan yang aman dan kondusif sehingga hasil yang dicapai akan sangat berbeda apabila penelitian di daerah rawan konflik seperti konflik sosial, konflik komunal

maupun konflik sparatis. Ketiga : Kerja sama lintas sektoral belum terjalin dengan baik terutama pada tahap perencanaan berkaitan dengan penyusunan sasaran program TMMD. Keempat : Kepercayaan dan komunikasi antara TNI dengan komponen bangsa lainya yang tergabung dalam Satgas TMMD belum maksimal terutama respon dan antusias masyarakat. Saran dalam penulisan ini paling menonjol adalah berkaitan dengan dimensi efektifitas kemanunggalan TNI dan Rakyat perlu perhatian pada dimensi kesadaran berbangsa dan bernegara yang hasilnya berada di bawah rata-rata.

Persamaannya dengan menggunakan teori kerja sama dan membahas tentang pelaksanaan TMMD. Perbedaannya adalah pembahasan Fokus pada implementasi TMMD Dalam pemberdayaan wilayah pertahanan hanya fokus terhadap hubungan kerjasama dengan efektifitas pelaksanaan program TMMD mewujudkan ketahanan wilayah

Dari uraian tersebut diatas maka hasil evaluasi penelitian tentang Manfaat hasil program TMMD adalah dengan tujuan dan sasaran program TMMD, sangat tepat berguna bagi masyarakat desa dan sekitarnya yang memerlukan dan keberadaan TNI di harapkan olehnya sehingga tujuan diantara instansi terpenuhi. Untuk struktur organisasi TMMD sebaiknya sama dengan struktur organisasi Kodim, hanya ada tambahan pendukung dari unsur-unsur Pemda sebagai tim asistensi dan masyarakat sehingga disebut organisasinya sebagai organisasi Satgas (Satuan Tugas) TMMD untuk mencapai hasil yang di harapkan baik begiatan non fisik maupun fisik. Adapun kegiatan non fisik juga bertujuan untuk meningkatkan semangat bela Negara, cinta tanah air dan wawasan kebangsaan serta meningkatkan semangat gotong royong yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan Ruang Alat Kondisi (RAK) juang yang tangguh. Dengan demikian juga adanya kebijakan prajurit TNI tinggal dan menetap bersama rakyat menyebabkan terwujudnya Kemanunggalan TNI Rakyat.

BAB 5
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor pada periode 2014-2016 sudah berjalan sesuai ketentuan, namun belum optimal khususnya tentang partisipasi masyarakat. Hasil yang dicapai dapat mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan. Hal ini terlihat dari out put implementasi program TMMD di wilayah Kab Bogor terbangunnya infra struktur jalan yang dapat digunakan sebagai sarana atau alat juang dalam operasi perang. Kemudian terbentuknya mental dan karakter masyarakat sebagai kader Bela Negara yang akan menjadi alat juang dalam operasi perang sesuai konsep Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen pendukung (Komduk).

5.1.1 Implementasi program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat.

1) Peran dan partisipasi pemda. memberi alokasi anggaran APBD setiap tahun, serta di dukung oleh masing –masing instansi yang terkait dengan peran dan parsipisasinya.

2) Pemda Kabupaten Bogor tidak mempunyai regulasi (Perda) . Pemda Kabupaten Bogor tidak mempunyai regulasi (Perda), namun sangat mendukung dan membantu program TMMD.

3) Korem 061/SK pernah melaksanakan sosialisasi. Korem 061/SK pernah melaksanakan sosialisasi, pernah dan sebaiknya

diadakan sosialisasi dengan melibatkan Kementerian/LPNK, Pemda dan instansi terkait lainnya.

4) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan TMMD. partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan TMMD, tergantung wilayahnya, ada beberapa wilayah kurang optimal karena masyarakat merantau.

5) Partisipasi masyarakat dalam menentukan sasaran fisik dan non fisik program TMMD. partisipasi masyarakat dalam menentukan sasaran fisik dan non fisik program TMMD sudah berjalan dan masyarakat banyak memberi saran dan masukan tentang kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan masyarakat terkait namun saran-saran belum tentu terpenuhi karena keputusan bukan ditangan masyarakat.

6) Kondisi masyarakat yang telah melaksanakan program. Kondisi masyarakat yang telah melaksanakan program TMMD menyampaikan kondisinya jadi lebih baik karena TMMD sangat membantu apa yang diinginkan masyarakat terpenuhi dan kedekatan TNI mereka merasa nyaman dan aman.

Kesimpulannya implementasi program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat kurang optimal disebabkan karena tidak adanya regulasi (Perda) yang mendukung program TMMD, sosialisasi program TMMD tidak akurat dan konsisten, penentuan sasaran TMMD oleh elit desa dan tokoh masyarakat, namun pada umumnya kondisi masyarakat yang wilayah telah melaksanakan program TMMD kondisinya jadi lebih baik, dekat dengan TNI, aman dan nyaman.

5.1.2 Hasil implementasi program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat.

1) Tujuan dan sasaran program TMMD. Sangat tepat berguna bagi masyarakat desa dan sekitarnya yang memerlukan keberadaan TNI dan harapkan olehnya sehingga tujuan diantara instansi terpenuhi.

2) Struktur organisasi TMMD dapat menunjang terwujudnya pemberdayaan wilayah pertahanan. Karena struktur organisasi TMMD sama dengan struktur organisasi Kodim, hanya ada tambahan pendukung dari unsur-unsur Pemda sebagai tim asistensi dan masyarakat sehingga disebut organisasinya sebagai organisasi Satgas (Satuan tugas) TMMD.

3) Hasil Program TMMD berdampak pada terwujudnya ruang alat kondisi (RAK). Sangat berdampak yaitu hasil pencapaian Program TMMD dapat mendukung Pemberdayaan wilayah Pertahanan dan sistem Pertahanan Negara di wilayah melalui pencapaian hasil kegiatan fisik TMMD yaitu pembangunan sarana infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendukung terwujudnya pemberdayaan wilayah pertahanan. Adapun kegiatan non fisik juga bertujuan untuk meningkatkan semangat bela Negara, cinta tanah air dan wawasan kebangsaan serta meningkatkan semangat gotong royong yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan Ruang Alat Kondisi (RAK) juang yang tangguh.

4) Hasil TMMD mewujudkan kemanunggalan TNI dan Rakyat., baik karena pada saat TMMD terjalin komunikasi yang baik antara

masyarakat dan TNI dan sikap perilaku prajurit TNI selama kegiatan TMMD di desa Rabak sangat baik, ramah dan bisa berbaur dengan masyarakat. Tidak ada yang arogan, tidak ada yang jadi mandor. Hal ini terlihat ketika prajurit TNI istirahat makan siang, masyarakat yang tadinya sama-sama bekerja ada yang ikut makan bersama, tetapi untuk bekalnya bawa masing-masing, Demikian juga adanya kebijakan prajurit TNI tinggal dan menetap bersama rakyat menyebabkan terwujudnya Kemanunggalan TNI Rakyat.

Kesimpulannya dengan tujuan dan sasaran program TMMD yang tepat dan struktur organisasi TMMD yang terpadu dengan unsur-unsur Pemda maka hasil yang di harapkan untuk meningkatkan semangat bela Negara, cinta tanah air dan wawasan kebangsaan serta meningkatkan semangat gotong royong guna mewujudkan Ruang Alat Kondisi (RAK) juang yang tangguh serta kemanunggalan TNI dan Rakyat akan tercapai.

5.2 **Rekomendasi**

5.2.1 Tingkat partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam program TMMD.

1) Mabes TNI/TNI AD menyarankan kepada Kementerian Dalam Negeri agar Pemda setempat membuat regulasi setingkat Perda untuk mengoptimalkan peran dinas-dinas dan instansi di lingkungan Pemda dalam mendukung program TMMD.

2) Agar Mabes TNI/Mabes TNI-AD membuat buku panduan atau pedoman pelaksanaan tentang mekanisme *Bottom Up Planning* yang bersifat tekhnis dan disosialisasikan kepada Pemda dan masyarakat untuk menjadi acuan di lapangan.

3) Mabes TNI/Mabes TNI AD perlu mendesign ulang Program TMMD, disesuaikan dengan kondisi masyarakat millenial untuk menjaring partisipasi masyarakat, dengan mengkolaborasi program yang ada dengan program yang menarik minat dan partisipasi masyarakat melalui komsos kreatif dan peningkatan peran tokoh masyarakat.

5.2.2 Hasil implementasi program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat.

1) Mabes TNI/ TNI-AD perlu mendesign ulang konsep sosialisasi program TMMD sehingga dapat menjelaskan tentang makna sesungguhnya program TMMD dari perspektif pertahanan karena implementator secara keseluruhan baik personel Kodim, Pemda maupun masyarakat belum memahami bahwa program TMMD bukan sekedar program sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saja namun juga untuk menyiapkan potensi wilayah menjadi potensi pertahanan.

2) Pemda Kabupaten Bogor perlu segera menindaklanjuti hasil program TMMD ini dengan pemeliharaan dan peningkatan kualitas dalam waktu yang tidak terlalu lama misalnya yang semula jalan diperkeras menjadi jalan aspal/beton agar kemanfaatan program TMMD dapat benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga dapat untuk menyiapkan potensi wilayah menjadi potensi pertahanan.

DAFTAR PUSTAKA

Aan Komariah dan Djam'an Satori.(2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Abu Achmadi dan Nabuko Cholid, (2013), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.

Adi Sasmita Rahardjo.(2013). Teori-teori Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Agustino Leo (2006). Dasar-dasar Kebijakan Publik .Bandung.CV.Alfabeta

Alfitra Salam,(2007), Peran TNI manunggal dalam pembangunan Desa, Rosda karya bandung.

Aliadi, Arif dkk (1994), Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Hutan, studi di Ujung Kulon Jawa Barat, Tenganan Bali, Krui lampung, diterbitkan Walhi, cetakan pertama.

A.Muri Yusuf. (2014). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitan Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group.

Arikunto. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Basrowi dan Suwandi.(2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta:

Bagong Suyanto dan Sutinah, (2013), *Opcit*.

Bakry, Umar Suyadi. (2016). Metode Penelitian Hubungan Internasional, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Beni Ahmad Saebani.(2015). Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian. Bandung: Pustaka Setia

Bungin, M. Burhan.(2008). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bungin, Burhan. (2003).Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofisdan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Cresswell, John W. (2014). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset.Yogyakarta.Pustaka Pelajar.

Cresswell, John W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design Chosing Among Five Tradition London : Sage Publications.

Edward III George.(1980).*Implementacy Public Policy*. Washington DC: Congresional Press.

George C (edited). (1990), *Public Policy Implementing,*Jai Press Inc,London-England.Goggin,Malcom L *et al.*

Haris Herdiansyah.(2014).*Metodologi Penelitian Untuk Ilmu-ilmu Sosial.* Jakarta: Salemba Humanika.

Haris Herdiansyah.(2015). *Metodologi Penelitian kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*. Jakarta: Salemba Humanika.

Hasibuan, Malayu.S.P.,(1996). Manajemen Dasar,Pengertian dan Masalah, edisi kedua,Jakarta:PT.gunung Agung.

Idrus, Muhammad, (2009). Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua), Jakarta: Erlangga,

Iin Tri Rahayu dan Triastiadi Ardani, (2004). *Observasi dan Wawancara* (Malang: Banyu-media.

Jones O Charles. (1996). Pengantar Kebijakan Public (terjemahan). Jakarta: PT Raja Grafindo persada.

Kartasasmita,Ginandjar.(1996). Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan.Jakarta.CIDES

Kementerian Pertahanan RI, Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015.

Kementerian Pertahanan RI, Doktrin Pertahanan Negara, 2015

Kementerian Pertahanan RI, Strategi Pertahanan Negara, 2015

Kementerian Pertahanan RI, Postur Pertahanan Negara, 2015

Kodim 0621/Kab Bogor,Rencana Pelaksanaan TMMD ke-97 tahun 2014.

Kodim 0621/Kab Bogor,Laporan Pelaksanaan TMMD ke-97 tahun 2014

Kodim 0621/Kab Bogor,Rencana Pelaksanaan TMMD ke-99 tahun 2016

Kodim 0621/Kab Bogor,Laporan Pelaksanaan TMMD ke-99 tahun 2016

Kodim 0621/Kab Bogor,Rencana Pelaksanaan TMMD ke-102 tahun 2018

Kodim 0621/Kab Bogor,Laporan Pelaksanaan TMMD ke-102 tahun 2018.

Korten.David C. dan Syahrir.(1980) Pembangunan Berdimensi Kerakyatan.Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kountur,Ronny.(2009). Metode Penelitian untuk penulisan skripsi dan tesis.Manajemen PPM, Jakarta.

Meter Donald Vans dan Carls E Van Horn.(1975). *The Policy implementation Process: A Conseptual Framework Administration & Society.Sage Publication,Inc*

Miles, B. Mathew dan M. Huberman.(1992).*Analisis Data Kualitatif Buku*

Mochtar,Mas'oed.(1990) Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi.Jakarta.LP3ES

Moekijat,(2006). Manajemen Sumberdaya, Penerbit PT Gramedia.

Moloeng,(2005). *Metode Penelitian*, Yokyakarta: Pustaka Pelajar.

Moloeng. (2005). *Metode Penelitian*, Yokyakarta: Pustaka Pelajar

Mulyana, Slamet.(2008). “Sinergitas dan Kemitraan Perencanaan”

Nugroho, Bunaffit. (2013). Panduan Proyek membuat Aplikasi Web Penggajian dengan PHP, MySQL dan Dreamweaver Book. Terbitan Alif Media.

Nurdin Syafrudin dan Usman Basyirudin.(2003). Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum.

Oakley, P. (1991). Projects with People : The Practice of Participation in Rural Development. Geneva : International Labour Office Genev.

Purwatiningsih, Eny “Efektifitas Pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Dalam Mewujudkan Ketahanan Wilayah”.

Pusat Penerangan TNI, Majalah Patriot edisi Desember 2017.

Putra,Fadillah.(2001).Paradigma Kritis dalam study kebijakan public,Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.

Riant Nugroho, 2003, Kebijakan Publik,Formulasi Implementasi dan Evaluasi Penerbit PT Alex Media Kompetindo Kelompok Gramedia Jakarta.

Riant Nugroho,2008, Kebijakan Publik,Formulasi Implementasi dan Evaluasi Penerbit PT Alex Media Kompetindo Kelompok Gramedia Jakarta.

Sherry R. Arnstein (1969), A Ladder of Citizen Participation JAIP, Vol 3.

Staf Teritorial TNI AD, Buku Pedoman Penyelenggaraan TMMD tahun 2019.

Sugandha,Dann.(1991). Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi.Jakarta:PT Intermedia.

Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta

Sugiyono.2010.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono.2012. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono 2016,Memahami Penelitian Kualitatif,Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Op cit*.

Suharto, Edi.(2005).Membangun masyarakat memberdayakan rakyat.Bandung:Refika Aditama.

Sumodiningrat, Gunawan. (1998). Membangun Perekonomian Rakyat.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suparjan & Suyatno, H. (2003). Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan.Yogyakarta : Aditya Media.

Suwarjeni.V.Wiratna (2016). Pengantar Akuntasi Bandung : PT.Refika Aditama.

Syahriani dan Syakrani.(2009). Implementasi otonomi Daerah dalam perspektif good governance. Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Tachjan.(2006). Implementasi Kebijakan Publik.Bandung:AIPI

Tri Winarni.(1998).Memahami Pemberdayaaan Masyarakat desa Partisipasif dalam oreintasi Pembangunan Masyarakat desa menyongsong abad

21 menuju Pembrdayaan Pelayanan Masyarakat. Yogyakarta: Aditya Media.

Totok. 2015. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik.2015.Alfabeta. Mardikanto Bandung)

Ulber Silalahi. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung; Refika Aditama.

Yusuf. Muri. 2014.*Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Wahab,Abdul Solichin.1997. Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara,Edisi kedua, Bumi Aksara.

Peraturan/Per-Undang-undangan

Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI

Undang-Undang RI nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang penganggaran APBD

Peraturan Presiden RI nomor 97 tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2015-2019.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional.

Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1981 tanggal 13 Pebruari 1981 tentang Mekanisme pengendalian pelaksanaan program TNI ABRI Masuk Desa.

Surat Menteri Dalam Negeri RI kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Nomor 413.4/1817/SJ tanggal 9 Agustus 2007 tentang Dukungan pendanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan TMMD.

Surat Menteri Dalam Negeri RI kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 tentang dukungan penyelenggaraan kegiatan TMMD dilaksanakan melalui hibah dan bantuan daerah.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Nomor 13.4/871/SJ tanggal 28 April 2006 tentang Pedoman penyusunan anggaran APBD untuk Program TMMD.

Peraturan Menteri Pertahanan RI nomor 19 tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara tahun 2015-2019.

Surat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor Skep/596/V/1980 tanggal 31 Mei 1980 tentang Pengesahan buku pola dasar konkretisasi Kemanunggalan ABRI dan Rakyat dan pola operasional TNI ABRI Masuk Desa

Surat Keputusan Menhankam/ Pangab Nomor :Skep/566/V/ 1980 tanggal 30 Mei tahun 1980 tentang ABRI Masuk Desa (AMD).

Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/23/IV/2008 tanggal 30 April 2008 tentang Organisasi dan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa.

Keputusan Panglima TNI nomor Kep/1070/XII/2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Bakti TNI.

Keputusan Kasad selaku PJO TMMD Nomor Kep/ 01/ XI/ 2016 tanggal 17 November 2017 tentang TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/98/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Buku Petunjuk Induk tentang Pembinaan Teritorial.

Sumber On Line (Internet)

Deni Andriana*,"Triangulasi Dan Keabsahan Data*", Kategori Tulisan : *Reseach Methods* http://goyangkarawang.com/2010/02/triangulasi-dan-keabsahan-data-dalampenelitian/ (diakses 20 April 2014).

Kepala Pusat komunikasi publik Kemhan; //www.beritasatu.com) diakses pada tgl 16 Juli 2019

Wicaksono,Setiawan.(2006). Pengaruh Implementasi Total Quality Management (TQM) terhadap Budaya Kualitas (Study pada PT.Hari Terang Industri Surabaya.(on line). Tersedia http://www.damandiri.or.id/file/setiawanwicaksono unbraw [28 Juli 2008] di akses pada 15 Juni 2019.

tempo.co.id, Sabtu 18 Mei 2019, https://fokus.tempo.co/read/1206989/ancaman-teror-bom- diakses pada 17 Juli 2019

LAMPIRAN 1. CATATAN LAPANGAN HASIL OBSERVASI

HASIL OBSERVASI

Hari/Tanggal : 5, 6, 7, 8 Agustus 2019
Waktu : 08.00 – 14.00 wib
Tempat : Bogor
Kode Instrumen : A1,A2,A3

Komponen	Aspek yang diamati	Sumber Data	Hasil Pengamatan	
			Ada	Tidak Ada
Komunikasi Struktur Birokrasi Disposisi/ sikap pelaksanan Sumber Daya	1. hasil TMMD mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat 2.tujuan dan sasaran program TMMD 3.peran dan partisipasi Pemda terhadap program TMMD 4.Pemda Kab Bogor mempunyai regulasi (Perda) untuk mendukung program TMMD 5.kondisi masyarakat yang di wilayahnya telah dilaksanakan program TMMD 6. Pemda Kab Bogor mempunyai regulasi (Perda) untuk mendukung program TMMD	1. Surat edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur/Bupati/Walikota Nomor 13.4/871/SJ tanggal 28 April 2006 tentang pedoman penyusunan anggaran APBN untuk program TMMD 2. Surat Menteri Dalam Negeri RI Kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota dan pimpinan DPRD propinsi/kabupaten/kota Nomor 413.4/1817/SJ tanggal 9 Agustus 2007 tentang dukungan pendanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan TMMD 3. Surat Menteri Dalam Negeri RI kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan pimpinan DPRD Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 tentang dukungan anggaran kegiatan TMMD melalui hibah dan bantuan daerah 4. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 140/174/SJ tanggal 16 Januari 2017 tentang penambahan kegiatan program TMMD dari 2 kali menjadi 3 kali dalam setahun	√ √ √ √ √	

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada bulan Agustus, selanjutnya dilakukan observasi kembali berturut-turut pada tanggal 5,6,7,8 observasi difokuskan kepada Bupati, Kepala dinas PMPD dan Kepala Dinas PUPR mulai dari pagi sampai dengan siang. Hasil observasi menunjukkan untuk partisipasi masyarakat dalam program TMMD kurang baik hal ini terbukti bahwa masyarakatnya banyak yang merantau dan bekerja di luar daerah Bogor. Sasaran TMMD pembangunan fisik dan non fisik di antaranya pembangunan infrastruktur baik jalan maupun jembatan, serta pembekalan bela negara dan peningkatan wawasan kebangsaan, penanaman nilai-nilai ideologi pancasila, pencegahan penyalahgunaan narkoba, penyuluhan agama tentang deradikalisasi paham keagamaan, dan penyuluhan serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat. TMMD sebagai wujud pengabdian TNI bersama rakyat, untuk membantu percepatan pembangunan di daerah tertinggal demi tercapainya kesejahteraan bagi rakyat, Melalui kegiatan TMMD sangat membantu Pemda dalam upaya mempercepat pembangunan di wilayah. Pada dasarnya TMMD adalah sebagai bentuk partisipasi TNI dalam pembangunan di daerah yang berdaya guna, bagi kepentingan pembangunan, peningkatan kesejahteraan.

HASIL OBSERVASI

Hari/Tanggal : 5 Agustus 2019
Waktu : 08.00 – 14.00 wib
Tempat : Paban Bakti TNI Ster Mabes TNI
Kode Instrumen : B1

Komponen	Aspek yang diamati	Sumber Data	Hasil Pengamatan	
			Ada	Tidak Ada
Komunikasi	1. pernah melaksanakan sosialisasi program TMMD 2. hasil program TMMD berdampak pada terwujudnya Ruang-Alat-Kondisi Juang di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor	Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/23/IV/2008 tanggal 30 April 2008 tentang Organisasi dan Tugas TMMD	√	
Struktur Birokrasi	3.struktur organisasi TMMD dapat menunjang terwujudnya pemberdayaan wilayah pertahanan 4. tujuan dan sasaran program TMMD.			
Disposisi/ sikap pelaksanan	-			
Sumber Daya	5. partisipasi masyarakat dalam menentukan sasaran fisik dan non fisik program TMMD			

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada bulan Agustus, selanjutnya dilakukan observasi kembali berturut-turut pada tanggal 5 Agustus 2019 observasi difokuskan kepada Paban Bakti Ster Mabes TNI pada siang hari. Hasil observasi menunjukkan untuk partisipasi masyarakat

dalam program TMMD belum baik hal ini terbukti bahwa dalam melaksanakan sosialisasi Program TMMD masyarakatnya kurang antusias sedangkan untuk TNI sendiri secara terus menerus setiap tahunnya melaksanakan Rapat Koordinasi penyelenggaraan TMMD dan Rapat Paripurna TMMD sebagai evaluasi pelaksanaan TMMD tahun berjalan serta rencana penyelenggaraan TMMD tahun berikutnya dengan melibatkan Kementerian/LPNK, Pemda dan instansi terkait lainnya. Menurut Paban bahwa Program TMMD dapat mendukung Pemberdayaan wilayah Pertahanan dan sistem Pertahanan Negara di wilayah karena bertujuan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik dan non fisik dan memantapkan kemanunggalan TNI-Rakyat dalam rangka menyiapkan Ruang Juang, Alat Juang dan Kondisi Juang yang tangguh dan sebaiknya kerjasama dengan instansi lain sangat diperlukan.

HASIL OBSERVASI

Hari/Tanggal : Jumat 2 Agustus 2019
Waktu : 08.00 – 14.00 wib
Tempat : Paban V / Bakti Sterad Mabesad
Kode Instrumen : B2

Komponen	Aspek yang diamati	Sumber Data	Hasil Pengamatan	
			Ada	Tidak Ada
Komunikasi	1. pernah melaksanakan sosialisasi program TMMD 2. hasil program TMMD berdampak pada terwujudnya Ruang-Alat-Kondisi Juang di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor	1. Surat Keputusan Kasad selaku PJO TMMD Nomor Skep/03/VIII/2006 tanggal 10 AGUSTUS 2006 tentang pengangkatan Tim Asistensi Departemen dan LPNK dalam staf PJO TMMD 2.Buku Juk Teknik tentang Bakti TNI Nomor Perkasad 36.02/XII/2012 tanggal 27 Desember 2017	√ √	
Struktur Birokrasi	3.struktur organisasi TMMD dapat menunjang terwujudnya pemberdayaan wilayah pertahanan 4. tujuan dan sasaran program TMMD.	3. Keputusan Kasad Nomor Kep/01/XI/2016 tanggal 17 Nopember 2017 tentang buku program terpadu TMMD tahun 2017	√	
Disposisi/ sikap pelaksanan	-			
Sumber Daya	5. partisipasi masyarakat dalam menentukan sasaran fisik dan non fisik program TMMD			

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada bulan Agustus, selanjutnya dilakukan observasi kembali berturut-turut pada tanggal 2 Agustus 2019 observasi difokuskan kepada Paban V/ Bakti Sterad Mabesad pada siang hari. Hasil observasi menunjukkan untuk partisipasi masyarakat

dalam program TMMD juga mengatakan kurang baik hal ini terbukti bahwa sosialisasi Program TMMD di daerah dilaksanakan oleh Pendam/Penrem dan Kodim kurang di dukung kalau diundang misalnya 150 orang yang datang kurang lebihnya 50 orang hal ini di sebabkan karena banyak faktor di antaranya banyak yang bekerja di luar daerah, banyak yang menjadi petani dan bisnis sendiri menurutnya sangat rugi apabila tidak menghasilkan uang sehingga perlu adanya koordinasi antar stake holder untuk di tingkat pusat dilaksanakan oleh Sterad pada saat Rakornis TMMD yang mengundang seluruh Bupati/Walikota dan pejabat Kementerian/LPNK.

Adapun tujuan dari program TMMD dihadapkan dengan perspektif pertahanan adalah untuk menyiapkan dan mengolah potensi wilayah untuk mendukung pertahanan aspek darat berdasarkan kepada unsur Geoografi, Demografi dan Kondisi Sosial untuk mendukung RAK Juang yang tangguh melalui kegiatan fisik (pembangunan infrastruktur) dan non fisik (penyuluhan bela negara/wasbang).

HASIL OBSERVASI

Hari/Tanggal : Selasa 30 Juli 2019
Waktu : 08.00 – 14.00 wib
Tempat : Danrem 061/SK
Kode Instrumen : B3

Komponen	Aspek yang diamati	Sumber Data	Hasil Pengamatan	
			Ada	Tidak Ada
Komunikasi	1. pernah melaksanakan sosialisasi program TMMD	1..Buku Juk Teknik tentang Bakti TNI Nomor Perkasad 36.02/XII/2012 tanggal 27 Desember 2017	√	
	2. hasil program TMMD berdampak pada terwujudnya Ruang-Alat-Kondisi Juang di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor	2. Keputusan Kasad Nomor Kep/01/XI/2016 tanggal 17 Nopember 2017 tentang buku program terpadu TMMD tahun 2017	√	
Struktur Birokrasi	3.struktur organisasi TMMD dapat menunjang terwujudnya pemberdayaan wilayah pertahanan	3.Petunjuk Penyelenggaraan Bakti TNI, Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 1070/XII/2017	√	
	4. tujuan dan sasaran program TMMD.			
Disposisi/ sikap pelaksanan	-			
Sumber Daya	5. partisipasi masyarakat dalam menentukan sasaran fisik dan non fisik program TMMD			

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada bulan Juli , selanjutnya dilakukan observasi kembali pada tanggal 30 Juli 2019 observasi difokuskan kepada Danrem dari pagi sampai pada siang hari. Hasil observasi menunjukkan partisipasi masyarakat belum baik, masyarakat

memberi saran dan masukan tentang sasaran fisik dan non fisik sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat dilibatkan sesuai ketentuan sebagaimana tertuang dalam buku pedoman penyelenggaraan TMMD tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Staf territorial TNI AD yang menyatakan bahwa proses penentuan/pemilihan sasaran dilaksanakan dengan mekanisme secara terpadu dan terkoordinasi dimulai dari tingkat Desa atau Kelurahan melalui forum rapat LMD (Lembaga Musyawarah Desa) atau LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) dan BPD (Badan Pengawas Desa) atau Dekel (Dewan Kelurahan) atau yang sejenis lainnya. Hasil rapat di tingkat Desa/Kelurahan ini diajukan ke tingkat Kecamatan dalam diskusi UDKP (Unit Desa Kerja Pembangunan). Kemudian saran kegiatan yang terpilih diteliti dan dipadukan dengan rencana program pembangunan Pemda tingkat Kabupaten/Kota, serta dikoordinasikan dalam Rapat Rencana Pembangunan Daerah (Renbangda) selanjutnya diusulkan melalui rapat dengan DPRD untuk disahkan menjadi Program Pembangunan Daerah.

HASIL OBSERVASI

Hari/Tanggal : Kamis 8 Agustus 2019
Waktu : 08.00 – 14.00 wib
Tempat : Dandim
Kode Instrumen : B4

Komponen	Aspek yang diamati	Sumber Data	Hasil Pengamatan	
			Ada	Tidak Ada
Komunikasi	1. pernah melaksanakan sosialisasi program TMMD	1.Kep Pangdam III/Slw Nomor. KEP/53/IV/1985 tanggal 28 Februari 1985 tentang tugas Kodim.	√	
	2. hasil program TMMD berdampak pada terwujudnya Ruang-Alat-Kondisi Juang di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor	2.Peraturan Kasad Nomor 111/12/ 2012 tentang Organisasi Kodim	√	
Struktur Birokrasi	3.struktur organisasi TMMD dapat menunjang terwujudnya pemberdayaan wilayah pertahanan			
	4. tujuan dan sasaran program TMMD.			
Disposisi/ sikap pelaksanan	-			
Sumber Daya	5. partisipasi masyarakat dalam menentukan sasaran fisik dan non fisik program TMMD			

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada bulan Juli , selanjutnya dilakukan observasi kembali pada tanggal 30 Juli 2019 observasi difokuskan kepada Dandim dari pagi sampai pada siang hari. Hasil observasi menunjukkan sudah ada sosialisasi tingkat pedesaan yang

membutuhkan bantuan Tni dalam hal ini TMMD, dimana tingkat partisipasi masyarakat cukup baik, terkait serta diberikan arahan-arahan mekanisme dalam program tersebut. Kemungkinan kendala menonjol yang akan dihadapi yaitu medan yang sangat sulit dijangkau dan pendistribusian material serta alat-alat berat dan logistic serta cara mengatasinya. Dijelaskan juga tentang maksud, tujuan dan sasaran yang ingin dcapai dalam program TMMD. dapat membantu meningkatkan kesejahteran masyarakat melalui pembangunan akses jalan, sarana ibadah dan lain-lain sehingga dapat mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan dan sistem pertahanan negara di wilayah Kab Bogor.

HASIL OBSERVASI

Hari/Tanggal : Kamis 8,12,13 Agustus 2019
Waktu : 08.00 – 14.00 wib
Tempat : Pasiter,Danramil 2112 dan Danramil 2118
Kode Instrumen : C1,C2,C3

Komponen	Aspek yang diamati	Sumber Data	Hasil Pengamatan	
			Ada	Tidak Ada
Komunikasi	1. pernah melaksanakan sosialisasi program TMMD	1.Kep Pangdam III/Slw Nomor. KEP/53/IV/1985 tanggal 28 Februari 1985 tentang tugas Kodim.	√	
	2. hasil program TMMD berdampak pada terwujudnya Ruang-Alat-Kondisi Juang di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor	2.Peraturan Kasad Nomor 111/12/ 2012 tentang Organisasi Kodim	√	
Struktur Birokrasi	3.struktur organisasi TMMD dapat menunjang terwujudnya pemberdayaan wilayah pertahanan			
	4. tujuan dan sasaran program TMMD.			
Disposisi/ sikap pelaksanan	-			
Sumber Daya	5. tingkat partisipasi masyarakat dan pelibatan masyarakat dalam program TMMD			
	6.partisipasi masyarakat dalam menentukan sasaran fisik dan non fisik program TMMD			

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada bulan Juli , selanjutnya dilakukan observasi kembali pada tanggal 8,12,13 Agustus 2019 observasi difokuskan kepada Menurut saya, sampai saat ini, untuk kendala di lapangan tidak semua dapat diselesaikan, sekalipun lokasi memang yang sulit dijangkau. Sering mengikuti kegiatan TMMD namun untuk di satuan wilayah Koramil sendiri, saya belum pernah dikarenakan baru menjabat setelah pelaksanaan TMMD selesai. Untuk masyarakat, sangatlah bersyukur,dengan adanya program TMMD yang pada awalnya lokasi yang sulit di tempuh oleh masyarakat sekitar. Namun dengan adanya TMMD, maka masyarakat sekitar sangat antusias, untuk mendukung program TMMD yang dilakukan oleh apparat territorial. Pasiter,Danramil 2112 dan Danramil 2118, sepanjang pengamatan kami dilapangan, bahwa selama kegiatan TMMD, telah terjalin komunikasi dan hubungan saling asah, asih ,asuh antara prajurit TNI dan masyarakat. Adanya kreativitas satgas TMMD sebagai penunjang terwujudnya hubungan yang harmonis yaitu adanya kebijakan yang mengharuskan prajurit untuk tinggal di rumah-rumah rakyat, makan bersama rakyat sehingga terwujud kemanunggalan TNI Rakyat. Menurut saya, sampai saat ini, untuk kendala di lapangan tidak semua dapat diselesaikan, sekalipun lokasi memang yang sulit dijangkau. Sering mengikuti kegiatan TMMD namun untuk di satuan wilayah Koramil sendiri, saya belum pernah dikarenakan baru menjabat setelah pelaksanaan TMMD selesai. Untuk masyarakat, sangatlah bersyukur,dengan adanya program TMMD yang pada awalnya lokasi yang sulit di tempuh oleh masyarakat sekitar. Namun dengan adanya TMMD, maka masyarakat sekitar sangat antusias, untuk mendukung program TMMD yang dilakukan oleh apparat territorial.

LAMPIRAN 2. TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA PENELITIAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR	
Narasumber : Bupati Kab. Bogor **Waktu : Kamis, 8 Agustus 2019** **Kode : A-1**	
Model Teori	**A.Implementasi program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat?**
Sumber Daya	**1. Apakah peran dan partisipasi Pemda terhadap program TMMD?** Dalam kegiatan TMMD, semua stake holder unsur perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor ikut berperan aktif dalam menunjang keberhasilan TMMD, baik sasaran kegiatan fisik maupun non fisik dimana Bupati berkedudukan sebagai pelindung dalam Tim Assistensi tingkat Kabupaten. TMMD adalah program kegiatan TNI dan Pemerintah daerah Kabupaten Bogor berperan sebagai penunjang dan memfasilitasi kelancaran kegiatan TMMD di masing-masing daerah
Struktur Birokrasi	**2. Apakah Pemda Kab Bogor mempunyai regulasi (Perda) untuk mendukung program TMMD? Jelaskan** Secara aturan tidak tersurat dalam Perda, akan tetapi secara hubungan Vertikal antara Pemda Kab. Bogor dengan unsur TNI dalam hal ini Kodim 0621/Kab. Bogor, Pemda Kab. Bogor memberikan dukungan melalui Hibah bantuan keuangan kegiatan TMMD karena program TMMD membantu pemerintah dalam percepatan dan pemerataan pembangunan pedesaan. Dengan adanya program TMMD ini, ekonomi masyarakat ikut mengalami peningkatan karena jalur transportasi makin mudah dijangkau. Untuk itu, program yang mulia dan sangat bermanfaat terutama bagi masyarakat pedesaan dan pedalaman ini hendaknya makin disebarluaskan ke daerah-daerah lain yang belum merasakan sentuhan

	TMMD.
Sikap pelaksana/ disposisi	3. **Bagaimana kondisi masyarakat yang di wilayahnya telah dilaksanakan program TMMD.** Dengan terbukanya akses jalan, memudahkan masyarakat untuk menjangkau tempat pelayanan di desa seperti kantor desa, sekolah, pasar dan puskesmas sehingga dapat merubah kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik
	B. Hasil implementasi program TMMD khususnya tentang partisipasi masyarakat dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor.
Struktur Birokrasi	**4. Apa tujuan dan sasaran program TMMD. Jelaskan?** Tujuan kegiatan TMMD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memantapkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bela negara dan disiplin nasional. Sasaran TMMD pembangunan fisik dan non fisik di antaranya pembangunan infrastruktur baik jalan maupun jembatan, serta pembekalan bela negara dan peningkatan wawasan kebangsaan, penanaman nilai-nilai ideologi pancasila, pencegahan penyalahgunaan narkoba, penyuluhan agama tentang deradikalisasi paham keagamaan, dan penyuluhan serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat.
Komunikasi	**5. Apakah hasil TMMD mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor?** Pada dasarnya TMMD adalah sebagai bentuk partisipasi TNI dalam pembangunan di daerah yang berdaya guna, bagi kepentingan pembangunan, peningkatan kesejahteraan maupun, pertahanan dan ketahanan negara. Program TMMD dapat meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bogor serta selama pelaksanaan TMMD terjalin hubungan yang harmonis antara prajurit TNI dan rakyat sehingga

	mewujudkan Kemanunggalan TNI-Rakyat karena program TMMD membantu mengatasi kesulitan rakyat.

Wawancara dengan Bupati Kab. Bogor

Narasumber	**: Kepala Dinas PMPD Kab Bogor**
Waktu	**: Senin, 5 Agustus 2019**
Kode	**: A-2**
Model Teori	**A. Implementasi program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat?**
Sumber Daya	**1. Bagaimana peran dan partisipasi Pemda terhadap program TMMD?** Peran dan partisipasi Pemda Kab Bogor dalam pelaksanaan TMMD adalah mengalokasikan dukungan anggaran APBD untuk membiayai sasaran fisik dan non fisik, menyediakan tim asistensi tekhnis pelaksanaan. Karena secara hubungan Vertikal antara Pemda Kab. Bogor dengan unsur TNI dalam hal ini Kodim 0621/Kab.

	Bogor, Pemda Kab. Bogor memberikan dukungan melalui Hibah bantuan keuangan kegiatan TMMD.
Struktur Birokrasi	**2. Apakah Pemda Kab Bogor mempunyai regulasi (Perda) untuk mendukung program TMMD? Jelaskan** Secara aturan tidak ada dalam Perda, namun secara hubungan Vertikal antara Pemda Kab. Bogor dengan unsur TNI dalam hal ini Kodim 0621/Kab. Bogor, Pemda Kab. Bogor memberikan dukungan melalui Hibah bantuan keuangan kegiatan TMMD karena Program TMMD dapat meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bogor yaitu TMMD merupakan terobosan dalam percepatan pembangunan di perdesaan. Seperti pembukaan jalan di daerah yang terisolasi, baik yang menghubungkan antar desa, kecamatan maupun kabupaten, terbukanya akses jalan tersebut berdampak pada terbukanya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar (pendidikan, ekonomi dan kesehatan). Dengan adanya jalan yang bisa dilalui kendaraan roda empat, masyarakat akan mudah dan lancar dalam mengangkut hasil bumi, dengan demikian pendapatan masyarakat akan bertambah dan proses pembangunan disekitarnya akan semakin terbuka.
Sikap pelaksana/ Disposisi	3. **Bagaimana kondisi masyarakat yang diwilayahnya telah melaksanakan program TMMD apakah mengalami perubahan yang berarti kearah yang lebih baik, kondisi kesejahteraan dan kehidupan sosial, serta kemandirian masyarakatnya?** Kondisi masyarakat yang diwilayahnya telah dilaksanakan program TMMD mengalami perubahan menjadi lebih baik, kondisi kesejahteraan dan kehidupan sosialnya berubah sehingga masyarakatnya mandiri. Karena dengan terbukanya akses jalan, memudahkan masyarakat untuk menjangkau tempat pelayanan di desa seperti kantor desa, sekolah, pasar dan puskesmas sehingga dapat merubah

	kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik.
B. Hasil implementasi program TMMD khususnya tentang partisipasi masyarakat dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor.	
Struktur Birokrasi	**4. Apa tujuan dan sasaran program TMMD. Jelaskan?** Tujuan kegiatan TMMD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memantapkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bela negara dan disiplin nasional. Sasaran TMMD pembangunan fisik dan non fisik di antaranya pembangunan infrastruktur baik jalan maupun jembatan, serta pembekalan bela negara dan peningkatan wawasan kebangsaan, penanaman nilai-nilai ideologi pancasila, pencegahan penyalahgunaan narkoba, penyuluhan agama tentang deradikalisasi paham keagamaan, dan penyuluhan serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat. TMMD sebagai wujud pengabdian TNI bersama rakyat, untuk membantu percepatan pembangunan di daerah tertinggal demi tercapainya kesejahteraan bagi rakyat, Melalui kegiatan TMMD sangat membantu Pemda dalam upaya mempercepat pembangunan di wilayah. Pada dasarnya TMMD adalah sebagai bentuk partisipasi TNI dalam pembangunan di daerah yang berdaya guna, bagi kepentingan pembangunan, peningkatan kesejahteraan maupun
Komunikasi	**5. Apakah hasil TMMD mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor?** Menurut penilaian kami yaa, hal ini terlihat dari pelaksanaan TMMD di desa-desa. Masyarakat berkomunikasi dengan baik. Banyak masyarakat yang dibantu oleh prajurit TNI, diluar pelaksanaan TMMD, seperti memperbaiki rumah tempat tinggal mereka, memperbaiki kendaraan motor masyarakat, serta kalau malam membantu mengajar anak desa yang membuat PR dirumahnya masing-masing.

Dokumentasi Wawancara dengan Kadis PMPD Kabupaten Bogor

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR	
Narasumber : Kepala Dinas PUPR **Waktu : Selasa, 6 Agustus 2019** **Kode : A-3**	
Model Teori	**A. Implementasi program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat?**
Sumber daya	**1. Bagaimana peran dan partisipasi Pemda terhadap program TMMD?** Saya kira peran dan partisipasi Pemda cukup besar diantaranya mengalokasikan anggaran APBD untuk kegiatan TMMD dan melibatkan SKPD terkait untuk mendukung penuh karena kita merasakan pasca kegiatan TMMD di lokasi-lokasi sasaran kegiatan merasakan manfaat yang nyata secara bertahap dalam peningkatan indeks pembangunan manusia dari segala bidang kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan pemilihan desa tertinggal, terpencil, kumuh, rawan terhadap bencana alam, dan memiliki potensi sumber daya

	manusia dan sumber daya alam yang layak untuk dikembangkan. Walaupun tidak ada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor yang secara khusus diterbitkan dalam mendukung program TMMD, karena TNI merupakan instansi vertical bagi Pemerintah daerah Kabupaten Bogor, yang memiliki peraturan perundang-undangan yang berbeda dalam penyusunan program, perencana kegiatan, pengelolaan keuangan dan lain sebagainya. Kegiatan TMMD dilaksanakan karena ada keterkaitan dalam tugas pokok dan fungsi bersama Pemerintah daerah.
Struktur Birokrasi	**2. Apakah Pemda Kab Bogor mempunyai regulasi (Perda) untuk mendukung program TMMD. Jelaskan** Tidak ada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor yang secara khusus diterbitkan dalam mendukung program TMMD, karena TNI merupakan instansi vertical bagi Pemerintah daerah Kabupaten Bogor, yang memiliki peraturan perundang-undangan yang berbeda dalam penyusunan program, perencana kegiatan, pengelolaan keuangan dan lain sebagainya. Kegiatan TMMD dilaksanakan karena ada keterkaitan dalam tugas pokok dan fungsi bersama Pemerintah daerah.
Sikap pelaksana/ disposisi	3. **Bagaimana kondisi masyarakat yang diwilayahnya telah melaksanakan program TMMD apakah mengalami perubahan yang berarti kearah yang lebih baik, kondisi kesejahteraan dan kehidupan sosial, serta kemandirian masyarakatnya?Jelaskan** Pasca kegiatan TMMD di lokasi-lokasi sasaran kegiatan merasakan manfaat yang nyata secara bertahap dalam peningkatan indeks pembangunan manusia dari segala bidang kehidupan bermasyarakat. Secara bertahap kondisi kesejahteraan sosial, ekonomi dan politik masyarakat berubah menjadi lebih baik, karena hasil dari kegiatan fisik dan non fisik yang membuat cara berfikir dan pola hidup masyarakat sedikit demi sedikit berubah dengan bertambahnya wawasan dan infrastruktur penunjang dari

	hasil kegiatan TMMD. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan pemilihan desa tertinggal, terpencil, kumuh, rawan terhadap bencana alam, dan memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang layak untuk dikembangkan.
	B. Hasil implementasi program TMMD khususnya tentang partisipasi masyarakat dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor.
Struktur Birokrasi	**4. Apa tujuan dan sasaran program TMMD?** Tentunya yang paling mendasar tentang tugas pokok operasi militer selain perang, dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah membantu tugas pemerintah di daerah dalam pembinaan teritorial yang bertujuan untuk menyiapkan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukung melalui kemanunggalan TNI dengan masyarakat melalui kegiatan fisik seperti pembuatan akses jalan, rehabilitasi tempat ibadah, sarana air bersih dan air kotor, dan lain-lain. Adapun kegiatan non fisik seperti penyuluhan tentang kebersihan lingkungan, program keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan untuk alih informasi dan memotivasi masyarakat pedesaan.
Komunikasi	**5. Apakah hasil TMMD mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor?** Selama pelaksanaan TMMD, menurut pengamatan kami cukup meningkat, karena masyarakat merasa senang dengan keberadaan TNI di desa-desa. Hal ini dapat dilihat kesediaan warga masyarakat memberikan rumah mereka sebagai tempat akomodasi bagi prajurit TNI tersebut.

Dokumentasi Wawancara dengan Kadis PUPR
Kabupaten Bogor

MABES TNI	
Narasumber : Paban Bakti TNI Ster Mabes TNI **Waktu : Senin, 5 Agustus 2019** **Kode : B-1**	
Model Teori	**A. Implementasi program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat?**
Komunikasi	**1. Apakah pernah melaksanakan sosialisasi program TMMD?** Pernah, Sosialisasi Program TMMD dilaksanakan secara terus menerus setiap tahunnya pada pelaksanaan Rapat Koordinasi penyelenggaraan TMMD dan Rapat Paripurna TMMD sebagai evaluasi pelaksanaan TMMD tahun berjalan serta rencana penyelenggaraan TMMD tahun berikutnya dengan melibatkan Kementerian/LPNK, Pemda dan instansi terkait lainnya
Sumber daya	**2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menentukan sasaran fisik dan non fisik program TMMD?apakah masyarakat dilibatkan?**

	Masyarakat memang seharusnya dilibatkan dalam menentukan sasaran fisik dan non fisik program TMMD. Oleh karenanya hal ini tergantung kepada pihak Pemda dan pihak Kodim setempat selaku perencana kegiatan TMMD di daerah, apakah mereka melibatkan masyarakat dalam menentukan sasaran-sasaran TMMD yang mereka rencanakan. Untuk itu mereka harus turun ke desa melaksanakan survei untuk mendapat informasi tentang kebutuhan dan keinginan masyarakat.
B.Hasil implementasi program TMMD khususnya tentang partisipasi masyarakat dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor.	
Struktur Birokrasi	**3. Apa tujuan dan sasaran program TMMD. Jelaskan?** Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar dengan garis pantai terpanjang ke 2 di dunia dimana pengalaman sejarah saat awal Orde Baru Negara dalam kondisi ekonomi yang sulit, pembangunan harus segera dilaksanakan, desa sebagai basis ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa menjadi prioritas. Oleh karena itu diperlukan sinergi antara TNI,Pemerintah, Tomas dan rakyat sehingga dilaksanakanlah TMMD.Dihadapkan pada kondisi saat ini masih banyak permasalahn khususnya masalah sosial yang belum selesai terutama di desa seperti kesenjangan sosial, ancaman ideologi, ancaman politik, ancaman ekonomi, ancaman kemiskinan dan kelaparan serta ancaman budaya maka kehadiran program TMMD bukan sekedar menghadirkan bangunan fisik dan bukan juga sekedar tambahan fasilitas desa tetapi lebih kepada terjalinnya komunikasi dan memberi solusi terhadap permasalahan yang ada serta memberikan perhatian yang mendalam terhadap masyarakat sehingga akan terbentuk Ketahanan Wilayah terhadap berbagai ancaman yang akan dihadapi serta terciptanya Kemanunggalan TNI-Rakyat. Program TMMD dapat mendukung Pemberdayaan wilayah Pertahanan dan sistem Pertahanan Negara di wilayah

	karena bertujuan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik dan non fisik dan memantapkan kemanunggalan TNI-Rakyat dalam rangka menyiapkan Ruang Juang, Alat Juang dan Kondisi Juang yang tangguh.
Struktur Birokrasi	**4. Apakah struktur organisasi TMMD dapat menunjang terwujudnya pemberdayaan wilayah pertahanan?** Struktur organisasi TMMD bersifat lintas sektoral, ada TNI dan ada Pemda serta masyarakat yang bersinergi demikian juga pemberdayaan wilayah pertahanan. Semua pelaku dan pendukung kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan juga sudah ada disitu, sehingga sudah memadai lah struktur organisasi TMMD ini untuk mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan, bahkan sudah otomatis dia berjalan.
Komunikasi	**5. Apakah hasil program TMMD berdampak pada terwujudnya Ruang-Alat-Kondisi Juang di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor?** Salah satu hasil dari pembangunan TMMD secara fisik adalah jalan dan jembatan. Sarana ini selain untuk membantu masyarakat diharapkan juga dapat digunakan sebagai sarana pertahanan yang secara teknis dimanfaat sebagai jalan-jalan mobilitas personel apabila dalam keadaan perang, ini merupakan wujud ruang juang. Selanjutnya manfaat lain pelaksanaan TMMD diantaranya adalah terciptanya mobilitas Sumber Daya Manusia akibat adanya pembangunan dan terciptanya kondisi fisik dan mental masyarakat yang prima melalui pelayanan dan penyuluhan kesehatan. Dengan terciptanya kondisi ini diharapkan masyarakat dapat memberikan kontribusi yang positif dalam bidang Pertahanan Negara, ini merupakan

	wujud sebagai alat juang. Dan berikutnya secara tidak langsung hasil kegiatan TMMD tentu memiliki dampak yang positif bagi masyarakat dalam hal sosial maupun ekonomi. Peningkatan kondisi ini diharapkan dapat menjadi faktor pendorong terciptanya semangat juang masyarakat dan meningkatkan rasa cinta tanah air sehingga dapat meningkatkan kondisi juang bagi pertahanan Negara, ini merupakan wujud kondisi juang.

Wawancara dengan Paban Bakti TNI Ster Mabes TNI

MABES TNI AD	
Narasumber **Waktu** **Kode**	**: Paban V/Bakti TNI Sterad** **: Jumat, 2 Agustus 2019** **: B-2**
Model Teori	**A. Implementasi program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat?**
Komunikasi	**1. Apakah pernah melaksanakan sosialisasi program TMMD?** Pernah, Sosialisasi Program TMMD di daerah

	dilaksanakan oleh Pendam/Penrem dan Kodim, sedangkan untuk di tingkat pusat dilaksanakan oleh Sterad pada saat Rakornis TMMD yang mengundang seluruh Bupati/Walikota dan pejabat Kementerian/LPNK.
Sumber daya	**2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menentukan sasaran fisik dan non fisik program TMMD?apakah masyarakat dilibatkan?** Berdasarkan evaluasi yang kita laksanakan setiap tahun partisipasi masyarakat tergantung apa dan bagaimana sasaran fisik TMMD tersebut di rencanakan, apabila program TMMD yang sasaran fisiknya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, maka partisipasi masyarakat akan tinggi, namun apabila sasaran fisik yang kurang menyentuh kebutuhan masyarakat akan berdampak terhadap kurangnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu pihak Kodim dan Pemda setempat selaku perencana kegiatan TMMD harus mempedomani ketentuan yang tertuang dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan TMMD tahun 2018/2019 yang menyatakan bahwa pemilihan sasaran TMMD diutamakan di daerah 3T, yaitu terisolir, terdepan dan terpencil. Daerah-daerah tersebut harus diusulkan secara *Bottom Up* sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan untuk itu perlu ada komunikasi menanyakan langsung kepada masyarakat apa yang menjadi kebutuhan mereka. Masukan-masukan dari masyarakat di bawa ke Pemda untuk dirapatkan dan dipadukan dengan program-program pembangunan Pemda untuk mendapatkan alokasi dukungan anggaran APBD.
B. Hasil implementasi program TMMD khususnya tentang partisipasi masyarakat dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor.	
Struktur Birokrasi	**3. Apa tujuan dan sasaran program TMMD. Jelaskan?** Tujuan dari program TMMD dihadapkan dengan perspektif pertahanan adalah untuk menyiapkan dan mengolah potensi wilayah untuk mendukung pertahanan aspek darat

	berdasarkan kepada unsur Geoografi, Demografi dan Kondisi Sosial untuk mendukung RAK Juang yang tangguh melalui kegiatan fisik (pembangunan infrastruktur) dan non fisik (penyuluhan bela negara/wasbang). Tujuan dan sasaran Program TMMD sangat mendukung Pemberdayaan wilayah Pertahanan dan sistem Pertahanan Negara di wilayah. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian hasil kegiatan fisik TMMD yaitu pembangunan sarana infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendukung terwujudnya pemberdayaan wilayah pertahanan. Adapun kegiatan non fisik juga bertujuan untuk meningkatkan semangat bela Negara, cinta tanah air dan wawasan kebangsaan serta meningkatkan semangat gotong royong yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan RAK juang yang tangguh.
Sumber daya	**4. Apakah struktur organisasi TMMD dapat menunjang terwujudnya pemberdayaan wilayah pertahanan?** Struktur organisasi TMMD bersifat lintas sectoral, ada TNI dan ada Pemda serta masyarakat yang bersinergi demikian juga pemberdayaan wilayah pertahanan. Semua pelaku dan pendukung kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan juga sudah ada disitu, sehingga sudah memadai lah struktur organisasi TMMD ini untuk mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan, bahkan sudah otomatis dia berjalan.
Komunikasi	**5.Apakah hasil program TMMD berdampak pada terwujudnya Ruang-Alat-Kendali Juang di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor?** Salah satu hasil dari pembangunan TMMD secara fisik adalah jalan dan jembatan. Sarana ini selain untuk membantu masyarakat diharapkan juga dapat digunakan sebagai sarana pertahanan yang secara teknis dimanfaat sebagai jalan-jalan mobilitas personel apabila dalam keadaan perang, ini merupakan wujud ruang juang.

	Selanjutnya manfaat lain pelaksanaan TMMD diantaranya adalah terciptanya mobilitas Sumber Daya Manusia akibat adanya pembangunan dan terciptanya kondisi fisik dan mental masyarakat yang prima melalui pelayanan dan penyuluhan kesehatan. Dengan terciptanya kondisi ini diharapkan masyarakat dapat memberikan kontribusi yang positif dalam bidang Pertahanan Negara, ini merupakan wujud sebagai alat juang. Dan berikutnya secara tidak langsung hasil kegiatan TMMD tentu memiliki dampak yang positif bagi masyarakat dalam hal sosial maupun ekonomi. Peningkatan kondisi ini diharapkan dapat menjadi faktor pendorong terciptanya semangat juang masyarakat dan meningkatkan rasa cinta tanah air sehingga dapat meningkatkan kondisi juang bagi pertahanan Negara, ini merupakan wujud kondisi juang.

Wawancara dengan Paban V/Bakti TNI Sterad

KOREM 061/SK	
Narasumber : Danrem 061/SK **Waktu : Selasa, 30 Juli 2019** **Kode : B-3**	
Model	**A. Implementasi program TMMD di wilayah Kodim**

Teori	**0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat?**
Komunikasi	**1. Apakah Korem 061/SK pernah melaksanakan sosialisasi program TMMD?** Pernah, Korem 061/SK melaksanakan sosialisasi program TMMD oleh Kodim-Kodim di wilayahnya kepada instansi terkait di wilayah masing-masing.
Sumber daya	**2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menentukan sasaran fisik dan non fisik program TMMD?apakah masyarakat dilibatkan?** Partisipasi masyarakat cukup baik, masyarakat memberi saran dan masukan tentang sasaran fisik dan non fisik sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat dilibatkan sesuai ketentuan sebagaimana tertuang dalam buku pedoman penyelenggaraan TMMD tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Staf territorial TNI AD yang menyatakan bahwa proses penentuan/pemilihan sasaran dilaksanakan dengan mekanisme secara terpadu dan terkoordinasi dimulai dari tingkat Desa atau Kelurahan melalui forum rapat LMD (Lembaga Musyawarah Desa) atau LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) dan BPD (Badan Pengawas Desa) atau Dekel (Dewan Kelurahan) atau yang sejenis lainnya. Hasil rapat di tingkat Desa/Kelurahan ini diajukan ke tingkat Kecamatan dalam diskusi UDKP (Unit Desa Kerja Pembangunan). Kemudian saran kegiatan yang terpilih diteliti dan dipadukan dengan rencana program pembangunan Pemda tingkat Kabupaten/Kota, serta dikoordinasikan dalam Rapat Rencana Pembangunan Daerah (Renbangda) selanjutnya diusulkan melalui rapat dengan DPRD untuk disahkan menjadi Program Pembangunan Daerah;
B. Hasil implementasi program TMMD khususnya tentang partisipasi masyarakat dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor.	
Struktur Birokrasi	**3. Apa tujuan dan sasaran program TMMD. Jelaskan?** Tujuannya adalah : Memberikan rasa kesetaraan antar

	masyarakat di wilayah tersebut dengan warga yang lainnya dalam lingkup kabupaten tersebut agar masyarakat bisa mendapatkan kehidupan yang layak sehingga meningkatkan kesadaran bela negara.
Struktur Birokrasi	**4. Apakah struktur organisasi TMMD dapat menunjang terwujudnya pemberdayaan wilayah pertahanan?** Struktur organisasi TMMD dapat menunjang terwujudnya pemberdayaan wilayah pertahanan karena Struktur organisasi TMMD bersifat lintas sectoral, ada TNI dan ada Pemda serta masyarakat yang bersinergi demikian juga pemberdayaan wilayah pertahanan. Semua pelaku dan pendukung kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan juga sudah ada disitu, sehingga sudah memadai lah struktur organisasi TMMD ini untuk mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan, bahkan sudah otomatis dia berjalan.
Komunikasi	**5. Apakah hasil program TMMD berdampak pada terwujudnya Ruang-Alat-Kendali Juang di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor?** Salah satu hasil dari pembangunan TMMD secara fisik adalah jalan dan jembatan. Sarana ini selain untuk membantu masyarakat diharapkan juga dapat digunakan sebagai sarana pertahanan yang secara teknis dimanfaat sebagai jalan-jalan mobilitas personel apabila dalam keadaan perang, ini merupakan wujud ruang juang. Selanjutnya manfaat lain pelaksanaan TMMD diantaranya adalah terciptanya mobilitas Sumber Daya Manusia akibat adanya pembangunan dan terciptanya kondisi fisik dan mental masyarakat yang prima melalui pelayanan dan penyuluhan kesehatan. Dengan terciptanya kondisi ini diharapkan masyarakat dapat memberikan kontribusi yang positif dalam bidang Pertahanan Negara, ini merupakan wujud sebagai alat juang. Dan berikutnya secara tidak langsung hasil kegiatan TMMD tentu memiliki dampak yang positif bagi masyarakat dalam hal sosial maupun ekonomi. Peningkatan kondisi ini diharapkan dapat

	menjadi faktor pendorong terciptanya semangat juang masyarakat dan meningkatkan rasa cinta tanah air sehingga dapat meningkatkan kondisi juang bagi pertahanan Negara, ini merupakan wujud kondisi juang.

Wawancara dengan Danrem 061/SK

KODIM 0621 /KABUPATEN BOGOR	
Narasumber : DANDIM **Waktu : Kamis, 8 Agustus 2019** **Kode : B-4**	
Model Teori	**A. Implementasi program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat?**
Komunikasi	**1. Apakah Kodim pernah melaksanakan sosialisasi program TMMD?** Pernah, diadakannya sosialisasi dengan instansi terkait serta diberikan arahan-arahan mekanisme dalam program tersebut. Kemudian dijelaskan juga kemungkinan kendala menonjol yang akan dihadapi yaitu medan yang sangat sulit dijangkau dan pendistribusian material serta alat-alat berat dan logistik serta cara mengatasinya. Dijelaskan

	juga tentang maksud, tujuan dan sasaran yang ingin dIcapai dalam program TMMD.
Sumber daya	**2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menentukan sasaran fisik dan non fisik program TMMD?apakah masyarakat dilibatkan? Jelaskan** Masyarakat dilibatkan dan partisipasi masyarakat melalui aparatur Pemerintahan terkait, berdasarkan surat pengajuan atau proposal yang diajukan desa kepada Pemerintah setempat. Ada ketentuan yang harus dipedomani dalam penentuan program fisik, sasaran fisik seperti pembuatan dan pengerasan jalan. Acuan dalam menentukan sasaran fisik mengacu kepada yang telah disepakati bersama pemda dan instansi-intansi lainnya. Ada kalanya pengajuan dan proposal masyarakat tidak terealisasi karena adanya ketentuan-ketentuan tekhnis dari dinas terkait seperti dinas PUPR yang harus dipenuhi. Ketika ketentuan itu tidak terpenuhi maka sasaran tersebut tidak dapat di tindaklanjuti. Keputusan untuk menindaklanjuti sasaran TMMD tersebut diputus dalam rapat tim asistensi tekhnis yang merupakan stake holder di wilayah.
B. Hasil implementasi program TMMD khususnya tentang partisipasi masyarakat dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor.	
Sumber daya	**3. Apa tujuan dan sasaran program TMMD ?** Agar dapat membantu meningkatkan kesejahteran masyarakat melalui pembangunan akses jalan, sarana ibadah dan lain-lain sehingga dapat mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan dan sistem pertahanan negara di wilayah Kab Bogor.
Struktur Birokrasi	**4.Apakah struktur organisasi TMMD dapat menunjang terwujudnya pemberdayaan wilayah pertahanan?** Struktur organisasi TMMD dapat menunjang terwujudnya pemberdayaan wilayah pertahanan karena Struktur organisasi TMMD bersifat lintas sectoral, ada TNI dan ada Pemda serta masyarakat yang bersinergi demikian juga pemberdayaan wilayah pertahanan. Semua pelaku dan

	pendukung kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan juga sudah ada disitu, sehingga sudah memadai lah struktur organisasi TMMD ini untuk mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan, bahkan sudah otomatis dia berjalan.
Komunikasi	**5.Apakah hasil program TMMD berdampak pada terwujudnya Ruang-Alat-Kendali Juang di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor?** Salah satu hasil dari pembangunan TMMD secara fisik adalah jalan dan jembatan. Sarana ini selain untuk membantu masyarakat diharapkan juga dapat digunakan sebagai sarana pertahanan yang secara teknis dimanfaat sebagai jalan-jalan mobilitas personel apabila dalam keadaan perang, ini merupakan wujud ruang juang. Selanjutnya manfaat lain pelaksanaan TMMD diantaranya adalah terciptanya mobilitas Sumber Daya Manusia akibat adanya pembangunan dan terciptanya kondisi fisik dan mental masyarakat yang prima melalui pelayanan dan penyuluhan kesehatan. Dengan terciptanya kondisi ini diharapkan masyarakat dapat memberikan kontribusi yang positif dalam bidang Pertahanan Negara, ini merupakan wujud sebagai alat juang. Dan berikutnya secara tidak langsung hasil kegiatan TMMD tentu memiliki dampak yang positif bagi masyarakat dalam hal sosial maupun ekonomi. Peningkatan kondisi ini diharapkan dapat menjadi faktor pendorong terciptanya semangat juang masyarakat dan meningkatkan rasa cinta tanah air sehingga dapat meningkatkan kondisi juang bagi pertahanan Negara, ini merupakan wujud kondisi juang.

Wawancara dengan Dandim 0621/Kab.Bogor dan Pasiter

KODIM 0621/KAB BOGOR	
Narasumber	**: PASI TERITORIAL**
Waktu	**: Kamis, 8 Agustus 2019**
Kode	**: C-1**
Model Teori	**A. Implementasi program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat?**
Sumber daya	**1. Bagaimana peran dan partisipasi Pemerintah Kab Bogor terhadap program TMMD? Jelaskan** Pemkab Bogor sangat mendukung peran TMMD yang dilaksanakan, Kodim 0621/Kab Bogor, karena kami pernah sosialisasi, khususnya masyarakat kabupaten Bogor, kampung/daerah yang akan dilaksanakan program TMMD wajib diadakan sosialisasi tentang mekanisme pekerjaan TMMD tersebut. Respon Pemerintah daerah dan masyarakat sangat bagus untuk masyarakat daerah yang terisolir sangat mengharapkan giat TMMD dari TNI, mengingat desa tersebut membutuhkan akses untuk

	kebutuhan masyarakat. tingkat partisipasi masyarakat dan pelibatan masyarakat sangat mendukung sekali, masyarakat sangat antusias membantu pelaksanaan kegiatan TMMD tersebut. Kehadiran masyarakat Wajib,tetapi masyarakat dalam kedatangannya dibagi per-RT atau per-kampung. Bahkan masyarakat ikut makan siang bersama-sama, selanjutnya melaksanakan ishoma disekeliling lokasi TMMD tersebut.
Disposisi / Sikap pelaksana	**2.Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program TMMD?** Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program TMMD pada tahun 2018 yang lalu sesuai data yang kami miliki sangat mendukung sekali, sangat antusias membantu pelaksanaan kegiatan TMMD tersebut karena masyarakat daerah yang terisolir sangat mengharapkan giat TMMD dari TNI, mengingat desa tersebut membutuhkan akses untuk kebutuhan masyarakat. Untuk tahun 2014 dan 2016 saya belum menjabat sebagai Pasiter, namun sesuai data dan informasi yang ada partisipasi masyarakat tergantung wilayahnya. Contoh untuk tahun 2014 TMMD dilaksanakan di desa Banyuasih, masyarakat disini banyak yang bekerja diluar kota. Partisipasi masyarakat jadi kurang optimal.Demikian juga pada tahun 2016 di desa Kiarapandak juga kurang maksimal karena masyarakat banyak bekerja keluar daerah.
Sumber daya	**3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menentukan sasaran fisik dan non fisik program TMMD?apakah masyarakat dilibatkan? Jelaskan** Masyarakat dilibatkan berdasarkan pengajuan/proposal yang di tujukan dari desa yang akan dilaksanakan program TMMD, misalnya membuat jalan, apabila melintasi sungai, bisa dibuat jembatan. Membuat proposal melalui kesepakatan masyarakat dengan RT,RW, dilanjutkan ke desa, kecamatan dan koramil berupa surat

	permohonan, ditujukan kepada Dandim, dan Pemerintah daerah dengan keluhan masyarakat setempat. Pemda mau mengucurkan dana TMMD untuk mengembangkan daerah yang terisolir, agar daerah tersebut menjadi lebih maju. Partisipasi masyarakat pada tahun 2018 yang lalu cukup baik.
	B. Hasil implementasi program TMMD khususnya tentang partisipasi masyarakat dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor.
Struktur Birokrasi	**4. Apakah struktur organisasi TMMD dapat menunjang terwujudnya pemberdayaan wilayah pertahanan?** Yang kami pahami di lapangan, Struktur organisasi TMMD sama dengan organisasi Kodim, hanya ada tambahan pendukung dari unsur-unsur Pemda dan masyarakat sehingga disebut organisasinya sebagai Satgas TMMD. Organisasi Satgas TMMD ini tupoksinya melaksanakan TMMD. Pelaksanaan TMMD dapat mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan, maka struktur organisasi TMMD inipun dapat menunjang terwujudnya pemberdayaan wilayah pertahanan.
Komunikasi	**5. Apakah hasil program TMMD berdampak pada terwujudnya Ruang-Alat-Kendali Juang di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor?** Sangat berdampak yaitu hasil pencapaian Program TMMD dapat mendukung Pemberdayaan wilayah Pertahanan dan sistem Pertahanan Negara di wilayah melalui pencapaian hasil kegiatan fisik TMMD yaitu pembangunan sarana infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendukung terwujudnya pemberdayaan wilayah pertahanan. Adapun kegiatan non fisik juga bertujuan untuk meningkatkan semangat bela Negara, cinta tanah air dan wawasan kebangsaan serta meningkatkan semangat gotong royong yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan Ruang Alat Kondisi (RAK)

	juang yang tangguh.
Komunikasi	**6. Apakah hasil TMMD mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor?** Sepanjang pengamatan kami dilapangan, bahwa selama kegiatan TMMD, telah terjalin komunikasi dan hubungan saling asah, asih ,asuh antara prajurit TNI dan masyarakat. Adanya kreativitas satgas TMMD sebagai penunjang terwujudnya hubungan yang harmonis yaitu adanya kebijakan yang mengharuskan prajurit untuk tinggal di rumah-rumah rakyat, makan bersama rakyat sehingga terwujud kemanunggalan TNI Rakyat.

Wawancara dengan Pasi Ter Kodim 0621/Kab Bogor

KODIM 0621/KAB BOGOR	
Narasumber	**: Danramil 2118/Cigudeg**
Waktu	**: Senin, 12 Agustus 2019**
Kode	**: C-2**
Model Teori	**A. Implementasi program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat?**

Sumber daya	**1. Bagaimana peran dan partisipasi Pemerintah Kab Bogor terhadap program TMMD? Jelaskan** Peran dan partisipasi Pemerintah Kab Bogor terhadap program TMMD baik, sangat antusias dan sangat mendukung, sehingga diluncurkan nya dana dari pihak pemerintah daerah, hal ini dikarenakan daerah tersebut tergolong daerah terisolir. Selain itu juga disebabkan karena kami pernah melaksanakan sosialisasi tentang program TMMD dengan metode komsos kepada masyarakat, pada tahun 2018 di Kp Cijantur Desa Rabak Kec. Rumpin yang dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, kecamatan. Walaupun terkadang ada masalah pembebasan lahan sehingga masyarakat minta ganti rugi atas lahan yang terkena pembuatan jalan. Namun setelah dilakukan penjelasan kepada masyarakat, akhirnya masyarakat dapat menerimanya.
Sumber daya	**2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dan pelibatan masyarakat dalam program TMMD?** Untuk wilayah Koramil Cigudeg yang meliputi desa Banyuasih Kec Cigudeg dan desa Kiarapandak kec Sukajaya, partisipasi masyarakat pada saat TMMD tahun 2014 dan 2016 kurang optimal. Kehadiran masyarakat di desa Banyuasih tiap hari rata-rata dibawah 50 orang. Selama pelaksanaan TMMD masyarakat selalu dijadwal untuk hadir,namun yang hadir masyarakat di desa Kiarapandak tiap hari rata-rata kurang dari 50 orang. Masyarakat di dua desa ini banyak bekerja di luar daerahnya, sehingga kalau siang hari desa tersebut sepi ditinggal warganya untuk bekerja di Kota Jakarta.
Sumber daya	**3.Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menentukan sasaran fisik dan non fisik program TMMD?apakah masyarakat dilibatkan? Jelaskan** Partisipasi dalam menentukan sasaran fisik dan non fisik baik. Masyarakat yang diwakili oleh ketua RT/RW dan tokoh masyarakat selalu dilibatkan dalam rapat koordinasi yang dilakukan Koramil, selalu mengundang dan melibatkan masyarakat, hanya saja tidak semua

	masyarakat, hanya diwakilkan kepada tomas, toga, todat dan pemuda. Sebelum Kodim mengundang rapat koordinasi, saya juga mengundang ke Koramil sebelumnya supaya masyarakat satu suara.
	B. Hasil implementasi program TMMD khususnya tentang partisipasi masyarakat dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor.
Struktur Birokrasi	**4.Apakah struktur organisasi TMMD dapat menunjang terwujudnya pemberdayaan wilayah pertahanan?** Yang kami pahami di lapangan, Struktur organisasi TMMD sama dengan organisasi Kodim, hanya ada tambahan pendukung dari unsur-unsur Pemda dan masyarakat sehingga disebut organisasinya sebagai Satgas TMMD. Organisasi Satgas TMMD ini tupoksinya melaksanakan TMMD. Pelaksanaan TMMD dapat mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan, maka struktur organisasi TMMD inipun dapat menunjang terwujudnya pemberdayaan wilayah pertahanan.
Komunikasi	**5.Apakah hasil program TMMD berdampak pada terwujudnya Ruang-Alat-Kondisi Juang di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor?** Sangat berdampak yaitu hasil pencapaian Program TMMD dapat mendukung Pemberdayaan wilayah Pertahanan dan sistem Pertahanan Negara di wilayah melalui pencapaian hasil kegiatan fisik TMMD yaitu pembangunan sarana infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendukung terwujudnya pemberdayaan wilayah pertahanan. Adapun kegiatan non fisik juga bertujuan untuk meningkatkan semangat bela Negara, cinta tanah air dan wawasan kebangsaan serta meningkatkan semangat gotong royong yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan Ruang Alat Kondisi (RAK) juang yang tangguh.
Komunikasi	**6.Apakah hasil TMMD mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor?** Sepanjang pengamatan kami dilapangan, bahwa selama

	kegiatan TMMD, telah terjalin komunikasi dan hubungan saling asah, asih ,asuh antara prajurit TNI dan masyarakat. Adanya kreativitas satgas TMMD sebagai penunjang terwujudnya hubungan yang harmonis yaitu adanya kebijakan yang mengharuskan prajurit untuk tinggal di rumah-rumah rakyat, makan bersama rakyat sehingga terwujud kemanunggalan TNI Rakyat.

Wawancara dengan Danramil dan Camat Cigudeg

KODIM 0621/KAB BOGOR	
Narasumber	**: Danramil 2112/Rumpin**
Waktu	**: Selasa, 13 Agustus 2019**
Kode	**: C-3**
Model Teori	**A. Implementasi program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat?**
Sumber daya	**1. Bagaimana peran dan partisipasi Pemerintah Kab Bogor terhadap program TMMD? Jelaskan** Bahwa pemerintah Kab.Bogor sangatlah mendukung dengan adanya program TMMD yang dilakukan oleh satuan Aparat territorial yaitu Kodim 0621 yang wilayahnya

	cukup luas. Yang intinya sangat antusias dengan adanya program TMMD. Untuk masyarakat, sangatlah bersyukur,dengan adanya program TMMD yang pada awalnya lokasi yang sulit di tempuh oleh masyarakat sekitar. Namun dengan adanya TMMD, maka masyarakat sekitar sangat antusias, untuk mendukung program TMMD yang dilakukan oleh apparat territorial. Sering sekali saya melakukan sosialisasi, tentang program TMMD kepada masyarakat maupun aparatur pemerintah setempat. Menurut saya, sampai saat ini, untuk kendala di lapangan tidak semua dapat diselesaikan, sekalipun lokasi memang yang sulit dijangkau.
Sumber daya	**2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dan pelibatan masyarakat dalam program TMMD?** Tergantung wilayahnya pak, memang sekitar tahun tahun 2014 dan 2016, ketika dilaksanakan TMMD partisipasi masyarakat kurang dilihat dari kehadiran masyarakat tiap hari rata-rata kurang dari 40-50 orang. Pada tahun 2014 dan 2016 masyarakat rame hadir pada minggu pertama, masuk pada minggu ke-2 dan ke-3 sudah minim sekali. Nanti rame lagi pada saat penutupan.
Sumber daya	**3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menentukan sasaran fisik dan non fisik program TMMD?apakah masyarakat dilibatkan? Jelaskan** Menentukan lokasi TMMD serta sasarannya dilakukan sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat, untuk itu masyarakat diajak bicara, perlu ditanya satu-persatu, disitulah peran Babinsa dan aparat desa, mulai dari dari kepala kampung, sampai ketua RW/RT. Sasaran fisik yang dikerjakan, adalah sasaran yang benar-benar dibutuhkan masyarakat sehingga memudahkan kehidupan yang layak bagi masyarakat dan pastinya untuk menentukan lokasi TMMD adalah tempat yang memang belum pernah tersentuh untuk kegiatan pengerjaan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat. Namun ketika usulan masyarakat dibawa oleh aparat desa ke kecamatan dan dari kecamatan ke Pemda untuk di bahas, biasanya usulan

	masyarakat desa suka kalah dengan usulan dari desa-desa lain. Kan yang mengusulkan pembangunan semua desa, bukan satu desa saja. Ini menjadi kewenangan dan pertimbangan Pemda, karena disesuaikan dengan program Pemda.
B. Hasil implementasi program TMMD khususnya tentang partisipasi masyarakat dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor.	
Struktur Birokrasi	**4.Apakah struktur organisasi TMMD dapat menunjang terwujudnya pemberdayaan wilayah pertahanan?** Struktur organisasi TMMD sama dengan organisasi Kodim, hanya ada tambahan pendukung dari unsur-unsur Pemda sehingga disebut organisasinya sebagai Satgas TMMD. Organisasi Satgas TMMD ini tupoksinya melaksanakan TMMD. Pelaksanaan TMMD dapat mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan, maka struktur organisasi TMMD inipun dapat menunjang terwujudnya pemberdayaan wilayah pertahanan.
Komunikasi	**5.Apakah hasil program TMMD berdampak pada terwujudnya Ruang-Alat-Kendali Juang di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor?** Sangat berdampak yaitu hasil pencapaian Program TMMD dapat mendukung Pemberdayaan wilayah Pertahanan dan sistem Pertahanan Negara di wilayah melalui pencapaian hasil kegiatan fisik TMMD yaitu pembangunan sarana infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendukung terwujudnya pemberdayaan wilayah pertahanan. Contohnya jalan desa yang dibangun pada saat TMMD ini, pada saat perang akan berguna untuk mendukung perang sebagai jalur logistik. Yang saya pahami seperti itu pak, adapun kegiatan non fisik juga bertujuan untuk meningkatkan semangat bela Negara, cinta tanah air dan wawasan kebangsaan serta meningkatkan semangat gotong royong yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan Ruang Alat Kondisi (RAK) juang yang tangguh.

Komunikas	**6.Apakah hasil TMMD mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor?** Sepanjang pengamatan kami dilapangan, bahwa selama kegiatan TMMD, telah terjalin komunikasi dan hubungan saling asah, asih ,asuh antara prajurit TNI dan masyarakat. Adanya kreativitas satgas TMMD sebagai penunjang terwujudnya hubungan yang harmonis yaitu adanya kebijakan yang mengharuskan prajurit untuk tinggal di rumah-rumah rakyat, makan bersama rakyat sehingga terwujud kemanunggalan TNI Rakyat.
Wawancara dengan Danramil 2112/Rumpin 	

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR	
Narasumber : **Camat Cigudeg** **Waktu** : **Rabu, 14 Agustus 2019** **Kode** : **D-1**	
Model Teori	**A. Implementasi program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat?**
Sumber daya	**1.Bagaimana peran dan partisipasi Pemerintah Kab Bogor terhadap program TMMD? Jelaskan**

	Pemerintah Kab.Bogor sangatlah mendukung program TMMD yang dilakukan oleh satuan Kodim 0621/Bogor. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan anggaran APBD setiap tahun sebagai bentuk partisipasi dari Pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Karena TMMD sangat membantu meningkatkan Pembangunan di Kabupaten Bogor terutama di Kecamatan Cigudeg sudah dilaksanakan pada tahun 2014. Pernah menerima sosialisasi tentang TMMD.
Sikap pelaksana/ disposisi	**2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menentukan sasaran fisik dan non fisik program TMMD?apakah masyarakat dilibatkan? Jelaskan** Dalam mementukan sasaran fisik dan non fisik baik, masyarakat banyak memberi saran dan masukan tentang kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan masyarakat terkait sasaran fisik dan non fisik yang akan dikerjakan. Masyarakat memang perlu diajak bicara, perlu ditanya satu-persatu, Sasaran fisik yang akan dikerjakan, adalah sasaran yang benar-benar dibutuhkan masyarakat sehingga bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Namun keputusan ada pada saat pembahasan pada rapat antar stake holder di Pemda yang dipimpin Bupati. Boleh-boleh saja masyarakat mengajukan saran dan proposal, namun semuanya akan dipadukan dengan program Pemda. Ada kalanya usulan desa kalah prioritas dengan program Pemda khususnya Bupati yang memimpin pada saat itu.
B. Hasil implementasi program TMMD khususnya tentang partisipasi masyarakat dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor.	
Struktur Birokrasi	**3. Apakah tujuan dan sasaran program TMMD?Jelaskan** Tujuan dari TMMD dari perspektif Pemerintah daerah adalah agar terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera serta meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat oleh karena maka yang paling utama adalah sasaran non fisik, dan selanjutnya melaksanakan kegiatan sasaran fisik. Untuk sasaran TMMD adalah : 1) daerah yang terpencil; 2)

	yang tidak bisa didanai oleh dana desa; 3) kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak.
Komunikasi	**4. Apakah hasil TMMD mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor?** Adanya komunikasi dan sikap perilaku prajurit TNI selama kegiatan TMMD di desa Banyuasih sangat baik, ramah dan bisa berbaur dengan masyarakat. Tidak ada yang arogan, tidak ada yang jadi mandor. Hal ini terlihat ketika prajurit TNI istirahat makan siang, masyarakat yang tadinya sama-sama bekerja ada yang ikut makan bersama, tetapi untuk bekalnya bawa masing-masing, Demikian juga adanya kebijakan prajurit TNI tinggal dan menetap bersama rakyat menyebabkan terwujudnya Kemanunggalan TNI Rakyat.

Wawancara dengan Camat Cigudeg

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR	
Narasumber	**: Kepala Desa Rabak**
Waktu	**: Rabu, 21 Agustus 2019**
Kode	**: D-2**

Model Teori	**A. Implementasi program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat?**
Sumber Daya	1.**Bagaimana peran dan partisipasi Pemda terhadap program TMMD?** Peran Pemerintah adalah mengarahkan program TMMD ke desa-desa, kalau tidak diarahkan Pemerintah, maka tidak sampe program TMMD ke desa-desa karena TMMD adalah program pemerintah yang dibiayai oleh APBD Kab Bogor. TNI hanya berperan mengarahkan masyarakat apa yang harus dikerjakan.
Sikap Pelaksana/ disposisi	**2.Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menentukan sasaran fisik dan non fisik program TMMD?** Ketika TMMD 2018 di desa Rabak partisipasi masyarakat bagus dan sangat antusias. Ketika masyarakat ditanya sasaran fisik apa yang akan dipilih untuk dibangun, semua memberi saran dan masukan, karena memang di desa sarana prasarana masih minim. Saran masyarakat berbeda-beda, kalau petani minta irigasi, sementara masyarakat yang lain ada minta jalan, jembatan dll. Untuk itulah peran kepala desa untuk menentukan yang prioritas dihadapkan dengan anggaran yang ada. Menentukan sasaran fisik dan non fisik benar-benar harus tepat sasaran sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat, untuk itu masyarakat perlu diajak bicara, perlu ditanya satu-persatu, mulai dari kepala kampung, sampai ketua RW/RT harus ditanyai saran dan masukannya. Sasaran fisik yang dipilih adalah sasaran yang harus benar-benar dibutuhkan masyarakat sehingga memudahkan kehidupan yang layak bagi masyarakat.
B. Hasil implementasi program TMMD khususnya tentang partisipasi masyarakat dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor.	
Struktur Birokrasi	**3.Apakah tujuan dan sasaran program TMMD?** Tujuan Program TMMD untuk mendukung program

	pembangunan desa dan program pembangunan di Kab Bogor karena kegiatan TMMD sangat berguna bagi masyarakat desa Rabak, manfaatnya banyak misalnya kita yang dulunya sakit itu harus digotong, sekarang dengan adanya jalan tidak digotong lagi, dengan adanya TMMD sudah ada jalan, meningkat perekonomian.
Komunikasi	**4.Apakah hasil TMMD mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor?** Yaa, karena pada saat TMMD terjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dan TNI dan sikap perilaku prajurit TNI selama kegiatan TMMD di desa Rabak sangat baik, ramah dan bisa berbaur dengan masyarakat. Tidak ada yang arogan, tidak ada yang jadi mandor. Hal ini terlihat ketika prajurit TNI istirahat makan siang, masyarakat yang tadinya sama-sama bekerja ada yang ikut makan bersama. Demikian juga adanya kebijakan prajurit TNI tinggal dan menetap bersama rakyat menyebabkan terwujudnya Kemanunggalan TNI Rakyat.

Wawancara dengan Kepala desa Rabak

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR	
Narasumber	**: Plt Kepala Desa Kiarapandak**
Waktu	**: Selasa, 20 Agustus 2019**

Kode : D-3	
Model Teori	**A. Implementasi program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat?**
Sumber Daya	1.**Bagaimana peran dan partisipasi Pemda terhadap program TMMD?** Yang saya tahu peran Pemerintah daerah Kabupaten Bogor yaitu Bupati Kabupaten Bogor adalah mengalokasikan dan menyediakan anggaran APBD untuk program TMMD ke desa-desa, dan membuka upacara TMMD, TNI hanya berperan mengarahkan masyarakat apa yang harus dikerjakan.
Sikap Pelaksana/ disposisi	**2.Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menentukan sasaran fisik dan non fisik program TMMD?** Partisipasi masyarakat dalam menentukan sasaran fisik dan non fisik program TMMD cukup baik dan masyarakat cukup antusias, sehingga semua memberi saran dan masukan, karena memang di desa sarana prasarana masih minim. Namun dari beberapa saran tersebut tidak semua juga terpenuhi. Saran dan masukan berupa hasil rapat musrenbangdes kita bawa ke Camat dan di Kecamatan nanti disaring lagi oleh Pak Camat baru di bawa ke Pemda Kabupaten. Kadang-kadang usulan desa kami kalah prioritas dengan usulan dari desa-desa lain, sehingga realisasinya lambat.
B. Hasil implementasi program TMMD khususnya tentang partisipasi masyarakat dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor.nan	
Struktur Birokrasi	**3.Apakah tujuan dan sasaran program TMMD?** Tujuan Program TMMD adalah untuk mendukung program pembangunan desa dan program pembangunan di Kabupaten Bogor karena kegiatan TMMD sangat berguna bagi masyarakat desa Kiarapandak, manfaatnya banyak misalnya kita yang dulunya sakit itu harus digotong, sekarang dengan adanya jalan tidak digotong lagi, dengan

	adanya TMMD sudah ada jalan, meningkat perekonomian.
Komunikasi	**4.Apakah hasil TMMD mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor?** Betul karena pada saat TMMD terjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dan TNI dan sikap perilaku prajurit TNI selama kegiatan TMMD di desa Rabak sangat baik, ramah dan bisa berbaur dengan masyarakat. Tidak ada yang arogan, tidak ada yang jadi mandor. Hal ini terlihat ketika prajurit TNI istirahat makan siang, masyarakat yang tadinya sama-sama bekerja ada yang ikut makan bersama, tetapi untuk bekalnya bawa masing-masing, Demikian juga adanya kebijakan prajurit TNI tinggal dan menetap bersama rakyat menyebabkan terwujudnya Kemanunggalan TNI Rakyat.
Wawancara dengan Kepala desa Kiarapandak 	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR	
Narasumber : Kepala Desa Banyuasih **Waktu : Senin, 19 Agustus 2019** **Kode : D-4**	
Model Teori	**A. Implementasi program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi**

	masyarakat?
Sumber Daya	1.**Bagaimana peran dan partisipasi Pemda terhadap program TMMD?** Yang saya tahun peran Pemerintah daerah Kabupaten Bogor yaitu Bupati Kabupaten Bogor adalah mengalokasikan dan menyediakan anggaran APBD untuk program TMMD ke desa-desa, dan membuka upacara TMMD, TNI hanya berperan mengarahkan masyarakat apa yang harus dikerjakan.
Sikap Pelaksana/ disposisi	**2.Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menentukan sasaran fisik dan non fisik program TMMD?** Partisipasi masyarakat dalam menentukan sasaran fisik dan non fisik program TMMD cukup bagus dan masyarakat sangat antusias, sehingga semua memberi saran dan masukan, karena memang di desa sarana prasarana masih minim. Oleh sebab itu maka peran kepala desa untuk menentukan sasaran mana yang prioritas dihadapkan dengan anggaran yang ada. Demikian juga saran dan usulan kami dibawa ke tingkat kecamatan, nanti di kecamatan di adu dengan usulan dari desa lainnya. Kalau usulan desa kami kalah prioritas dengan usulan dari desa lain, mungkin saran dan usulan dari desa kami tidak ditindaklanjuti ke Pemda Kabupaten. Untuk itu usulan tersebut perlu dikawal, dan dijaga dengan pejabat Pemda dan Kodim supaya bisa terealisasi dengan cepat. Karena desa yang mau program TMMD banyak dan berebut.
	B. Hasil implementasi program TMMD khususnya tentang partisipasi masyarakat dalam mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor.
Struktur Birokrasi	**3.Apakah tujuan dan sasaran program TMMD?** Tujuan Program TMMD adalah untuk mendukung program pembangunan desa dan program pembangunan di Kabupaten Bogor karena kegiatan TMMD sangat berguna bagi masyarakat desa Kiarapandak, manfaatnya banyak misalnya kita yang dulunya sakit itu harus digotong,

	sekarang dengan adanya jalan tidak digotong lagi, dengan adanya TMMD sudah ada jalan, meningkat perekonomian.
Komunikasi	**4.Apakah hasil TMMD mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor?** Betul karena pada saat TMMD terjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dan TNI dan sikap perilaku prajurit TNI selama kegiatan TMMD di desa Rabak sangat baik, ramah dan bisa berbaur dengan masyarakat. Tidak ada yang arogan, tidak ada yang jadi mandor. Hal ini terlihat ketika prajurit TNI istirahat makan siang, masyarakat yang tadinya sama-sama bekerja ada yang ikut makan bersama, tetapi untuk bekalnya bawa masing-masing, Demikian juga adanya kebijakan prajurit TNI tinggal dan menetap bersama rakyat menyebabkan terwujudnya Kemanunggalan TNI Rakyat.

Wawancara dengan Kepala desa Banyuasih

TOKOH MASYARAKAT DESA RABAK KABUPATEN BOGOR	
Narasumber	**:Tokoh masyarakat (Swasta/Ketua RT)**
Alamat	**: Kp Cijantur Rt 03 Rw 06 Desa Rabak**
Waktu	**: Jumat, 23 Agustus 2019**

Kode : E-1	
Model Teori	**A. Implementasi program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat?**
Sumber daya	**1.Bagaimana partisispasi masyarakat dalam pelaksanaan program TMMD?** Tingkat partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam program TMMD cukup baik. Masyarakat antusias membantu program TMMD, karena TMMD sangat berguna, manfaatnya kalau dulu jalannya setapak untuk motor, bahkan kalau ke rumah sakit saja membawanya pake tandu, tapi sekarang berkat adanya TMMD, jalannya terbuka untuk masuk mobil. Masyarakat sangat bersukur. Yang mengerahkan dari tingkat RT, tokoh masyarakat, tokoh pemuda sama kepala desa. Caranya mengadakan pertemuan tingkat RT, bersama RW berembuk bagaimana, baru setelah itu pada tingkat masyarakat dikumpulkan dan di bicarakan bagaimana caranya untuk membantu TNI yang akan membangun desa kita. Kita dijadwalkan 50 orang perhari, tapi fakta di lapangan berbeda, lebih banyak. Yaa setiap hari, tapi sesuai jadwal pak. Pekerjaan rutin sehari-hari seperti bertani, mereka tinggalkan agar dapat membantu TNI. Masyarakat yang terlibat kegiatan fisik dan non fisik bergantian, kalau hari ini dia ikut kegiatan fisik, maka kegiatan yang non fisik tidak ikut begitu terus bergantian, kegiatan non fisik biasanya dilaksanakan di tempat-tempat berkumpul masyarakat seperti balai desa, masjid atau sekolah, untuk waktunya biasanya setelah dzuhur atau setelah ashar atau pernah juga dilaksanakan malam
Sikap pelaksana/ disposisi	**2. Bagaimana kondisi masyarakat yang di wilayahnya telah dilaksanakan program TMMD, apakah mengalami perubahan kearah yang lebih baik, kondisi kesejahteraan dan kehidupan sosial, serta kemandirian masyarakatnya?** Setelah dilaksanakan TMMD, hasil program TMMD di manfaatkan oleh masyarakat, yang tadinya jalan setapak

	menjadi bisa kendaraan mobil, kondisi masyarakat pun berubah, sosial ekonominya jadi meningkat, dan lebih mandiri. Sebelum pelaksanaan TMMD, dilaksanakan sosialisasi tentang manfaat TMMD yaitu ekonomi menjadi meningkat karena pembangunan jalan dll, tentang pelaksanaan TMMD contoh ada tanah warga masyarakat yang kena pembuatan jalan, masyarakat harus rela. TMMD sangat bermanfaat bagi masyarakat dari ekonomi awalnya hasil bumi dipikul sekarang naik mobil, perekonomian jadi naik, transportasi lebih mudah. Perilaku prajurit baik, sopan dan masyarakat sangat menyukai karena prajurit disiplin. Masyarakat sangat senang, bahkan ketika TMMD selesai dan prajurit pulang, ada warga masyarakat yang sedih.
Struktur Birokrasi	**-**
Komunikasi	**-**

Wawancara dengan tokoh masyarakat desa Rabak

TOKOH MASYARAKAT DESA KIARAPANDAK KABUPATEN BOGOR	
Narasumber	**: Tokoh masyarakat Pimp Yayasan SMK Madani**

Alamat	**: Kp Cipatat Desa Kiarapandak Kec Sukajaya**
Waktu	**: Kamis, 22 Agustus 2019**
Kode	**: E-2**
Model Teori	**A. Implementasi program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat?**
Sumber daya	**1.Bagaimana partisispasi masyarakat dalam pelaksanaan program TMMD?** Desa Kiarapandak pernah dilaksanakan TMMD satu kali pada tahun 2016. Partisipasi masyarakat sangat antusias dengan kehadiran TMMD itu, masing-masing RW dijadwalkan ada 15-20 orang. Jumlah kehadiran memang tidak banyak karena masyrakat banyak yang merantau ke luar desa, bekerja. Walaupun sebelum pelaksanaan TMMD ada sosialisasi dari Koramil dan kecamatan tentang program TMMD, dimana isi sosialisasinya itu bahwa akan dilaksanakan TMMD di desa Kiarapandak. Masyarakat yang ada di desa sangat antusias karena TMMD sangat berguna, untuk membangun jalan. Dalam bergotong royong masyarakat sudah biasa, tidak ada hambatan. Kalau karyawan atau PNS biasanya digantikan orang dan dibayar. Mereka bayar. Yang penting ada yang hadir.
Sikap pelaksana/ disposisi	**2. Bagaimana kondisi masyarakat yang di wilayahnya telah dilaksanakan program TMMD, apakah mengalami perubahan kearah yang lebih baik, kondisi kesejahteraan dan kehidupan sosial, serta kemandirian masyarakatnya?** Kondisinya menjadi lebih baik dan bagus. Hasil TMMD tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga kondisi masyarakat yang di wilayahnya telah dilaksanakan program TMMD masyarakat mengalami perubahan kearah yang lebih baik, kondisi kesejahteraan dan kehidupan sosial menjadi meningkat, serta masyarakat jadi mandiri. Hal ini disebabkan karena hasil TMMD sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tentara itu membantu masyarakat yang

	tadinya tidak ada jalan menjadi ada jalan. Jadi keuntungan TMMD itu banyak sekali dan rasa dekat dengan tentara itu terasa sekali pada saat TMMD karena tentara membawa pembangunan supaya dekat dengan masyarakat.TMMD itu membangun mental masyarakat, masyarakat jadi terasa aman. Disamping itu TMMD bermanfaat karena masyarakat diajak rembuk dalam rencana TMMD, saya mengusulkan yang kira-kira dibutuhkan masyarakat, saya selaku tokoh masyarakat bantu masyarakat untuk menyampaikan apa yang diperlukan masyarakat.
Struktur Birokrasi	**-**
Komunikas	**-**

Tokoh masyarakat desa Kiarapandak

TOKOH MASYARAKAT DESA BANYUASIH KABUPATEN BOGOR	
Narasumber	**: Tokoh masyarakat (Tani)**
Alamat	**: Kp Cilangkap Desa Banyuasih**

Waktu	**: Senin, 19 Agustus 2019**
Kode	**: E-3**
Model Teori	**A. Implementasi program TMMD di wilayah Kodim 0621/Kab Bogor khususnya tentang partisipasi masyarakat?**
Sumber daya	**1.Bagaimana partisispasi masyarakat dalam pelaksanaan program TMMD?** Partisipasi masyarakat desa Banyuasih dalam pelaksanaan TMMD pada tahun 2014 bagus/baik walaupun tidak maksimal, sebenarnya masyarakat banyak yang ingin berpartisipasi, namun merea harus bekerja sebagi buruh diluar desanya, rata-rata di Jakarta. Yang mengerahkan pak RT/RW berikut tokoh masyarakat, setiap hari hanya 10-15 orang di gilir seminggu sekali. Warga semangat, kekompakkannya gotong royong. Masyarakat di gilir setiap hari walaupun hanya 10 orang. Pekerjaan rutin seperti mencari nafkah dan ke kebun atau sawah di tinggalkan hanya 1 hari saja, tidak tiap hari, jadi dalam satu minggu gotong royong TMMD dilaksanakan satu kali saja. Masyarakat desa Banyuasih ini banyak bekerja diluar desanya.
Sikap pelaksana/ disposisi	**2. Bagaimana kondisi masyarakat yang di wilayahnya telah dilaksanakan program TMMD, apakah mengalami perubahan kearah yang lebih baik, kondisi kesejahteraan dan kehidupan sosial, serta kemandirian masyarakatnya?** Kondisi masyarakat jadi lebih baik karena dari segi ekonomi jalan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, Kondisinya sekarang malah lebih baik karena sudah di cor beton, dimanfaatkan oleh masyarakat, Waktu jalan belum tembus, masyarakat betul-betul kesusahannya, tapi sekarang sudah tidak lagi. sebelum ada TMMD, jalan hanya setapak, cuman bisa motor, ada kebun cawu pinggir jalan, ada masyarakat sakit, tidak sempat dibawa ke rumah sakit dan meninggal ngak ketolongan. Lama-lama ada TMMD, masyarakat

	gembira gara-gara TMMD masuk desa Banyuasih. Kalau masyarakat tidak pernah diajak rembuk desa, hanya dari pak kades itu memberi tahu, pak kades mengumpulin RT,RW, kadus, tokoh masyarakat dipanggil ke desa, musyawarah dengan pak Kades. Masyarakat dikasih tahu mau ada TMMD, ayo dibantu….bareng-bareng sama tentara. Jangan ada orang malas ngak mau kerja. Alhamdulillah ada kekompakkan dari warga. hasil pekerjaan fisik dalam TMMD di desa Banyuasih sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat Banyuasih.
Struktur Birokrasi	**-**
Komunikasi	**-**

Wawancara dengan tokoh masyarakat desa Banyuasih

RIWAYAT HIDUP PENELITI

Fachruddin Usuluddin, lahir di Medan pada tanggal 11 Juli 1970. Anak kesepuluh dari pasangan Bapak H.OK.Usuluddin (Alm) dan Ibu Hj Syarifah Lim,SH. Menyelesaikan pendidikan SD Methodist Medan lulus tahun 1983, SMP Negeri 1 Medan lulus tahun 1986, SMA Negeri 1 Medan lulus tahun 1989, Mengikuti pendidikan Akademi Militer di Magelang lulus tahun 1992, Pendidikan Reguler Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Angkatan XLV lulus tahun 2007, S-1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana Jakarta lulus tahun 2012.
Dan pada tahun 2018 melanjutkan Program Magister (S-2) prodi Strategi Perang Semesta (SPS) di Universitas Pertahanan.

Peneliti masih aktif sebagai Perwira TNI Angkatan Darat dan mengawali karir pada tahun 1992. Jabatan-jabatan yang pernah diemban adalah:

1. Kepala Staf Kodim 0601/Pandeglang.
2. Kepala Seksi Personel Korem 101/Antasari di Banjarmasin.
3. Dandim 1001/Amuntai, Korem 101/Antasari, Dam VI/Mlw
4. Pabandya Bakti TNI,Spaban V/Bakti TNI Sterad di Jakarta.
5. Aster Kasdam I/BB di Medan
6. Pamen Ahli Pussen Arhanud Bidang Doktrin Ops Hanud

Pendidikan militer yang pernah diikuti yaitu:

1. Sarcab Arhanud tahun 1993 di Karangploso Malang
2. Dikalapa Arhanud TNI AD tahun 2003 di Karangploso Malang
3. Seskoad Angk-45 tahun. 2007 di Bandung

Menikah dengan Henny Farida Listiani,S.Pd pada tahun 1998 dan dikaruniai dua orang anak, bernama Clarissa Fitria Salsabila Fachruddin dan Fayza Arifa Ramadhanti Fachruddin.